



28 TAHUN BERDIRINYA KONSULAT INDONESIA DI SONGKHLA



KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
SONGKHLA THAILAND



**Foto Seluruh Staf Konsulat Republik Indonesia di Songkhla
19 Mei 2025**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku 28 Tahun Berdirinya Konsulat Republik Indonesia di Songkhla dipersembahkan kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan 28 tahun KRI Songkhla.

Kepada semua **Kepala Perwakilan** pendahulu yang telah memimpin dan mengarahkan roda diplomasi dengan keteguhan dan komitmen, *Home Staff* yang telah mengemban tugas negara dengan penuh tanggung jawab, serta *Local Staff* yang menjadi penopang utama keberlangsungan operasional Konsulat.

Kepada seluruh **warga negara Indonesia di wilayah selatan Thailand** yang juga telah menjadi inspirasi dan bagian penting dari sebagian kisah yang diangkat dalam Buku ini.

Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh **mitra lokal di selatan Thailand**, baik dari unsur pemerintah dan swasta, lembaga, komunitas, akademisi, maupun tokoh masyarakat. Kepercayaan dan kerja sama yang telah diberikan selama ini merupakan modal utama yang memungkinkan KRI Songkhla menjalankan tugasnya secara efektif dan bermakna.

Semoga Buku ini menjadi bagian dari sejarah yang menginspirasi dan menjadi pijakan bagi langkah selanjutnya.

TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku 28 Tahun Berdirinya Konsulat Republik Indonesia di Songkhla ini tidak akan pernah terwujud tanpa sumbangsih dari,

Kepala Perwakilan RI Songkhla,

Suargana Pringgano

Home Staff,

Anita, Dina Martina, Jessica Hendra Honggo, Lilis Citrawati, Mochammad Rizki Safary, Ricky Abrianda, Shalma Anisa, dan Sri Anggun Sulistyani

Local Staff,

Adul Maetam, Amirudin Abdul Wahid, Anwa Wae-useng, Armani Bilsem, Arthitaya Dammanee, Chamnan Wangananont, Chitawan Jantharattana, Denny Suryadi, Ekachai Noochaikaew, Gregorius Bangkit Satya Sutopo, Marsya Fadhia Akmal, Muhammad Iqbal, Nur Faizal Adkha, Pranee Saengnad, Raihan Hannan, Ramzy Asmoro, Raya Ratanarat, Santi Sangmanee, Siridej Suwanjan, Sudarto, Suraina Somnuek, Sroi Wisetsoros, Suwit Binwang, dan Ziko.

Tidak lupa juga, kami mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada kontributor yang telah purna tugas dari Konsulat RI Songkhla,

Kepala Perwakilan,

Fachry Sulaiman dan Heru Wicaksono

Home Staff,

Agus Cahyono Rasyid, Daniel Sihombing, Nunung Nurwulan, P Susilo Wahyuntoro, dan Purnomo Budi Raharjo

Local Staff,

Chesan Wangka, Nawal Hasamoh, Otong Royani, dan Ratna Kurniawati.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN UCAPAN TERIMA KASIH

SAMBUTAN

- Y.M. Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia i
- Y.M. Rachmat Budiman, Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand dan Wakil Tetap Indonesia untuk UNESCAP ii
- Suargana Pringgano, Konsul Republik Indonesia di Songkhla iii
- Pol. Lt. Col. Wannapong Kotcharag, Sekretaris Jenderal Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) iv
- Mr. Chodnarin Koedsom, Gubernur Provinsi Songkhla vi
- Mrs. Patimoh Sadeeyamu, Gubernur Provinsi Pattani viii
- Mr. Ahmad Fahmi bin Ahmad Sarkawi, Konsul Jenderal Malaysia di Songkhla xi
- Mr. Wang Zhijian, Konsul Jenderal Republik Rakyat Cina di Songkhla xiv
- Mr. Ekkarat Leesen, Mantan Gubernur Phang Nga, Satun, dan Narathiwat xv

BAB I KAMI MEMBUKA PINTU PERTAMA KALI 1

- A. Latar Belakang Berdirinya Konsulat RI Songkhla 1
 - 1. Aspek Hubungan Bilateral dan Kerja Sama Sub Regional 2
 - 2. Isu Strategis dan Pelindungan Warga Negara 3
 - 3. Isu Pendidikan 4
 - 4. Isu Ekonomi 5
 - 5. Isu Sosial Budaya 6
- B. Landasan Hukum Berdirinya Konsulat RI Songkhla 7
- C. Pembukaan Konsulat RI Songkhla 9

BAB II PERJALANAN PERTAMA KAMI 15

- A. Sejarah Kantor KRI Songkhla 15
- B. Sejarah Wisma Indonesia di Songkhla 19
- C. Kepala Perwakilan dari Masa ke Masa 23
- D. Sejarah Formasi Home Staff 29

BAB III WILAYAH KERJA KAMI 31

- A. Wilayah Kerja Konsulat RI Songkhla 32
 - 1. Provinsi Chumphon 32
 - 2. Provinsi Krabi 33
 - 3. Provinsi Nakhon Si Thammarat 33
 - 4. Provinsi Narathiwat 34
 - 5. Provinsi Pattani 35
 - 6. Provinsi Phang Nga 35
 - 7. Provinsi Phatthalung 36
 - 8. Provinsi Phuket 37

9. Provinsi Ranong	38
10. Provinsi Satun	38
11. Provinsi Songkhla	39
12. Provinsi Surat Thani	41
13. Provinsi Trang	41
14. Provinsi Yala	42
B. Sriwijaya: Ikatan Sejarah di Masa Lalu	42
C. Ekonomi di Selatan Thailand	44
D. Karakteristik Pendidikan	46
E. Karakteristik Sosial Budaya	60
BAB IV ORANG INDONESIA, DIASPORA INDONESIA, DAN INDONESIANIS	63
A. Jumlah WNI di Wilayah Kerja	63
B. Pekerjaan WNI di Wilayah Selatan Thailand	64
C. Diaspora Indonesia	65
D. Indonesianis	67
BAB V SOFT POWER INDONESIA DI SELATAN THAILAND	70
A. Persatuan Alumni Indonesia-Thailand (PERSAIT)	70
B. Jaringan Sahabat Republik Indonesia (JSRI)	73
C. Indonesian Corner	74
D. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	77
E. Promosi Budaya dan Ekonomi Indonesia	79
BAB VI MITRA KERJA KAMI DI SELATAN THAILAND	83
A. Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC)	83
B. Kantor Gubernur di Selatan Thailand	85
C. Kepolisian Selatan Thailand	87
D. Biro Imigrasi	88
E. Militer (ISOC 4, Navy Area Command 2, Navy Area Command 3)	89
F. Penjara di Selatan Thailand	90
G. Rumah Sakit di Selatan Thailand	91
H. Kamar Dagang	92
I. Bandar Udara di Selatan Thailand	93
J. Kementerian Luar Negeri (Kantor Paspor Songkhla)	94
K. Perguruan Tinggi di Selatan Thailand	94
L. Dinas Kebudayaan Provinsi-Provinsi Selatan Thailand	95
M. Center for Propelling the Education for Southern Provinces (CPES)	95
N. Kota Yala	96
BAB VII PENGALAMAN KERJA YANG SULIT TERLUPAKAN	97
A. Pengalaman Kerja yang Sulit Terlupakan	97
B. Permasalahan Berulang	102
C. Penghargaan dan Prestasi yang Diperoleh	105

LAMPIRAN	107
• Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1995 tentang Pembukaan Konsulat RI di Songkhla Thailand Selatan	107
• Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri Thailand tentang Persetujuan Pendirian KRI Songkhla	113
• Sambutan Menteri Luar Negeri RI pada Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Perwakilan RI di Songkhla pada Tanggal 11 Juli 1997	117
• Surat Tugas Sekertaris Jenderal Departemen Luar Negeri tentang Tim Pendahulu Pembukaan Konsulat RI di Songkhla	121
• Keputusan Kepala Perwakilan RI untuk Kerajaan Thailand tentang Pembentukan Panitia Pembukaan Konsulat RI di Songkhla	123
• Laporan Tahunan KRI Songkhla Tahun 1997	126

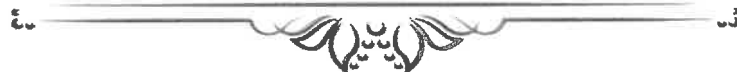
SAMBUTAN





Y.M. Sugiono

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia



Buku 28 Tahun Berdirinya Konsulat Republik Indonesia di Songkhla menjadi cerminan atas hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand yang semakin kuat dan saling menguntungkan. Sejak tahun 1997, Konsulat RI di Songkhla hadir sebagai jembatan yang mempererat hubungan antara Indonesia dengan wilayah selatan Thailand.

Buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi historis, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam sejarah persahabatan dua bangsa besar di Asia Tenggara. Bertepatan dengan peringatan 75 tahun Indonesia dan Thailand, buku ini turut menjadi momentum dalam peningkatan hubungan kedua negara menjadi Kemitraan Strategis.

Kerja sama antara Indonesia dan Thailand telah berkembang pesat dalam berbagai bidang—mulai dari politik, ekonomi, hingga *people-to-people contact*. Semua ini berakar dari fondasi kuat yang telah dibangun lintas generasi, serta akan terus dijaga dan diperkuat.

Selama tiga dekade terakhir, Konsulat RI di Songkhla telah memainkan peran kunci dalam upaya perlindungan warga negara Indonesia, promosi budaya, pelayanan kekonsuleran, serta peningkatan kerja sama ekonomi dan sosial-budaya antar masyarakat kedua negara di selatan Thailand.

Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Konsulat RI di Songkhla, para mitra kerja di selatan Thailand, masyarakat setempat, serta seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah selatan Thailand atas dedikasi, sinergi, dan komitmen dalam menjaga semangat persahabatan kedua negara.

Semoga persahabatan ini terus langgeng, tumbuh, dan memberi manfaat bagi kedua bangsa.

Jakarta, 28 Mei 2025

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Sugiono



Y.M. Rachmat Budiman

**Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand
dan Wakil Tetap Indonesia untuk UNESCAP**



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, Sawas dee krab,

Saya menyambut dengan penuh apresiasi penerbitan Buku 28 Tahun Berdirinya Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand. Kehadiran buku ini merupakan bagian penting dari upaya dokumentasi perjalanan diplomasi Indonesia, sekaligus menjadi kontribusi berharga dalam memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand.

Hubungan antara kedua negara telah terjalin erat sebelum pembukaan hubungan diplomatik secara resmi pada 7 Maret 1950. Interaksi sosial, ekonomi, dan budaya antara masyarakat Indonesia dan Thailand telah berlangsung secara alami sejak lama, khususnya di kawasan yang memiliki kedekatan geografis seperti Sumatra dan Semenanjung Thailand. Fondasi historis inilah yang menjadi dasar kuat dalam memperluas kerja sama bilateral hingga saat ini.

Pendirian Konsulat Republik Indonesia di Songkhla pada tahun 1997 merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk memperluas jangkauan pelayanan negara sekaligus mempererat hubungan antarnasyarakat di kawasan selatan Thailand. Konsulat RI di Songkhla hadir sebagai respons atas kebutuhan nyata akan kehadiran negara yang lebih dekat dan responsif terhadap kepentingan warga negara Indonesia maupun mitra kerja di wilayah tersebut.

Selama hampir tiga dekade, Konsulat RI di Songkhla telah memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi kekonsuleran, perlindungan Warga Negara Indonesia, serta promosi kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya. Konsulat RI di Songkhla juga telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat, sekaligus menjembatani upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia-Thailand khususnya di kawasan Thailand selatan.

Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Konsulat RI di Songkhla atas dedikasi, profesionalisme, dan pengabdian yang telah ditunjukkan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para mitra kerja serta para pemangku kepentingan lokal yang senantiasa memberikan dukungan bagi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan tugas Konsulat RI di Songkhla.

Selamat memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Thailand.
Selamat memperingati 28 tahun berdirinya Konsulat Republik Indonesia di Songkhla.

Semoga Konsulat RI di Songkhla senantiasa berkembang dan terus memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Thailand yang dilandasi semangat saling menghormati, saling memahami, dan saling menguntungkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Suargana Pringgana

Konsul Republik Indonesia di Songkhla



Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya menyampaikan sambutan ini dalam rangka memperingati 28 tahun berdirinya Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Songkhla, yang bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand.

KRI Songkhla memiliki wilayah kerja di wilayah selatan Thailand. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KRI Songkhla senantiasa berkoordinasi erat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok sebagai perwakilan utama Indonesia di Thailand.

Sejak diresmikan pada tahun 1997, KRI Songkhla telah mengemban tanggung jawab untuk menjangkau lebih dekat masyarakat Indonesia yang berada di selatan Thailand, serta membangun kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan penduduk setempat. Selama 28 tahun terakhir, Konsulat ini telah menjadi simpul penguatan hubungan bilateral di bidang perlindungan warga negara, pelayanan publik, promosi sosial-budaya, pendidikan, dan ekonomi.

Wilayah kerja KRI Songkhla yang mencakup 14 provinsi di selatan Thailand terus mengalami kemajuan, baik dalam pembangunan fisik maupun pembangunan sosial. Pemangku kepentingan dalam hubungan Indonesia dan selatan Thailand juga semakin bertambah. Situasi ini menuntut KRI Songkhla untuk terus beradaptasi dan merespons perubahan secara cermat dan tepat waktu.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah menjadi mitra KRI Songkhla: otoritas lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta, akademisi dan komunitas budaya, masyarakat Indonesia dan Thailand, serta seluruh konsulat jenderal di wilayah kerja kami. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh tim penyusun buku ini, yang telah mencurahkan tenaga dan perhatian untuk mendokumentasikan perjalanan panjang Konsulat Republik Indonesia di Songkhla.

Buku ini bukan hanya menjadi catatan sejarah kelembagaan, tetapi juga menggambarkan dinamika operasional dan peran Konsulat selama hampir tiga dekade.

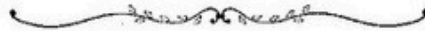
Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berinteraksi dengan KRI Songkhla dan turut memperkuat hubungan Indonesia–Thailand ke depan.

Konsul Republik Indonesia di Songkhla

Suargana Pringgana



**A Message from SBPAC
by
Pol.Lt.Col. Wannapong Kotcharag,
Secretary General of SBPAC
in Celebration of the 25th Anniversary of the Consulate of
the Republic of Indonesia in Songkhla**



On behalf of the Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC), I wish to take this opportunity to extend our warmest congratulations on the occasion of the 25th anniversary of the Consulate of the Republic of Indonesia (KRI) in Songkhla.

Since the establishment of diplomatic relations between the Kingdom of Thailand and the Republic of Indonesia in 1950, the two countries have enjoyed a good friendly and cooperative relationship in various areas, as well as frequent exchange of visits. The establishment of the KRI Songkhla is a milestone in promoting cooperation between Indonesia and Thailand, in particular 14 provinces in southern Thailand, through numerous activities and projects in all dimensions. The unwavering support and invaluable contributions of the KRI Songkhla to promote economic and social development, human resources development, as well as coexistence in cultural diversity has brought great benefits to the people in the area. It is obvious that the KRI Songkhla serves as a bridge to strengthen the relationship between Thailand and Indonesia.

In this occasion, I wish to express my sincere appreciation to the Indonesian Consul Songkhla and all the personnel in the KRI Songkhla for the determination and dedication in promoting and support cooperation towards the development in southern provinces of Thailand. I firmly believe that the friendly and cooperative relationship between SBPAC and the KRI Songkhla will become stronger through a variety of activities. SBPAC therefore stands ready to work with the KRI Songkhla, along with relevant partners and stakeholders for the mutual benefit of our two countries.

Pol.Lt.Col. 
(Wannapong Kotcharag)
Secretary General
Southern Border Provinces Administrative Centre

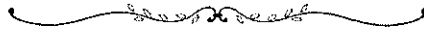
- คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ -

สาส์นจาก ศอ.บต.

โดย

พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา



ในฐานเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา

นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี ๒๕๔๓ ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร มีความร่วมมือที่ดีต่อกันในทุกด้าน และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีการก่อตั้งสถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ของไทย ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ครอบคลุมทุกมิติ อีกทั้งสถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่ กล่าวได้ว่า สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและอินโดนีเซีย

โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลฯ ทุกคน สำหรับความตั้งใจและความทุ่มเทในการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ของไทย ผมเชื่อมั่นว่า ศอ.บต. และสถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา จะสามารถต่อยอดความสัมพันธ์และความร่วมมือให้แน่นแฟ้นผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดย ศอ.บต. พร้อมทั้งจะร่วมมือกับสถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป

พันตำรวจโท

(วรรณพงษ์ คชรักษ์)

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด่วนที่สุด

ที่ สข ๐๐๑๗.๓/๗๐๕๒



ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ถนนราชดำเนิน สข ๙๐๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสารแสดงความยินดีในโอกาสโครงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๘ ปี การสถาปนา
สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา

เรียน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารแสดงความยินดี

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งว่า สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๘ ปี การสถาปนาสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา และวาระครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเขียนบทความเกี่ยวกับประสบการณ์และทัศนะในการประสานความร่วมมือในข้อราชการกับสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๒๘ ปี การสถาปนาสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา นั้น

จังหวัดสงขลา ขอส่งสารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๒๘ ปี การสถาปนาสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา และวาระครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชตินรินทร์ เกิดสม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๖๔๗๙ โทรสาร ๐๗ ๔๓๑ ๖๔๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : directorsk.03@gmail.com

สารแสดงความยินดี



นายโชตินรินทร์ เกิดสม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๘ ปี การสถาปนาสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา และวาระครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตราชอาณาจักรไทย - สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กระผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ

นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี ๒๔๙๓ สถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซียได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดสงขลาและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการทูต ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งช่วยส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

โอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน สำหรับความตั้งใจและความทุ่มเทในการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กระผมมั่นใจอย่างยิ่งว่า จังหวัดสงขลาจะร่วมมือกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในมิติใหม่ ๆ เพื่อมุ่งหน้าสู่นาคตที่รุ่งเรืองและพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันตลอดไป

(นายโชตินรินทร์ เกิดสม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา



No. 0017.3 / 7079

Pattani Provincial Hall
Decha Rd. Pattani 94000
Tel & Fax: (66 7) 349 002

17 April 2025

Subject: The publicizing a book on the occasion of the 28th Anniversary of the Establishment of the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla

To: Consul / Head of Mission

Re: The publicizing a book on the occasion of the 28th Anniversary of the Establishment of the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla,

Ref: 006/Keppri – Skl/III/2025

I am deeply honored to have been invited to contribute an article about sharing experience and views on Southern provinces cooperation with the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla to publish a book on the occasion of the 28th Anniversary of the Establishment of the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla as well as the commemoration of the 75th Anniversary of Thailand – Indonesia Diplomatic Relations in 2025.

In this regard, I am pleased to inform you that the process has been successfully completed. Therefore, I hereby submit the aforementioned article as an attachment.

Yours sincerely,

Patimoh Sidiyamu

Mrs. Patimoh Sadiyamu
Governor of Pattani Province,
Kingdom of Thailand

Experience and Perspective on Administrative Collaboration with the Consulate
of the Republic of Indonesia in Songkhla Province

By Mrs. Patimoh Sadeeyamu

Governor of Pattani Province, Kingdom of Thailand

As the Governor of Pattani Province and the first female Muslim Governor of Thailand, I am deeply pleased to have the opportunity to coordinate collaboration and extend support for diplomatic missions between Thailand and its neighboring countries—particularly Indonesia, a nation with close historical, religious, cultural, and public relations with the southern border provinces of Thailand.

Throughout my tenure as Governor of Pattani, I have had the opportunity to work closely with the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla on several initiatives. These include promoting educational collaboration, especially by linking the network of Pondok Islamic schools in the area with religious institutions in Indonesia, organizing cultural exchange programs for youth, facilitating interfaith dialogue and peace forums. These efforts have significantly strengthened mutual understanding, trust, and friendship between our two nations. As well as encouraging economic collaboration that supports grassroots development. Furthermore, What I have always appreciated is the Consulate’s friendliness, cultural sensitivity, and genuine commitment to fostering collaboration.

In my point of view, this kind of collaboration is a true example of “people-to-people diplomacy” and serves as a solid foundation for regional peace and stability. The ability of local administrators to engage directly with international missions presents a valuable opportunity to showcase the potential of our province and to connect local communities with the global stage.

As a Muslim woman, I believe that the role of women in advancing social development within culturally diverse contexts is not an obstacle but rather an opportunity. It allows for meaningful engagement and the strengthening of partnerships between government agencies, communities, and international organizations.

I sincerely hope that the collaboration between Pattani Province and the Consulate of Indonesia in Songkhla will continue to flourish and become a model of international collaboration built on mutual respect, understanding, and genuine friendship.

Patimoh Sadeeyamu

Mrs. Patimoh Sadeeyamu

Governor of Pattani Province,
Kingdom of Thailand

คำแปล
ประสบการณ์และทัศนะในการประสานความร่วมมือในข้อราชการกับสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประจำจังหวัดสงขลา

โดย นางพาดิเมาะ สะดียามู
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และเป็นสตรีมุสลิมคนแรกที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งนี้ของประเทศไทย ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสประสานความร่วมมือ และให้การสนับสนุนภารกิจทางการทูตกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ทั้งในเชิงศาสนา วัฒนธรรม และมวลชนสัมพันธ์

ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ดิฉันมีโอกาสดำเนินงานร่วมกับสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ในหลากหลายโครงการ อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเครือข่ายปอเนาะในพื้นที่กับสถาบันศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชน การเปิดเวทีเสวนาด้านศาสนาและสันติภาพ ซึ่งล้วนแต่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และมีมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ตลอดจนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการพัฒนาในระดับฐานราก นอกจากนี้ สิ่งที่ดีฉันประทับใจเสมอ คือท่าทีของความเป็นมิตร ความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่น และความตั้งใจของสถานกงสุลอินโดนีเซียฯ ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างจริงจัง

ในมุมมองของดิฉัน ความร่วมมือเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ “การทูตภาคประชาชน” ที่แท้จริง และเป็นรากฐานที่มั่นคงในภูมิภาค การที่ผู้บริหารในระดับจังหวัดสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสอันดีในการนำเสนอให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่ และเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้เข้าถึงเวทีโลก

ในฐานะสตรีมุสลิม ดิฉันเชื่อว่าบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ใช่อุปสรรค แต่กลับเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างจังหวัดปัตตานีกับสถานกงสุลอินโดนีเซียฯ จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน และจะเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพ ความเข้าใจ และมีมิตรภาพที่แท้จริง

~

นางพาดิเมาะ สะดียามู
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี



*Consul General of Malaysia
Songkhla*

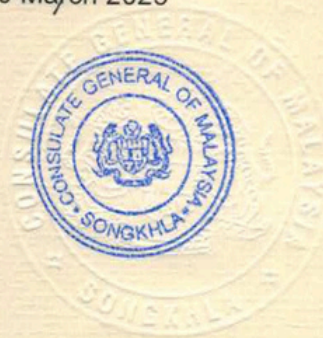
Mr. Suargana Pringgano
Consul / Head of Mission
Consulate of Republic of Indonesia

Dear Bapak Suargana,

Allow me to first congratulate on the 75th Anniversary of the Establishment of the Diplomatic Relations between Indonesia and Thailand as well as the 28th Anniversary of the Inception of the Consulate of Republic of Indonesia in Songkhla. I am truly honored for the opportunity to contribute a message for the upcoming book commemorating this remarkable milestone. Please find herewith a short piece contribution. Again thank you for this opportunity. I sincerely wish for Bapak Suargana's continuous well being and for the continued peace, stability and prosperity of Indonesia and its people.

Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest consideration.

AHMAD FAHMI BIN AHMAD SARKAWI
20 March 2025



**Message from Malaysia on the 28th Anniversary
of the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla**

**His Excellency Suargana Pringgano
Consul of the Republic of Indonesia**

Your Excellency,

Malaysia extends its warmest congratulations to the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla on the momentous occasion of its 28th anniversary. This milestone is a testament to nearly three decades of dedicated service in strengthening diplomatic ties, fostering regional cooperation, and supporting the Indonesian community in southern Thailand.

As close neighbours and ASEAN partners, Malaysia and Indonesia share deep historical, cultural, and economic connections. Over the years, our two nations have worked together in promoting regional stability, economic growth, and cultural exchange. The role of the Indonesian Consulate in Songkhla has been instrumental in enhancing these relations, not only between Indonesia and Thailand but also in fostering a spirit of collaboration within the ASEAN region.

The Consulate's commitment to serving Indonesian citizens, promoting trade and investment, and facilitating bilateral engagements has contributed significantly to the strong people-to-people ties in the region. Its efforts align with ASEAN's vision of unity, shared prosperity, and sustainable development. Malaysia deeply values this partnership and looks forward to continued cooperation in various fields, including trade, education, tourism, and cultural exchange.

As we celebrate this remarkable anniversary, Malaysia reaffirms its commitment to strengthening regional cooperation with both Indonesia and Thailand. We are confident that the Consulate will continue to play a vital role in fostering diplomatic goodwill and supporting the aspirations of our ASEAN community.

On behalf of Malaysia, we extend our best wishes for the continued success of the Indonesian Consulate in Songkhla. May this anniversary mark the beginning of even greater achievements in the years to come.

Tahniah atas ulangtahun ke-28!

**AHMAD FAHMI BIN AHMAD SARKAWI
CONSUL GENERAL OF MALAYSIA**



中 华 人 民 共 和 国 驻 宋 卡 总 领 事 馆
CONSULATE-GENERAL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN SONGKHLA
9 SADAO ROAD, SONGKHLA 90000, THAILAND

On the occasion of the 75th anniversary of diplomatic relations between Indonesia and Thailand and the 28th anniversary of the establishment of the Consulate General of Indonesia in Songkhla, Thailand, I would like to extend, on behalf of the Consulate General of the People's Republic of China in Songkhla, Thailand, our warmest congratulations and sincere wishes to you!

Indonesia and Thailand are both important countries in Asia. The 75 years of friendly exchanges and extensive cooperation between the two nations have not only brought tangible benefits to their peoples but have also made significant contributions to regional peace, stability, and prosperity.

Since its establishment, the Consulate General of Indonesia in Songkhla, Thailand, has been dedicated to promoting friendly exchanges and cooperation between Indonesia and the southern region of Thailand, and has maintained a deep friendship with the Consulate General of China in Songkhla, Thailand. I deeply appreciate this.

Indonesia and Thailand are both good neighbors and partners of China. We firmly believe that "neighbor wish each other well just as family member do to each other". We sincerely hope that the friendly relations between Indonesia and Thailand will reach new heights, that the tree of China-Indonesia friendship will remain evergreen.

Sincerely,

Wang Zhijian

Consul-General of The People's Republic of China in Songkhla

สารแสดงความยินดี



ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์อันดีอย่างใกล้ชิดในฐานะกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนด้วยกัน มาเป็นเวลากว่า 70 ปี ทั้งสองประเทศมีข้อตกลงในความร่วมมือครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และสังคม วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด

ในระดับภูมิภาค กระผมได้มีโอกาสประสานความสัมพันธ์กับท่านกงสุลใหญ่ ท่านกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่จากสถาน กงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลา ในช่วงดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (คศ. 2018-2020) ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (คศ. 2020-2022) และผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (คศ. 2022-2023) อย่างดียิ่ง ครอบคลุมในทุกด้าน ช่วงดำรงตำแหน่งผู้ว่า ราชการจังหวัดนราธิวาส มีโอกาสสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมผ่านสถานศึกษาของทั้งสองประเทศ ในพื้นที่ จังหวัดสตูล จังหวัดร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เครื่องแต่งกาย อาหาร การกิน มีการจัดกิจกรรมเดินแบบกิตติมศักดิ์ร่วมกับสมาคมสตรีสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา มีชาวสตูลมาร่วม กิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้ร่วมมือกันประสานให้การคุ้มครอง ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนชาวอินโดนีเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเข้ามาทำงานในพื้นที่มาโดยตลอด ทั้งสามจังหวัดที่กระผมได้รับการแต่งตั้ง มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างความใกล้ชิด ประสาน มิตรไมตรีต่อกันอย่างดียิ่งมาโดยตลอด โดยเฉพาะในทุกปี กระผมได้มีโอกาสเปิดบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด หรือห้องทำงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อนรับท่านกงสุลใหญ่และคณะที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ รวมถึงในโอกาสมากกว่าคำอำลา เนื่องจากต้องพ้นหน้าที่ไปตามวาระ นับเป็นเกียรติของกระผมและประชาชนในจังหวัดที่ได้มีโอกาสต้อนรับมิตรประเทศอย่าง ดี

ในโอกาสครบรอบ 28 ปี การสถาปนาสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา กระผมขอแสดงความยินดีและใคร่ ขอพรจากเอกอัครราชทูต (ชบ.) องค์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ได้โปรดบันดาลประทานพรให้มิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคมีแต่ความยั่งยืน สถาพร ตลอดกาลนาน และดำเนิน ไปสู่อนาคตความสัมพันธ์ที่พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ด้วยความเคารพนับถือ

(นายเอกรัฐ หลีเส้น)

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สตูล และพังงา

BAB I

KAMI MEMBUKA PINTU PERTAMA KALI

Indonesia telah lama menjalin persahabatan dengan banyak negara di Asia Tenggara, salah satunya adalah Thailand. Sudah 75 tahun Indonesia menjalin hubungan diplomatik dan persahabatan dengan Thailand. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand ditandatangani pada 07 Maret 1950. Untuk memperkuat hubungan diplomatik tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian mendirikan sebuah kantor Konsulat Republik Indonesia di kota Songkhla. Konsulat Republik Indonesia di Songkhla (KRI Songkhla) membuka pintu pertama kali pada 28 Maret 1997.

Secara geografis, Thailand dan Indonesia dipisahkan oleh perairan, yaitu Selat Malaka dan Laut Andaman. Pada bagian selatan, Thailand berbatasan darat dengan Malaysia dan Myanmar. Kota Songkhla sendiri merupakan ibu kota dari Provinsi Songkhla, salah satu provinsi terbesar di selatan Thailand, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Pembukaan KRI Songkhla di wilayah selatan Thailand tentunya merupakan hasil dari pertimbangan yang matang. Terlebih lagi, kehadiran kantor ini menjadi tonggak penting setelah 47 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand.

Berdirinya KRI Songkhla menambah jajaran perwakilan Indonesia di Thailand, melengkapi peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok yang telah lebih dahulu hadir. Selama 28 tahun terakhir, KRI Songkhla telah memainkan peranan penting dalam mempererat kerja sama serta mewakili kepentingan Indonesia di wilayah selatan Thailand. Rasanya akan sangat menarik jika dapat menggali tentang banyak hal untuk mengenang berbagai tantangan dan upaya yang telah ditempuh KRI Songkhla dalam menjalankan misinya selama hampir tiga dekade terakhir, seperti mengetahui tentang; latar belakang berdirinya KRI Songkhla, landasan hukum berdirinya KRI Songkhla, serta cerita mengenai pembukaan awal KRI Songkhla itu sendiri. Cerita tersebut akan kami bahas pada bab ini.

A. Latar Belakang Berdirinya Konsulat RI Songkhla

Selama 28 tahun KRI Songkhla berkiprah di wilayah selatan Thailand yang mencakup 14 provinsi, KRI Songkhla telah menapaki perjalanan panjang penuh makna. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai peristiwa, tantangan, dan pencapaian telah mewarnai kisah Perwakilan Indonesia ini. Apabila kita menengok kembali ke belakang, rasanya penting untuk diketahui bersama mengenai alasan serta tujuan utama pendirian KRI Songkhla yang sejak

awal didasarkan pada tiga hal, yaitu; aspek hubungan bilateral dan kerja sama sub regional, isu strategis dan perlindungan warga negara, dan juga isu pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya. Mari kita bahas mengenai kelima aspek tersebut bersama-sama.

1. Aspek Hubungan Bilateral dan Kerja Sama Sub Regional

Selama menjalani hubungan bilateral, banyak hal penting telah dilalui oleh Indonesia dan Thailand. Hubungan yang terjaga baik ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perlindungan warga negara, hingga sosial-budaya dan pendidikan.

Salah satu dasar utama pendirian kantor KRI di Songkhla adalah keberadaan kerja sama Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT–GT) sejak tahun 1995. Dalam kerja sama ini, wilayah Indonesia–GT mencakup 10 provinsi di Sumatera, Malaysia–GT mencakup 11 negara bagian di Semenanjung Malaysia, dan Thailand–GT mencakup 14 provinsi di selatan Thailand.

Dari 14 provinsi di selatan Thailand, Songkhla memiliki peran strategis dan mendapat julukan *The Capital of Southern Thailand*. Provinsi ini memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar dan dengan dilengkapi pelabuhan laut, serta dilintasi oleh dua Asian Highway, yaitu AH2 dan AH18, yang terhubung dengan pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia. Di dalamnya terdapat Kota Hat Yai, yang merupakan kota kelima terbesar di Thailand setelah Bangkok, Korat, Chiang Mai, dan Chon Buri.

Sebelum KRI Songkhla didirikan pada tahun 1997, sudah ada dua konsulat jenderal negara sahabat yang lebih dahulu beroperasi di Songkhla, yaitu Konsulat Jenderal Malaysia dan Konsulat Jenderal Cina. Selain kedua negara tersebut, beberapa negara lain juga sempat membuka konsulat jenderal di Songkhla, namun kini telah tutup. Konsulat jenderal yang pernah ada dan sudah tidak lagi beroperasi di kota ini antara lain berasal dari Inggris, Amerika Serikat, dan India.

Konsulat Jenderal Malaysia mulai beroperasi pada Februari 1958 dengan menempati gedung yang sebelumnya digunakan oleh Konsulat Jenderal Inggris. Sementara itu, Konsulat Jenderal Cina mulai beroperasi pada tahun 1994, dan menggunakan bangunan yang sebelumnya dipakai oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat. India sempat memiliki kantor konsulat di Songkhla, meskipun hanya untuk waktu yang relatif singkat, yakni sekitar tahun 2011 hingga 2018.

Pada tahun 2025, Provinsi Songkhla dikabarkan tengah bersiap untuk menyambut kehadiran Konsulat Jenderal Kamboja, yang direncanakan mulai beroperasi pada tahun ini.

Kehadiran konsulat asing di selatan Thailand tidak terbatas di Songkhla saja. Provinsi lain di wilayah ini juga menjadi lokasi berbagai perwakilan asing, baik berupa konsulat jenderal kehormatan maupun konsulat kehormatan. Phuket, misalnya, wilayah ini menjadi tempat berdirinya dua konsulat jenderal, yaitu Konsulat Jenderal Rusia dan Konsulat Jenderal Australia. Di samping itu, Konsulat Jenderal Cina di Songkhla juga menempatkan *Consular Agent* di Phuket.

Selain Rusia, Australia, dan Cina, sejumlah negara lain juga memiliki konsulat jenderal kehormatan atau konsulat kehormatan di Phuket. Negara-negara tersebut antara lain Austria, Belanda, Brazilia, Ceko, Chile, Denmark, Estonia, Hongaria, Inggris, Italia, Jerman, Kazakhstan, Republik Korea, Luksemburg, Meksiko, Mongolia, Nepal, Norwegia, Oman, Polandia, Prancis, Spanyol, Swedia, dan Swiss.

Provinsi Surat Thani juga menjadi lokasi bagi sejumlah konsulat kehormatan, termasuk di wilayah Koh Samui. Di sana terdapat konsulat kehormatan Austria, Inggris, Prancis, dan Rusia. Sementara itu, Provinsi Pattani menerima satu konsulat kehormatan dari Peru.

2. Isu Strategis dan Pelindungan Warga Negara

Beberapa dekade lalu, Indonesia dan Thailand tengah fokus pada isu keamanan dalam negeri masing-masing. Indonesia saat itu berupaya membawa kedamaian di Aceh, sementara Thailand berfokus menciptakan stabilitas di kawasan yang dikenal sebagai *Deep South*, yakni di Provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat.

Situasi konflik di kedua wilayah tersebut berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, muncul pandangan bahwa kerja sama sub regional dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan. Lokasi Aceh dan wilayah *Deep South* yang relatif berdekatan memberi peluang besar untuk mempererat kolaborasi lintas negara.

Kerja sama IMT-GT menjadi salah satu platform yang diyakini dapat mendorong kemajuan di bidang ekonomi, sosial-budaya, dan pendidikan. Melalui kolaborasi ini, masyarakat yang terdampak konflik pun dapat merasakan manfaat dari meningkatnya konektivitas dan peluang kerja sama kawasan. Didirikan pada tahun 1997, KRI Songkhla diharapkan mampu menjadi garda depan yang menjembatani kerja sama bilateral dan sub regional yang saling menguntungkan antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Setelah perdamaian terwujud di Aceh pada tahun 2004, aktivitas ekonomi pun mulai bergeliat kembali, termasuk pada sektor perikanan. Sayangnya, dalam praktiknya, pencarian ikan oleh nelayan Aceh terkadang melewati batas wilayah (melaut sampai ke wilayah laut Thailand). Hal ini menyebabkan nelayan Indonesia seperti itu kemudian ditangkap oleh otoritas setempat karena melanggar batas wilayah Thailand.

Situasi tersebut kemudian memberikan dimensi strategis baru bagi keberadaan KRI Songkhla, yakni dalam hal perlindungan warga negara. Isu perlindungan terhadap nelayan asal Aceh yang ditahan karena pelanggaran wilayah perairan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan tugas KRI Songkhla.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan yang diberikan oleh KRI Songkhla tidak terbatas pada nelayan asal Aceh saja, tetapi juga mencakup nelayan dari Sumatera Utara. Hal ini wajar mengingat posisi geografis kedua provinsi tersebut yang memang berdekatan dengan wilayah selatan Thailand.

3. Isu Pendidikan

Alasan lain yang turut mendasari keberadaan KRI Songkhla adalah di bidang pendidikan. Kerja sama pendidikan antara Indonesia dan selatan Thailand bersifat dua arah. Di satu sisi, banyak warga Indonesia yang datang untuk belajar dan mengajar di wilayah selatan Thailand. Di sisi lain, warga Thailand pun melakukan hal yang sama ke Indonesia.

Songkhla sendiri menjadi salah satu tujuan favorit bagi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi di Thailand. Salah satu universitas unggulan yang menjadi pilihan mereka adalah Prince of Songkla University. Universitas ini merupakan kampus terkemuka di kawasan tersebut. Lebih jauh, jika kita cermati komposisi masyarakat Indonesia yang menetap di selatan Thailand, mayoritas dari mereka adalah mahasiswa, guru, dan juga dosen.

Di sisi lain, sebagian masyarakat selatan Thailand memiliki kemiripan budaya, bahasa, dan agama dengan masyarakat Indonesia. Faktor kedekatan ini turut menjadi daya tarik bagi pemuda dari selatan Thailand untuk menempuh pendidikan di Indonesia. Sebelum tahun 2000-an, dapat dikatakan bahwa mahasiswa dari wilayah ini umumnya datang untuk mempelajari ilmu agama Islam. Mereka tidak hanya belajar di perguruan tinggi, tetapi juga di pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Kini, cakupan bidang studi yang diminati oleh masyarakat selatan Thailand sudah semakin luas, mencakup ilmu keguruan dan pendidikan, ilmu sosial, bahkan ilmu eksakta.

Diperkirakan saat ini terdapat lebih dari 2.000 orang alumni asal selatan Thailand yang pernah menempuh pendidikan di Indonesia. Untuk mempererat hubungan dan memberikan wadah sinergi, dibentuklah Persatuan Alumni Indonesia - Thailand (PERSAIT) pada tahun 2010. Organisasi ini menjadi forum bagi para alumni untuk bersilaturahmi sekaligus berperan dalam kegiatan pembangunan di wilayah selatan Thailand.

Keberadaan PERSAIT juga memperkuat hubungan alumni dengan instansi pemerintah setempat. Dalam jangka panjang, PERSAIT diharapkan dapat mendorong para alumni agar berkontribusi secara positif terhadap pembangunan daerah asal mereka. Hingga saat ini, PERSAIT menjadi mitra aktif KRI Songkhla dalam memperluas dan meningkatkan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Thailand. Hal ini ditempuh melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan alumni, program magang, hingga promosi beasiswa.

4. Isu Ekonomi

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pendirian Konsulat RI di Songkhla dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang dimaksud merujuk pada ekonomi berbasis sumber daya lokal. Wilayah selatan Thailand dikenal mengandalkan empat sektor utama, yaitu perikanan, karet alam, kelapa sawit, dan pariwisata. Dalam konteks ini, kehadiran KRI Songkhla diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendorong kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan tersebut, khususnya dalam empat sektor andalan tersebut.

Sektor-sektor ekonomi unggulan di selatan Thailand sejatinya memiliki sifat kompetitif terhadap Indonesia. Kedua negara ini merupakan produsen besar dalam sektor perikanan, karet alam, dan juga kelapa sawit. Namun demikian, sifat kompetitif ini tidak menutup ruang kerja sama yang bersifat komplementer. Justru dari sinilah muncul potensi sinergi yang dapat saling menguntungkan.

Salah satu contoh dari kerja sama tersebut pernah terjadi dalam sektor perikanan. KRI Songkhla sempat menjadi pintu masuk bagi kapal ikan asal Thailand yang ingin membeli izin resmi dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Sekitar 15 tahun yang lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan yang memperbolehkan kapal asing menangkap ikan di laut Indonesia, dengan catatan selama memiliki izin yang sah dan sesuai ketentuan. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan praktik pencurian ikan. Banyak kapal dari selatan Thailand yang memanfaatkan kebijakan tersebut dengan melalui fasilitasi KRI Songkhla.

Namun kini, kebijakan penjualan izin tersebut sudah tidak diberlakukan lagi. Dengan demikian, peran KRI Songkhla dalam bidang kerja sama perikanan pun turut berubah. Saat ini, KRI Songkhla lebih berfokus pada promosi dan fasilitasi investasi. Salah satu contohnya adalah investasi dari perusahaan asal Songkhla, Chotiwat Manufacturing Co. Ltd., yang telah mendirikan pabrik pengolahan ikan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Investasi dari selatan Thailand tidak terbatas pada sektor perikanan saja. Perusahaan besar lainnya, Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited, yang bergerak di bidang karet alam dan juga berasal dari Songkhla, telah menanamkan investasinya di dua lokasi di Indonesia, yaitu Palembang (Sumatera Selatan) dan Pontianak (Kalimantan Barat).

Secara geografis, selatan Thailand memiliki posisi strategis yang menguntungkan sebagai jalur ekspor-impor dan pariwisata antara Indonesia dan Thailand melalui laut, yakni Laut Andaman dan Selat Malaka. Saat ini sedang dikaji wacana pembukaan konektivitas laut antara Indonesia dan selatan Thailand melalui jalur tersebut. Dari 14 provinsi yang ada di selatan Thailand, terdapat enam provinsi yang terletak di pesisir pantai barat Thailand, yaitu Satun, Trang, Krabi, Phuket, Phang Nga, dan Ranong. Dengan adanya konektivitas laut ini, pertukaran barang dan arus wisatawan antara Pulau Sumatera dan selatan Thailand diharapkan akan tumbuh lebih pesat di masa mendatang.

5. Isu Sosial Budaya

Wilayah selatan Thailand memiliki karakteristik unik tersendiri jika dibandingkan dengan wilayah Thailand secara keseluruhan. Dari sisi agama, Thailand dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya (yakni sekitar 90 persen) menganut agama Buddha. Namun, di selatan Thailand, komposisi keagamaan cukup berbeda. Beberapa provinsi memiliki mayoritas penduduk Muslim, seperti Pattani (87%), Narathiwat (82%), Yala (82%), dan Satun (77%).

Dengan populasi Muslim yang cukup besar, maka secara otomatis tidak sulit menemukan masjid di wilayah ini untuk melaksanakan ibadah salat. Salah satu masjid yang cukup dikenal adalah Masjid Raya Songkhla yang terletak di jalur penghubung antara Kota Songkhla dan Kota Hat Yai. Masjid ini juga menjadi daya tarik wisata karena bentuk arsitekturnya yang menyerupai Taj Mahal di India.

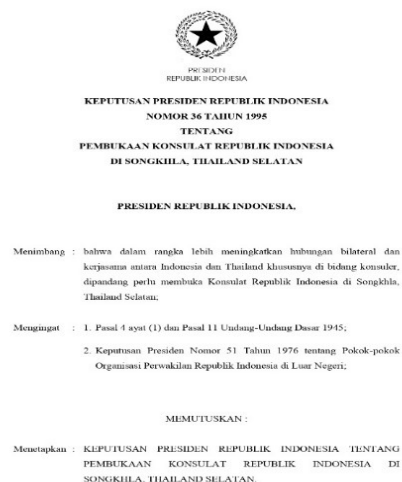
Dari segi bahasa, sebagian masyarakat selatan Thailand merupakan etnis Melayu yang dalam kehidupan sehari-hari menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Thai dan bahasa Melayu. Kesamaan dalam aspek agama, budaya, dan bahasa ini membuat berbagai elemen khas Indonesia, seperti batik dan pakaian Muslim, menjadi pemandangan yang umum di sana. Bahkan, sarung yang dikenakan oleh jamaah masjid sering kali berasal dari merek populer asal Indonesia.

Demikian pula dalam aspek kuliner, wilayah selatan Thailand dapat disebut sebagai kawasan yang ramah Muslim. Artinya, berbagai makanan halal tersedia dengan mudah. Selain itu, cita rasa kuliner di Songkhla tidak jauh berbeda dengan selera kuliner masyarakat Indonesia, yakni perpaduan rasa pedas, manis, dan asam. Tidak mengherankan jika makanan ringan dari Indonesia juga mudah ditemui di toko-toko di selatan Thailand.

B. Landasan Hukum Berdirinya Konsulat RI Songkhla

Berdirinya KRI Songkhla sebagai kantor perwakilan kedua Indonesia di Thailand tentu memiliki dasar hukum yang jelas. Rujukan hukum yang digunakan adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1995, yang diterbitkan pada 05 Juni 1995.

Indonesia merasa perlu untuk membuka lembaga konsuler dengan mendirikan Konsulat RI di Songkhla, selatan Thailand.¹ Berikut ini Keppres No. 36 Tahun 1995 yang menjadi dasar hukum pendirian Konsulat RI di Songkhla;



Gambar 1. Keputusan Presiden Tentang Berdirinya Konsulat RI Songkhla

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 1995, Keppres, Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Songkhla, selatan Thailand, Pasal 1 Ayat 1

Dengan adanya Konsulat RI di Songkhla, maka Indonesia dapat memberikan pelayanan konsuler, baik untuk warga negara Indonesia atau warga negara Thailand, dalam hal perdagangan, pendidikan, dan sosial budaya.

Sebagai sebuah Perwakilan Konsuler, KRI Songkhla berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang berada di Bangkok.² Sebagaimana pernyataan itu tertuang dalam halaman dua Keppres No.36 Tahun 1995;



Gambar 2. Halaman 2 Keppres No.36 Tahun 1995 tentang Posisi Konsulat RI Songkhla

Lebih lanjut lagi, dalam Keppres tersebut juga dijelaskan wilayah mana saja yang masuk dalam wilayah kerja KRI Songkhla. Wilayah selatan Thailand yang terdiri dari 14 provinsi merupakan wilayah kerja KRI Songkhla, yaitu Chumphon, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang Nga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Satun, Songkhla, Surat Thani, Trang, dan Yala.

Formasi *home staff* atau formasi kepegawaian KRI di Songkhla, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu. Dalam Keppres No. 36 Tahun 1995 juga menyinggung tentang sumber dana pembiayaan kebutuhan KRI Songkhla, di mana sumber dana pembiayaan dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri seperti yang terlihat pada gambar berikut;

Pasal 3

Formasi kepegawaian Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Gambar 3. Halaman 2 Keppres No.36 Tahun 1995 tentang Formasi Kepegawaian dan Biaya Kebutuhan Konsulat RI Songkhla

² Ibid. Keppres No.36 Tahun 1995, Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Songkhla, selatan Thailand, Pasal 1 Ayat 2.

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, selatan Thailand ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.³ Pernyataan ini seperti yang terlihat pada gambar berikut;

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Gambar 4. Halaman 2, Keppres No.36 Tahun 1995 Pasal 5 tentang Perumusan Fungsi, Jenjang, dan Susunan Organisasi

Dalam perkembangannya, pengorganisasian dan tata kerja KRI Songkhla yang didasari Keppres No.36 Tahun 1995 mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, serta Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Sebagai catatan, Kepmenlu tahun 2004 tersebut telah berulang kali diperbaharui dan terakhir kali dengan Peraturan Menlu No.16 Tahun 2022.

C. Pembukaan Konsulat RI Songkhla

Persiapan awal pembukaan KRI Songkhla melibatkan tiga orang Tim Pendahuluan Pembukaan KRI Songkhla yang dikirim oleh Departemen Luar Negeri yaitu Bapak Suhartono Ronggodirdjo (Kabag Mutasi II Biro Kepegawaian), Bapak Warsita Eka (Kabag Perbendaharaan, Biro Keuangan) dan Bapak H. Djoko Mursanto (Kasubbag di Biro Keuangan sekaligus calon Bendahara KRI Songkhla).

Pada Minggu, 02 Februari 1997, Tim Pendahuluan didampingi Bapak Budiman Saragih, *local staff* KBRI Bangkok, tiba pertama kali di Songkhla untuk melakukan persiapan yang diperlukan untuk pembukaan KRI Songkhla. Hasil utama kerja Tim Pendahuluan adalah menyampaikan usulan opsi gedung kantor dan wisma kepala perwakilan pada 01 Maret 1997.

³ Ibid. Keppres No.36 Tahun 1995, Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Songkhla, selatan Thailand, Pasal 5

Untuk gedung kantor, Tim Pendahuluan memberikan dua pilihan, sementara untuk wisma kepala perwakilan, Tim Pendahuluan belum menemukan rumah yang dinilai yang sesuai.

Pada 05 Maret 1997, Departemen Luar Negeri menyetujui opsi kedua yaitu rumah di Jalan Sadao Nomor 19, Songkhla untuk menjadi gedung kantor KRI Songkhla. Gedung kantor yang akan disewa adalah milik keluarga Sukorntatarm. Atas arahan Deplu, Dubes RI di Bangkok menugaskan Bapak Ramli Kurtianto untuk menandatangani kontrak sewa gedung kantor KRI Songkhla. Penandatanganan kontrak yang pertama kali dilakukan pada Rabu, 26 Maret 1997.

Bersamaan dengan proses sewa gedung kantor, persiapan pembukaan juga berjalan pesat. Dubes RI di Bangkok mengeluarkan Surat Keputusan tentang Panitia Pembukaan Konsulat RI di Songkhla tertanggal 19 Maret 1997. SK Panitia Pembukaan KRI Songkhla melibatkan staf dari KBRI Bangkok serta staf dari Departemen Luar Negeri yang akan ditempatkan sebagai *home staff* di KRI Songkhla.

Home staff dari KBRI Bangkok yang ditugaskan sebagai Panitia Pembukaan KRI Songkhla adalah Bapak Hardikun Supandar, Bapak Ramli Kurtianto, Bapak Gudadi Bambang Sasongko, Bapak Elmar Iwan Lubis, Bapak A. Ibnu Prispermana W., Kol. Djoko Surjanto dan Kol. R. Diby Soempeno. Sementara untuk *local staff* dari KBRI Bangkok yang juga ikut bertugas untuk pembukaan KRI Songkhla adalah Bapak Budiman Saragih, Bapak Chesan Wangka, Ibu Nawal Hasamoh dan Bapak Kamron Naradejbhusit.

Terdapat pula sejumlah calon *home staff* dari KRI Songkhla yang masuk dalam Panitia Pembukaan KRI Songkhla, yaitu Bapak Masdur Kasdana dan Bapak H. Djoko Mursanto. Meski tidak masuk dalam SK Dubes RI di Bangkok tentang Panitia Pembukaan KRI Songkhla, sejumlah calon *home staff* dan *local staff* KRI Songkhla dari Jakarta sudah tiba untuk ikut dalam persiapan pembukaan. *Home staff* yang tiba di awal antara lain Bapak Irmawan Emir Wisnandar, Bapak Muldjoredjo, Bapak Tadjuddin, dan Bapak Katim Sanim. Sedangkan *local staff* pertama dari Indonesia yang bergabung adalah Ibu Ratna Kurniawati.

Mereka semua, baik *home staff* maupun *local staff*, bertanggung jawab langsung dalam mengurus persiapan pembukaan KRI Songkhla. Untuk tahap awal, mereka menyewa sebuah rumah di Jalan Saiburi *soi* 13 (*soi* dalam bahasa Thailand berarti gang) yang difungsikan sebagai kantor sementara selama masa persiapan peresmian.

Untuk akomodasi, para staf tersebut memilih tinggal sementara di Hotel Pavilion yang terletak di Jalan Platha. Hotel Pavilion ini kemudian juga dipilih sebagai lokasi peresmian KRI Songkhla.

Tidak sampai dua minggu setelah SK Dubes RI Bangkok tentang Panitia Pembukaan KRI Songkhla, akhirnya KRI Songkhla diresmikan pada 28 Maret 1997. Peresmian dilakukan oleh Duta Besar Indonesia untuk Thailand saat itu, Bapak Isbandi Gondo Suwignyo, yang menjabat sebagai Duta Besar RI di Bangkok pada periode 1996—2000. Pendirian KRI Songkhla sejatinya bukan proses yang singkat. Apabila dihitung sejak adanya Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1995, dibutuhkan sekitar masa dua tahun hingga KRI Songkhla dapat membuka pintu pertama kali untuk beroperasi.



Gambar 5. KRI Songkhla pertama kali membuka pintu, 28 Maret 1997

Momen peresmian yang berlangsung di Hotel Pavilion ini masih tersimpan dengan baik dalam dokumentasi berupa album foto. Foto-foto tersebut menjadi saksi sejarah dan jendela untuk mengenang kembali peristiwa penting berdirinya kantor perwakilan kedua Indonesia di Thailand, yaitu KRI Songkhla.

Foto Peresmian Konsulat RI Songkhla di Hotel Pavilion Tahun 1997



Gambar 6. Duta Besar Indonesia Berjabat Tangan dengan Tamu Undangan di Hotel Pavilion



Gambar 7. Duta Besar Indonesia Bersama para Staf Pertama Konsulat RI Songkhla di Hotel Pavilion



Gambar 8. Pentas Tari Sebagai Acara Peresmian dan Pembukaan Kantor Konsulat RI Songkhla



Gambar 9. Duta Besar Indonesia Bersama Sejumlah Tamu Undangan

Setelah peresmian KRI Songkhla, para *home staff* dan *local staff* KRI Songkhla kemudian memulai proses pindah kantor. Rumah di Jalan Saiburi soi 13 ini yang dijadikan "kantor sementara" segera dirasa sudah tidak memadai untuk dipergunakan sebagai tempat bekerja.

Sementara itu, kepala perwakilan yang pertama, yaitu Bapak Alexander Daniel R.A Pareang.⁴ dilantik oleh Menteri Luar Negeri pada 11 Juli 1997. Setelah pelantikan, Pak Pareang tiba di Songkhla dan tinggal sementara di Hotel Pavilion karena pada saat itu wisma untuk kepala perwakilan belum siap tersedia.

Segera setelah kedatangan Pak Pareang selaku kepala perwakilan yang pertama, KRI Songkhla melakukan langkah operasional selanjutnya yaitu mencari wisma dan pegawai.

Di tahap awal mencari pegawai, KRI Songkhla mendapatkan bantuan dari keluarga Sukorntatarm, pemilik gedung kantor. Ternyata keluarga Sukorntatarm juga memiliki perusahaan perikanan yang bernama "Saltwater". Melalui Bapak Kosin Sukorntatarm dan perusahaan Saltwater, KRI Songkhla mendapat tenaga Honorer petugas kebersihan, taman dan supir yang masih bekerja hingga saat ini, seperti Bapak Ekachai Noochaikaew, Bapak Chamnan Wangnanont, dan Bapak Santi Sangmanee.

Setelah peresmian, Ibu Nawal Hasamoh dan Bapak Chesan Wangka kemudian pindah kerja dari KBRI Bangkok ke KRI Songkhla. Dua beliau memutuskan pindah kerja ke KRI Songkhla karena kebetulan kampung halaman mereka berada di selatan Thailand dimana Pak Chesan berasal dari Songkhla dan Ibu Nawal berasal dari Yala.

⁴ Konsulat Republik Indonesia Di Songkhla, Kerajaan Thailand, *Hubungan Bilateral, Kerja Sama Bilateral*, Dikutip dari, https://kemlu.go.id/songkhla/id/pages/hubungan_bilateral/1875/etc-menu (Diakses Juni 2024)

Ibu Nawal dan Pak Chesan dapat disebut sebagai pegawai pertama KRI Songkhla. Sebutan sebagai pegawai pertama ternyata dapat dibedakan secara lebih khusus lagi, seperti Kepala Perwakilan pertama adalah Bapak Alexander Pareang, *home staff* pertama tiba adalah Bapak Djoko Mursanto, *local staff* dari Indonesia yang pertama tiba adalah Ibu Ratna Kurniawati, *local staff* yang pertama direkrut di Songkhla adalah Ibu Pranee Saengnad yang sebelumnya bekerja di Hotel Pavilion.

BAB II

PERJALANAN PERTAMA KAMI

Sebagai sebuah kantor perwakilan, usia KRI Songkhla masih tergolong muda, yakni 28 tahun. Meskipun demikian, dalam kurun waktu tersebut, KRI Songkhla telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berbagai perubahan pun terjadi seiring berjalannya waktu, baik dari prioritas sasaran, bentuk layanan, maupun jangkauan kegiatan.

Perjalanan KRI Songkhla selama hampir tiga dekade tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Penelusuran ini membawa kita pada masa-masa awal berdirinya KRI Songkhla. Masa ini menjadi sebuah fase yang penuh tantangan, dinamika, dan dedikasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam membangun fondasi awal kantor perwakilan Indonesia di wilayah selatan Thailand ini.

Bab ini akan menceritakan mengenai sejarah dan staf Perwakilan RI di Songkhla. Sejarah tersebut terdiri atas sejarah kantor KRI Songkhla dan juga sejarah Wisma Indonesia di Songkhla. Mengenai staf, akan dijabarkan mengenai kisah kepala perwakilan dari masa ke masa dan juga formasi *home staff*. Mari kita simak bersama.

A. Sejarah Kantor KRI Songkhla

Hotel Pavilion, yang berjarak hanya beberapa ratus meter dari gedung yang kini menjadi kantor KRI Songkhla, menyimpan kenangan khusus dari masa awal berdirinya KRI Songkhla. Sayangnya, hotel ini telah berhenti beroperasi sejak tahun 2024. Selain menjadi tempat peresmian KRI Songkhla, Hotel Pavilion juga menjadi rumah sementara bagi para staf yang baru tiba dari Indonesia.

Empat orang pegawai Hotel Pavilion kemudian direkrut untuk bekerja di KRI Songkhla, yaitu Ibu Janya Reakjamnong, Ibu Sroi Wisetsoros, Ibu Arthitaya Dammanee, dan Ibu Pranee Saengnad. Saat ini, hanya Ibu Janya yang sudah tidak lagi bertugas, yaitu sejak tahun 2022.

Gambar di samping menampilkan Hotel Pavilion pada tahun 2024, tepat setelah hotel ini berhenti beroperasi. Pada masanya, Hotel Pavilion merupakan salah satu hotel yang representatif di Kota Songkhla. Bagian pintu masuknya yang



Gambar 10. Hotel Pavilion Tempat Peresmian KRI Songkhla. Foto diambil tahun 2024

dihiasi ornamen tradisional khas Songkhla menambah daya tarik tersendiri bagi para tamu dan pengunjung.

Pada masa awal pendirian KRI Songkhla, pencarian gedung kantor resmi akhirnya mengerucut pada sebuah bangunan yang sebelumnya merupakan rumah tinggal. Bangunan rumah pribadi ini beralamat di Jalan Sadao nomor 19, Bo Yang, Songkhla, Thailand. Rumah tersebut terletak di jalan yang sama dan berdekatan dengan rumah dinas Gubernur Songkhla serta Konsulat Jenderal Cina.

Dengan persetujuan dari Departemen Luar Negeri, rumah milik keluarga Sukornatarm kemudian disewa untuk dijadikan kantor KRI Songkhla. Skema sewa diberlakukan dalam jangka sepuluh tahunan, dan masa sewa terakhir tercatat berlaku hingga tahun 2027.



Gambar 11. Tampak depan Gedung kantor KRI Songkhla 1997

Setelah bangunan kantor ditetapkan, persiapan perlengkapan mulai dilakukan secara bertahap untuk menunjang fungsi sebagai kantor perwakilan. Pada masa itu, tidak semua kebutuhan dapat diperoleh di Songkhla atau bahkan di Thailand. Banyak barang seni dan budaya yang harus didatangkan langsung dari Indonesia, seperti gamelan, patung, dan ukiran.

Upaya mendatangkan barang kesenian dan kebudayaan tersebut pada awal pendirian KRI Songkhla, ternyata memberikan manfaat yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Sebagai contoh, gamelan yang terus dipakai sampai sekarang sebagai alat promosi budaya. Unggahan di kanal YouTube KRI Songkhla pada tahun 2022 memperlihatkan pelatihan gamelan sekaligus wadah belajar bahasa Indonesia kepada pelajar Thailand.

Seiring waktu, perlahan namun pasti, penampilan kantor KRI Songkhla telah mengalami penataan yang cukup signifikan mengikuti perkembangan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sebuah kantor konsulat. Hal ini tergambar jelas pada gambar berikut:



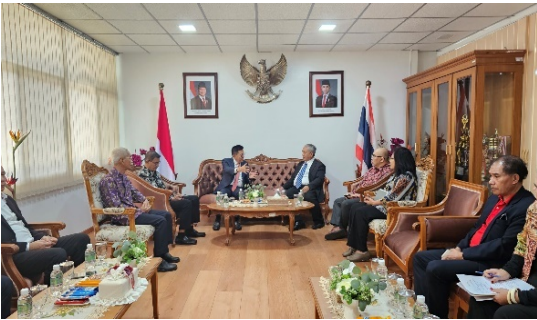
Gambar 12. Tampak Depan KRI Songkhla Tahun 2024

Dari gambar tersebut, terlihat lokasi dan bentuk bangunan KRI Songkhla yang berdiri di atas lahan dengan halaman yang luas dan tertata rapi. Dari segi arsitektur, bangunan kantor ini termasuk dalam tipe modern minimalis. Lokasinya pun sangat strategis, yakni hanya enam bangunan dari rumah dinas Gubernur Songkhla, serta dekat dengan kantor Gubernur, Konsulat Jenderal Cina dan Malaysia, Taman Kota Songkhla, Stadion Songkhla, serta berbagai landmark lainnya. Selain itu, kawasan kantor KRI Songkhla juga termasuk dalam area wisata Songkhla Old Town.

Walaupun bangunan kantor telah mengalami penataan dan pemeliharaan yang cukup baik, hingga kini status gedung KRI Songkhla ialah sewa. Pemerintah Indonesia sejatinya memiliki niat untuk membeli gedung tersebut, namun rencana itu belum dapat terwujud. Hal ini disebabkan oleh peraturan di Thailand yang membatasi kepemilikan properti bagi perwakilan negara asing, yaitu maksimal 15 *rai* atau sekitar 24.000 m².



Sementara pada saat ini, Indonesia telah memiliki dua kantor perwakilan di Thailand: KBRI Bangkok dan juga KRI Songkhla. Luas tanah milik Indonesia di Bangkok telah mencapai 14 *rai*, sementara Wisma Indonesia di Songkhla mencakup 0,625 *rai*. Adapun kantor konsulat di Songkhla saat ini berdiri di atas lahan seluas dua *rai*.



Gambar 13. Lobby Konsulat RI Songkhla tahun 1997 (atas) dan tahun 2025 (bawah)

Dengan total akumulasi yang sudah dijelaskan tersebut, luas properti milik Indonesia telah melebihi batas maksimal yang diizinkan oleh Pemerintah Thailand. Oleh karena itu, untuk dapat membeli gedung kantor KRI Songkhla, Indonesia perlu memperoleh persetujuan khusus dari Kabinet Thailand. Namun, hal tersebut masih pada sebuah proses yang hingga kini masih terus diupayakan.

Perjuangan untuk mendapatkan hak kepemilikan ini sangatlah penting. Jika status kantor berubah dari sewa menjadi milik sendiri, maka manfaat yang dirasa akan lebih signifikan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran. Pengadministrasian biaya renovasi dan pemeliharaan akan menjadi lebih jelas dan terpisah, serta memungkinkan kantor memperoleh fasilitas pembebasan pajak atas properti yang digunakan untuk misi negara asing.



Gambar 14. Upacara Bendera di Halaman Kantor Konsulat RI tahun 1997 (atas) dan tahun 2024 (bawah)

B. Sejarah Wisma Indonesia di Songkhla

Wisma Indonesia di Songkhla merupakan fasilitas rumah dinas yang disediakan untuk Kepala Perwakilan KRI Songkhla. Properti ini diperoleh pada masa kepemimpinan Bapak Alexander Pareang, Kepala Perwakilan pertama yang menjabat pada tahun 1997 hingga 2000.

Pencarian rumah untuk dijadikan Wisma Indonesia di Songkhla memiliki cerita tersendiri yang menjelaskan mengapa lokasinya berada sekitar 8,5 kilometer dari kantor KRI Songkhla (dirasa cukup jauh). Sebagai perbandingan, rumah Konsul Jenderal Malaysia berada dalam kompleks kantor mereka, sedangkan rumah Konsul Jenderal Cina terletak tepat di sebelah kantor mereka.

Kisahny adalah, pada waktu itu salah satu kriteria utama dalam memilih rumah adalah keberadaan kolam renang. Kriteria ini cukup sulit dipenuhi karena terbatasnya pilihan properti yang sesuai. Namun akhirnya, rumah yang memenuhi syarat tersebut berhasil ditemukan. Pada masanya, Wisma Indonesia mungkin menjadi satu-satunya rumah di Kota Songkhla yang memiliki kolam renang pribadi.

Alamat Wisma Indonesia di Songkhla adalah di 99/92 Jalan Kancanawanit *soi* 41, Songkhla. Luas tanah Wisma Indonesia di Songkhla ini adalah 1.000 m² atau sekitar 0,625 *rai*. Halaman depan dengan gerbang masuk terletak di *soi* 41, sementara kolam renang di bagian belakang menghadap ke *soi* 43.

Namun pada tahun 2013, kolam renang Wisma ini mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon. Karena biaya perbaikan yang sangat tinggi dan kolam tersebut sudah lama tidak digunakan, maka akhirnya kolam renang tersebut diputuskan untuk ditutup. Area bekas kolam kemudian diubah menjadi taman rumput.

Penutupan kolam renang ini turut mempengaruhi penataan ruang di Wisma Indonesia Songkhla. Sampai pada tahun 2016, tembok belakang yang menghadap *soi* 43 yang sebelumnya tertutup rapat, akhirnya dibuka dan dijadikan pintu keluar-masuk tambahan. Sejak saat itu, kendaraan dapat masuk melalui *soi* 41 dan keluar melalui *soi* 43, atau sebaliknya.



Gambar 15. Kolam Renang di Wisma Indonesia di Songkhla tahun 1999 (atas) dan tahun 2024 (bawah)

Keberadaan dua gerbang ini (terletak pada dua jalan berbeda, yaitu *soi* 41 dan *soi* 43) kemudian mengubah tata ruang Wisma Indonesia Songkhla secara signifikan. Pada tahun 2023, halaman belakang yang sebelumnya menghadap *soi* 43 ditukar fungsi sebagai halaman depan. Gerbang utama dipindah dari *soi* 41 ke *soi* 43, termasuk ruang jaga keamanan yang juga berpindah ke sisi yang baru. Meskipun demikian, alamat resmi Wisma Indonesia masih mencantumkan *soi* 41 sebagai halaman muka.

Sebagai catatan, pada saat pertama kali disewa pada 01 Agustus 1997, Wisma Indonesia di Songkhla beralamat di *soi* 6. Seiring pembangunan di Songkhla, pemerintah setempat membuka banyak *soi* baru di Jalan Kancanawanit. *Soi* 6 pun berubah, dan saat ini sudah menjadi *soi* 41.



Gambar 16. Halaman depan Wisma Indonesia di Songkhla tahun 1997 (atas) dan 2024 (bawah)



Gambar 17. Halaman Belakang Wisma Indonesia di Songkhla tahun 1998 (atas) dan tahun 2025 (bawah)



Gambar 18. Ruang Tamu Wisma Indonesia di Songkhla tahun 1997 (atas) dan tahun 2025 (bawah)



Gambar 19. Kegiatan Afternoon Tea di Wisma Indonesia di Songkhla tahun 2023

Wisma Indonesia diperoleh melalui skema sewa-beli. Pada tahun 2008, rumah ini telah lunas dibayar dan menjadi aset milik Pemerintah Indonesia. Namun, sertifikat kepemilikan masih tercatat atas nama pemilik lama. Hal ini berkaitan dengan peraturan Thailand yang membatasi kepemilikan properti oleh negara asing sebesar maksimum 15 *rai* atau 24.000 m² (seperti telah diuraikan sebelumnya, Indonesia telah memiliki properti di Thailand dengan total luas yang melampaui batas tersebut: KBRI Bangkok seluas 14 *rai*, Wisma Indonesia di Songkhla seluas 0,625 *rai*, dan kantor KRI Songkhla seluas dua *rai*).

Karena total luas ini telah melebihi ketentuan yang diizinkan itulah, maka untuk mencantumkan nama Indonesia secara resmi di sertifikat kepemilikan dibutuhkan persetujuan lebih lanjut dari Kabinet Thailand. Persetujuan tersebut harus dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Hingga kini, proses ini masih terus diperjuangkan oleh pihak Indonesia dan diharapkan dapat segera terealisasi, utamanya untuk Wisma Indonesia yang telah dibeli lunas.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, saat ini Wisma Indonesia di Songkhla berada di kawasan permukiman yang cukup padat dengan lokasi sedikit di dalam gang dan memiliki keterbatasan area parkir. Namun demikian, lokasi ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain aman dan strategis. Dapat dikatakan aman karena tidak berada di zona rawan banjir, serta dikatakan strategis karena dekat dengan sejumlah universitas ternama dan juga sejumlah supermarket.

C. Kepala Perwakilan dari Masa ke Masa

Selama 28 tahun berdiri, KRI Songkhla telah mengalami pergantian kepala perwakilan sebanyak sembilan kali. Setiap kepala perwakilan tentu datang dengan visi dan gagasan tersendiri yang menjadi pijakan dalam menjalankan misi konsuler Indonesia di selatan Thailand.

Menariknya, gagasan atau program kerja yang diinisiasi oleh seorang kepala perwakilan tidak otomatis berhenti ketika terjadi pergantian kepala perwakilan. Program-program tersebut nyatanya dapat dilanjutkan, diperkuat, bahkan dikembangkan lebih jauh oleh penerusnya. Dengan demikian, estafet kepemimpinan di KRI Songkhla tidak hanya mencerminkan kesinambungan, tetapi juga pembaruan yang berkelanjutan.

Setiap kepala perwakilan memiliki jejak dan cerita unik yang layak untuk dibagikan kepada publik sebagai bagian dari narasi perjalanan diplomasi Indonesia di wilayah strategis ini. Berikut adalah sembilan tokoh kepala perwakilan yang pernah memimpin KRI Songkhla. Nama-nama ini sekaligus menjadi bagian dari sejarah penguatan hubungan Indonesia dan Thailand di selatan negeri Gajah Putih tersebut.

1. Alexander Daniel R.A Pareang (1997—2000)



Bapak Alexander Daniel R.A. Pareang, atau yang akrab disapa Pak Pareang, merupakan Kepala Perwakilan pertama KRI Songkhla. Dalam masa kepemimpinannya selama tiga tahun, beliau dikenang sebagai sosok yang berperan penting dalam meletakkan fondasi awal keberadaan KRI Songkhla, termasuk dalam menentukan kantor dan Wisma Indonesia seperti yang kita kenal saat ini.

Salah satu keputusan yang menjadi ciri khas kepemimpinannya adalah keinginannya agar rumah yang akan dijadikan Wisma Indonesia di Songkhla harus memiliki kolam renang. Kriteria ini menjadi pembeda sekaligus simbol dari standar yang ingin dibangun sejak awal.

Pak Pareang juga dikenal sebagai pelopor yang memperkenalkan keberadaan KRI Songkhla kepada berbagai pemangku kepentingan di wilayah selatan Thailand. Di masa jabatan beliau, Indonesian Corner pertama dibuka di Thaksin University pada tahun 2000. Sayangnya, Indonesian Corner tersebut sudah ditutup dan dipindah ke Prince of Songkla University Kampus Pattani pada tahun 2006.

Selain itu, ia dikenang sebagai pemimpin yang berhasil membangun budaya kerja disiplin. Beliau menanamkan kebiasaan kerja yang tertib, seperti; datang tepat waktu, pulang kerja tepat waktu, serta selalu berpakaian formal lengkap dengan jas dan dasi.

Satu hal yang cukup unik dan masih dikenang hingga kini adalah kebijakan beliau yang mengharuskan seluruh staf untuk bisa berdansa. Hal ini menjadi warna tersendiri dalam kepemimpinannya dan menjadi cerita menarik dalam sejarah awal KRI Songkhla.

2. Karso Popon (2000—2002)



Kepala perwakilan KRI Songkhla yang kedua adalah Bapak Karso Popon. Beliau menjabat pada tahun 2000 hingga 2002. Sosok yang akrab disapa Pak Popon ini dikenal sebagai pemimpin yang aktif memberikan tugas-tugas baru kepada para staf. Di bawah kepemimpinannya, nyaris selalu ada hal baru yang dikerjakan setiap harinya. Masa beliau menjabat mencerminkan dinamika dan ritme kerja yang tinggi di KRI Songkhla.

Pada masa Pak Popon pula, status kontrak Wisma Indonesia di Songkhla mengalami perubahan penting. Jika sebelumnya sejak tahun 1997 bersifat sewa murni, maka pada tahun 2001 berubah menjadi skema sewa beli. Dalam mekanisme ini, pembayaran sewa dianggap sebagai cicilan pembelian. Wisma Indonesia di Songkhla akhirnya lunas pada tahun 2008.

Sebagai kepala perwakilan yang kedua, beliau memiliki kisah yang cukup panjang dan menyentuh. Pada paruh awal masa penugasannya, beliau mengalami serangan penyakit *stroke* dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisinya kemudian mengharuskan beliau diterbangkan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan perawatan. Peristiwa ini turut menjadi perhatian dan pertimbangan penting dalam mendorong lahirnya aturan yang lebih komprehensif mengenai penanganan diplomat yang mengalami kondisi medis serius saat bertugas di luar negeri.

3. Sudhi Harmoyo (2003—2004)

Kepala perwakilan ketiga adalah Bapak Sudhi Harmoyo, yang menjabat dari tahun 2003 hingga 2004. Masa jabatannya memang relatif singkat jika dibandingkan dengan kepala perwakilan sebelumnya. Namun demikian, Pak Sudhi berhasil meninggalkan kesan yang positif dan dikenang baik oleh para staf KRI Songkhla.



Beliau dikenal sebagai pribadi yang fleksibel dalam pelaksanaan tugas, serta mampu menciptakan suasana kerja yang terbuka dan adaptif. Meskipun waktu pengabdianya tidak panjang, kontribusi beliau tetap signifikan.

Salah satu ciri khas masa kepemimpinannya adalah aktifnya keterlibatan KRI Songkhla dalam memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama IMT-GT di wilayah selatan Thailand. Di bawah kepemimpinan beliau pula, pada tahun 2004 terbentuk Indonesian Corner di Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. Dibentuknya Indonesian Corner kedua tersebut tentunya sebuah langkah konkret dalam mempererat hubungan sosial-budaya antara kedua negara.

4. Satria Djambek (2005—2006)



Kepala perwakilan keempat adalah Bapak Satria Djambek, yang menjabat pada periode 2005 hingga 2006. Masa kepemimpinan beliau juga terbilang singkat, namun tetap meninggalkan kesan tersendiri bagi jajaran KRI Songkhla.

Pak Djambek dikenal sebagai sosok yang gemar berolahraga. Semangatnya tersebut turut ia tularkan kepada para staf. Tidak mengherankan apabila dalam masa kepemimpinannya, kegiatan olahraga bersama menjadi bagian dari rutinitas di lingkungan KRI Songkhla.

Salah satu program kerja beliau yang paling dikenang adalah pelaksanaan pelatihan produksi beras di Provinsi Phatthalung. Program ini dilaksanakan dalam empat gelombang dan melibatkan petani Indonesia dari berbagai provinsi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kerja sama teknis yang mempertemukan pengalaman lapangan di Thailand dengan kebutuhan pengembangan pertanian di Indonesia.

Selain itu, pada masa beliau juga terbentuk Indonesian Corner di Prince of Songkla University, Kampus Pattani (Galyani Vadhana Cultural Institute) pada tahun 2006. Indonesian Corner ini merupakan pindahan dari Indonesian Corner yang sebelumnya berada di Thaksin University dan dibuka pada tahun 2000. Inisiatif memindahkan Indonesian Corner tersebut memperluas kerja sama pendidikan dan sosial-budaya antara KRI Songkhla dengan berbagai universitas di Selatan Thailand.

5. Affan Hasibuan (2007—2008)

Kepala Perwakilan yang kelima adalah Bapak Affan Hasibuan, yang menjabat selama satu tahun, yaitu dari tahun 2007 hingga 2008. Pada masa jabatan beliau, proses sewa beli Wisma Indonesia selesai pada tahun 2008, meskipun sertifikatnya hingga saat ini masih terdaftar atas nama pemilik lama. Selama masa jabatannya, Bapak Affan memulai gagasan serta upaya untuk membentuk asosiasi alumni Indonesia bagi warga Thailand yang pernah kuliah di Indonesia. Selain itu, beliau juga melanjutkan sejumlah program yang telah dimulai oleh Pak Djambek, seperti pelatihan petani.



6. Heru Wicaksono (2010—2013)



Kepala Perwakilan Konsulat RI Songkhla yang keenam adalah Bapak Heru Wicaksono, atau yang akrab disapa Pak Heru.

Upaya untuk membentuk asosiasi alumni Indonesia di Thailand, yang telah dimulai pada era kepala perwakilan sebelumnya akhirnya terwujud pada masa jabatan Pak Heru. Asosiasi tersebut diberi nama Persatuan Alumni Indonesia - Thailand (PERSAIT). PERSAIT dibentuk dengan tujuan untuk menjadi wadah bagi mereka yang pernah kuliah di Indonesia agar dapat bersilaturahmi serta berkontribusi positif bagi negara, masyarakat, dan hubungan antara Indonesia dan Thailand.

Selain PERSAIT, pada masa jabatan Pak Heru juga dibentuk Persatuan Anak Buah Kapal Indonesia (PABKI) di Phuket pada tahun 2010. Masa jabatan beliau juga ditandai dengan adanya penerbangan langsung Hat Yai-Medan oleh maskapai penerbangan Thai Lion Air.

7. Tri Yogo Jatmiko (2015—2018)

Kepala Perwakilan yang ketujuh adalah Bapak Tri Yogo Jatmiko. Beliau menjabat dari tahun 2015 hingga 2018. Selama masa jabatannya, Pak Yogo tercatat berupaya membenahi penyaluran guru Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari Indonesia ke selatan Thailand.

Selain itu, tercatat pula upaya Pak Yogo dalam pengaturan pelaksanaan KKN mahasiswa Indonesia di wilayah tersebut. Pembenahan ini dilakukan dengan berkoordinasi erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa jabatan Pak Yogo, tercatat dilakukan pembukaan Indonesian Corner yang ketiga dan keempat. Indonesian Corner ketiga berada di Prince of Songkla University Kampus Phuket pada tahun 2015, dan Indonesian Corner keempat berlokasi di Yala Rajabhat University pada tahun 2018.



8. Fachry Sulaiman (2018—2021)



Bapak Fachry Sulaiman ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan kedelapan KRI Songkhla, tepatnya pada tahun 2018 hingga 2021. Sebagian besar masa penugasan Pak Fachry ditandai dengan penanganan wabah Covid-19.

Seperti di banyak tempat lainnya, wabah Covid-19 juga menyebabkan pembatasan pergerakan penduduk di selatan Thailand. Namun, di tengah pembatasan tersebut, KRI Songkhla justru semakin aktif mengunjungi seluruh WNI yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan pokok di negara orang.

Atas kepeduliannya terhadap WNI pada masa wabah Covid-19, pada tahun 2021, Pak Fachry menerima penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan Award dari Menteri Luar Negeri. Selain itu, pada masa jabatan Pak Fachry juga diresmikan Indonesian Corner yang kelima dan bertempat di Attarkiah Islamiah Institute, Provinsi Narathiwat pada tahun 2020.

9. Suargana Pringganu (2022—2025)

Kepala Perwakilan Konsulat RI yang kesembilan adalah Bapak Suargana Pringganu, yang menjabat dari tahun 2022 hingga 2025. Masa jabatan Pak Suar (panggilan sapaan akrab Beliau) ditandai dengan terselesaikannya sejumlah masalah.

Dari sisi pendidikan, terselesaikannya masalah akreditasi universitas bagi warga Thailand yang kuliah di Indonesia dan ingin melamar kerja sebagai pegawai pemerintah di Thailand. Di samping itu, turut diadakan inovasi pendidikan, yaitu



dilaksanakannya Indonesia Education Fair yang diikuti oleh hampir 40 perguruan tinggi dari Indonesia dengan antusiasme ratusan pelajar selatan Thailand. Kegiatan tersebut bahkan menghasilkan 14 buah MoU dalam satu acara tersebut.

Masalah lainnya yang terselesaikan adalah nelayan Indonesia yang telah selesai menjalani masa hukuman di selatan Thailand. Kini, mereka dapat langsung dipulangkan melalui bandar udara terdekat tanpa harus melalui proses panjang yang sebelumnya mengharuskan mereka dikirim ke tahanan imigrasi di Bangkok. Selain itu, pada masa jabatan Pak Suar dibuka penerbangan langsung dari Phuket menuju Denpasar dan Medan.

Pak Suar juga melakukan berbagai inovasi dalam membenahan internal, seperti penataan ruangan, akses kantor, dan juga Wisma Indonesia di Songkhla. Beliau juga berhasil memberlakukan sistem *cashless* untuk semua transaksi pengeluaran dan penerimaan. Fokus lain yang tak kalah penting adalah digitalisasi kantor, utamanya revitalisasi media sosial, persuratan yang *paperless*, dan kalender kantor online. Pada Desember 2022, juga diresmikan Indonesian Corner keenam di Walailak University.

D. Sejarah Formasi *Home Staff*

Kinerja KRI Songkhla yang semakin meningkat dan beragam merupakan hasil dari meluasnya hubungan dan kerja sama yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Secara otomatis karena semakin luas kerja sama yang terjalin, semakin banyak pula staf yang dibutuhkan. Perkembangan jumlah staf KRI Songkhla sejak awal berdirinya hingga saat ini mencerminkan pekerjaan yang telah dilakukan serta fokus yang dijalankan oleh kantor ini.

Formasi *home staff* KRI Songkhla pada tahun pertama saat mulai beroperasi adalah sebanyak tujuh orang, yang terdiri atas satu Kepala Perwakilan, dua Pejabat Diplomatik dan Konsuler, satu Pejabat Administrasi, dan tiga Pejabat Dinas Dalam Negeri (PDDN) yang bertugas membantu tugas-tugas bidang Administrasi. Selain tujuh *home staff* tersebut, terdapat pula lima orang *local staff* dan dua tenaga honorer. Total pegawai di awal berdirinya KRI Songkhla berjumlah 14 orang. Pada masa awal ini, terlihat bahwa fokus utama KRI Songkhla adalah penataan administrasi sebagai sebuah kantor yang baru berdiri.

Pada awal tahun 2000-an, jumlah *home staff* menyusut menjadi hanya enam orang. Staf tersebut terdiri atas satu Kepala Perwakilan, tiga Pejabat Diplomatik (Ekonomi, Penerangan Sosial Budaya, serta Protokol dan Konsuler), satu bendahara, dan satu PDDN yang disebut dengan penugasan SP-1010. Perubahan ini terjadi karena Departemen Luar Negeri Indonesia menggabungkan Pejabat Administrasi dan Pejabat Diplomatik Konsuler menjadi pejabat Fungsional Diplomat. Fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Pejabat Administrasi kini dirangkap oleh salah satu Pejabat Diplomatik yang menjabat sebagai Kepala Kanselera. Selain itu, dari tiga formasi PDDN, hanya satu formasi yang dipertahankan.

Seiring perjalanan waktu, kebutuhan untuk membangun sistem informasi dan komunikasi yang efisien dan efektif di KRI Songkhla semakin mendesak. Sejak berdiri, KRI Songkhla belum memiliki *home staff* yang khusus bertanggung jawab untuk membangun teknologi dan sistem informasi yang aman serta handal. Oleh karena itu, pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri RI menempatkan Pejabat Komunikasi pertama kali di KRI Songkhla. Pejabat Komunikasi pertama ini adalah Bapak Efdi Riyanto Kariman, yang menjabat dari tahun 2016 hingga 2019.

Setahun setelah penambahan Pejabat Komunikasi, tepatnya pada paruh kedua tahun 2017, formasi *home staff* KRI Songkhla semakin bertambah dengan penempatan Staf Teknis Imigrasi. Pejabat Staf Teknis Imigrasi pertama adalah Bapak Raden Fadjar Widjanarko, yang menjabat sejak akhir 2017 hingga awal 2021.

Formasi *home staff* kembali bertambah pada tahun 2020. Jumlah tiga orang Pejabat Diplomatik dirasa belum cukup untuk memenuhi tuntutan tugas, terutama terkait pelayanan dan perlindungan WNI di wilayah kerja. Seiring dengan penambahan Staf Teknis Imigrasi, formasi di Fungsi Protokol dan Konsuler juga bertambah satu formasi menjadi dua orang diplomat mulai tahun 2020.

Setelah sekian lama hanya terdiri dari enam *home staff*, dalam lima tahun terakhir formasi *home staff* di KRI Songkhla kini berjumlah sembilan orang. Susunan sembilan orang tersebut terdiri dari satu Kepala Perwakilan, satu Fungsi Ekonomi, satu Fungsi Penerangan Sosial Budaya, dua Fungsi Protokol Konsuler, satu Staf Teknis Imigrasi, satu Petugas Komunikasi, satu Bendahara dan Penata Kerumahtanggaan, serta satu penugasan SK-1111 yang dalam beberapa tahun terakhir diisi oleh seorang arsiparis.

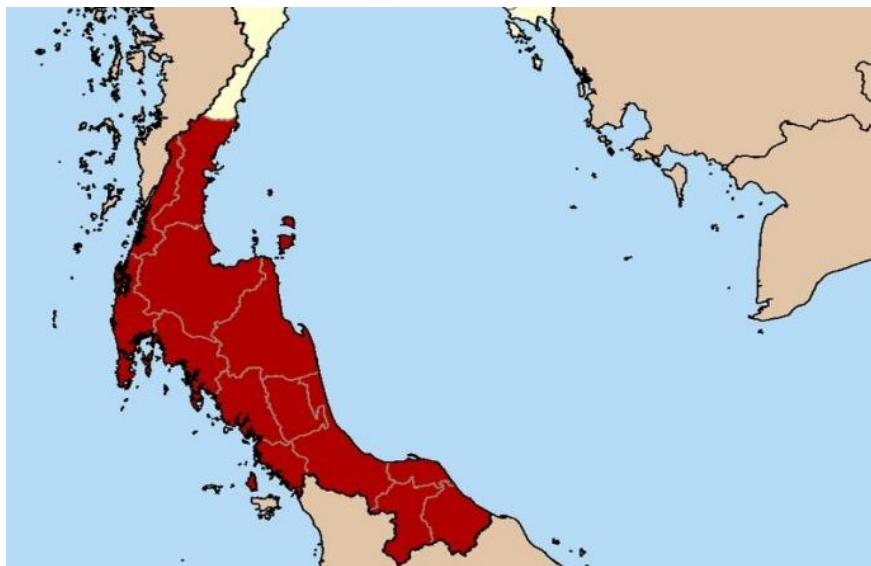
Secara keseluruhan, KRI Songkhla kini adalah kantor yang mempekerjakan 33 orang, baik *home staff*, *local staff*, maupun tenaga honorer. Penambahan jumlah total staf KRI Songkhla dari 14 orang pada awal pendirian kantor menjadi 33 orang pada saat ini, menggambarkan betapa hubungan, kerja sama, dan kepentingan Indonesia di selatan Thailand semakin meluas.

BAB III

WILAYAH KERJA KAMI

Sebagai perwakilan konsuler, sesuai Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, wilayah kerja KRI Songkhla tentunya lebih spesifik, yaitu meliputi 14 provinsi di wilayah selatan Thailand. Untuk pemahaman yang lebih mudah tentang luas negara Thailand dan luas wilayah selatan Thailand, kita dapat melihat gambaran perbandingan dengan Indonesia. Thailand dengan 77 provinsi luasnya sedikit lebih kecil daripada luas 10 provinsi di pulau Sumatera ditambah dengan Provinsi Jawa Barat. Adapun luas 14 provinsi di selatan Thailand (sekitar 70 ribu km²) sedikit lebih kecil daripada luas provinsi Sumatera Utara (sekitar 72 ribu km²).

Pada tahun 2024, jumlah penduduk di 14 provinsi selatan Thailand kurang lebih sama dengan jumlah penduduk Provinsi Lampung, yaitu sekitar 9,4 juta jiwa.



Gambar 20. Wilayah Selatan Thailand

Pada Gambar di atas, area yang berwarna merah adalah wilayah selatan Thailand yang menjadi wilayah kerja KRI Songkhla. Panjang perbatasan selatan Thailand dengan Malaysia sekitar 595 km. Dari 14 provinsi, terdapat empat provinsi yang berbatasan darat dengan Malaysia yaitu Narathiwat, Yala, Songkhla, dan Satun.

Gambar di atas juga menunjukkan bagaimana batas wilayah Thailand dengan Myanmar yang berada di Provinsi Ranong dan Chumphon dengan perkiraan panjang perbatasan darat sekitar 60 km. Di Provinsi Ranong, Thailand dan Myanmar dibatasi dengan sungai yang bernama sungai Kra Buri.

A. Wilayah Kerja Konsulat RI Songkhla

Wilayah kerja KRI Songkhla meliputi 14 provinsi di selatan Thailand yaitu Chumphon, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang Nga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Satun, Songkhla, Surat Thani, Trang, dan Yala.

1. Provinsi Chumphon

Chumphon merupakan provinsi yang terletak paling atas dari wilayah selatan Thailand. Chumphon berada di Teluk Thailand. Luas wilayah provinsi ini sekitar 5.998 km² (setara dengan luas Kabupaten Sambas) dengan jumlah penduduk sekitar 510 ribu jiwa (setara dengan penduduk Kabupaten Labuhanbatu). Provinsi ini memiliki perbatasan dengan negara tetangga Thailand yaitu Myanmar. Chumphon berbagi perbatasan dengan Tanintharyi Region, Myanmar.



Gambar 21. Provinsi Chumphon

Chumphon berada di Tanah Genting Kra, yaitu jembatan darat sempit yang menghubungkan Semenanjung Malaya dengan daratan Thailand. Apabila wacana proyek *Landbridge* atau Kra Canal diwujudkan, maka lokasi geografis Chumphon menjadi strategis. Chumphon akan menjadi pintu jalur baru yang menghubungkan Laut Andaman dan Teluk Thailand lebih singkat tanpa harus menelusuri Selat Malaka.

Nama Chumphon juga dikenal sebagai nama gelar dari Laksamana Abhakara Kiartivongse. Sebagai anak dari Raja Chulalongkorn atau Raja Rama V, Laksamana Abhakara Kiartivongse mendapat gelar Prince of Chumphon. Beliau disebut sebagai Bapak Pendiri Angkatan Laut Kerajaan Thailand.

2. Provinsi Krabi

Krabi adalah provinsi di selatan Thailand yang terletak di Laut Andaman. Provinsi Krabi memiliki luas wilayah sekitar 5.323 km² (sedikit lebih kecil dari Kabupaten Aceh Timur) dengan total penduduk sekitar 485 ribu jiwa (setara dengan penduduk Kabupaten Siak).



Gambar 22. Provinsi Krabi

Ekonomi Krabi memiliki tiga sektor ekonomi yaitu pariwisata, perkebunan (karet dan kelapa sawit), serta perikanan. Krabi yang relatif berdekatan dengan Provinsi Phuket dan Provinsi Phang Nga menjadi tujuan favorit wisatawan yang mencari pantai atau pun *islands hopping*. Sebagai tujuan wisata, Krabi memiliki bandar udara internasional ke Kuala Lumpur, Singapura dan Dubai. Selain itu, terdapat penerbangan musiman ke Eropa.

Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah Buddha yaitu sebanyak 64% dan Islam 35%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah muslim yang signifikan tidak hanya ada di provinsi-provinsi perbatasan selatan.

3. Provinsi Nakhon Si Thammarat

Nakhon Si Thammarat adalah provinsi dengan wilayah terluas yaitu sekitar 9.943 km² (sedikit lebih besar daripada Kabupaten Fakfak) dan populasi yang juga terbesar yaitu sekitar 1,5 juta jiwa (setara dengan penduduk Kabupaten Pematang).

Nama Nakhon Si Thammarat disebut berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Negara Sri Dharma Raja yang artinya Kota Raja Dharma Suci.



Gambar 23. Provinsi Nakhon Si Thammarat

Nakhon Si Thammarat memiliki dua universitas ternama yaitu Walailak University dan Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. Terdapat Indonesian Corner di Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (berdiri tahun 2004) dan di Walailak University (berdiri tahun 2022).

4. Provinsi Narathiwat

Provinsi Narathiwat bersama dengan dua provinsi tetangganya, yaitu Provinsi Yala dan Provinsi Pattani sering disebut *Deep South*. Narathiwat memiliki perbatasan internasional dengan Kelantan, Malaysia. Terdapat dua perlintasan darat dan satu perlintasan air di Narathiwat dengan Malaysia. Perlintasan daratnya adalah; (1) Buke Ta-Bukit Bunga, dan (2) Sungai Kolok-Rantau Panjang. Sementara perlintasan air adalah pelabuhan ferry Tak Bai-Pangkalan Kubor.

Luas wilayah Provinsi Narathiwat berada pada kisaran 4.491 km² (setara dengan luas Kabupaten Aceh Tengah) dengan jumlah penduduk sebanyak 823 ribu jiwa (setara dengan penduduk Kabupaten Buleleng). Sekitar 82% dari penduduknya beragama Islam, dan 17% beragama Buddha



Gambar 24. Provinsi Narathiwat

Nama Narathiwat dipercaya berasal dari kata Melayu yaitu “Menara”. Mayoritas penduduk Narathiwat adalah etnis Melayu. Pada umumnya mereka bilingual, yaitu menggunakan bahasa Thai dan bahasa Melayu dialek Pattani. Bahasa Melayu dialek Pattani mirip dengan bahasa Melayu dialek Kelantan.

Narathiwat juga menjadi rumah bagi Indonesian Corner yang berada di Attarkiah Islamiah Institute. Indonesian Corner di Attarkiah berdiri pada tahun 2020. Attarkiah adalah lembaga pendidikan dasar berbasis agama Islam dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Selain sekolah swasta Islam, Narathiwat juga memiliki banyak pondok pesantren yang disebut dengan “pondok”. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama pendidikan dengan Narathiwat meningkat. Provinsi ini menjadi tujuan kunjungan mahasiswa Indonesia untuk melakukan magang atau kuliah kerja nyata di Narathiwat.

5. Provinsi Pattani

Nama Pattani dipercaya dari bahasa Melayu "Pantai Ini". Provinsi ini merupakan provinsi yang membawa nama kesultanan Melayu Pattani di masa lalu. Wilayah kesultanan Pattani berada di provinsi yang sekarang Pattani, Yala dan Narathiwat. Luas wilayah Provinsi Pattani sekitar 1.977 km² (setara dengan luas Kabupaten Blora) dengan populasi mencapai 740 ribu jiwa (setara dengan penduduk Kabupaten Gunung Kidul).

Pattani memiliki karakteristik jumlah penduduk muslim hingga 87% serta penutur bahasa Melayu dialek Pattani. Terkait ekonomi, sektor perikanan adalah sektor ekonomi andalan di Pattani.

Pattani merupakan salah satu provinsi asal terbanyak mahasiswa Thailand yang belajar di Indonesia, selain Yala dan Narathiwat. Tidak heran kantor Persatuan Alumni Indonesia - Thailand (PERSAIT) berada di Pattani. Terdapat pula Indonesian Corner di Pattani, tepatnya di Prince of Songkla University yang berdiri tahun 2006.



Gambar 25. Provinsi Pattani

6. Provinsi Phang Nga



Gambar 26. Provinsi Phang Nga

Provinsi Phang Nga berada di tepi Laut Andaman. Provinsi ini memiliki museum tsunami mengingat Phang Nga merupakan provinsi di pesisir Laut Andaman yang paling terdampak ketika terjadi tsunami di Aceh pada tahun 2004.

Luas wilayah Phang Nga berada pada kisaran 5.495 km² (serupa dengan luas Kabupaten Muaro Jambi) dengan jumlah penduduk sebanyak 267 ribu jiwa (kurang lebih sama dengan jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara).

Phang Nga termasuk provinsi favorit bagi pelancong ke pesisir Laut Andaman. Wisata ke Phang Nga menawarkan wisata bahari dan berkunjung dari satu pulau ke pulau lain. Phang Nga memiliki sebuah pulau yang bernama Pulau Panji. Penyebutannya dalam bahasa Thai menjadi Koh Panyee. Penduduk Koh Panyee diketahui adalah nelayan dari Jawa. Mereka mulai bermukim di pulau tersebut pada akhir abad ke-18. Hingga kini, Koh Panyee memiliki karakteristik yang unik sehingga banyak dikunjungi oleh pelancong. Salah satu karakteristiknya adalah penduduk Koh Panyee melarang konsumsi alkohol dan daging babi terhadap siapa pun selama berada di Koh Panyee.

7. Provinsi Phatthalung

Phatthalung merupakan provinsi yang tidak terhubung secara langsung dengan laut. Meski demikian, Phatthalung memiliki akses yang luas ke perairan karena letaknya memanjang dari utara ke selatan mengikuti bentuk Danau Songkhla. Pada ujung selatan Danau Songkhla, air danau terhubung dengan air laut di Teluk Thailand.

Luas provinsi ini sekitar 3.861 km² (sedikit lebih kecil daripada luas Kabupaten Lampung Timur) dengan jumlah penduduk sebanyak 521 ribu jiwa

(kurang sedikit dari jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa). Mayoritas penduduk di Phatthalung beragama Buddha, yaitu 88%, diikuti yang beragama Islam 11%.

Terdapat satu kesenian yang sangat mirip antara Indonesia dengan Phatthalung. Kesenian tersebut adalah pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit di Phatthalung disebut Nang Thalung. Nama Phatthalung dipercaya berasal dari nama kuno provinsi ini dalam bahasa Melayu, yaitu Mardelong.

KRI Songkhla pernah mengadakan program pelatihan bagi petani dari berbagai provinsi di Indonesia untuk belajar pertanian di Provinsi Phatthalung.



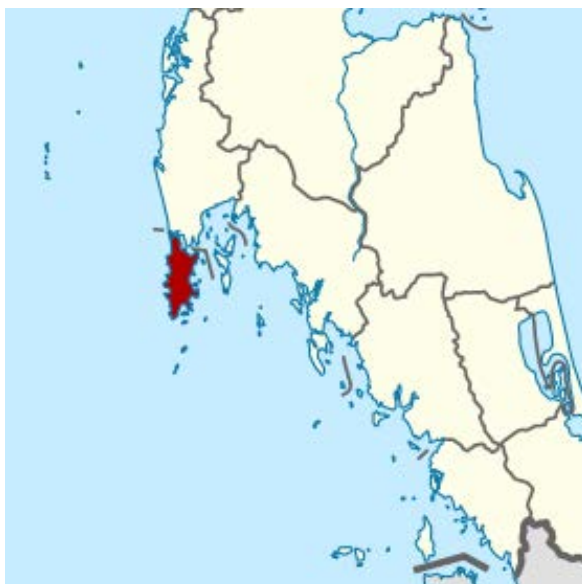
Gambar 27. Provinsi Phatthalung

8. Provinsi Phuket

Provinsi Phuket merupakan provinsi yang terkenal di kalangan turis mancanegara berkat keindahan pantainya, dan merupakan pulau yang terhubung oleh Jembatan Sarasin sepanjang 600 meter ke daratan utama di Provinsi Phang Nga. Luas wilayah Phuket sekitar 576 km² dengan jumlah penduduk 429 ribu jiwa Luas wilayah dan jumlah penduduk Provinsi Phuket kurang lebih sama dengan Kabupaten Kulon Progo.

Bandar Udara Phuket merupakan lapangan terbang ketiga tersibuk di Thailand setelah Suvarnabhumi dan Don Mueang. Pada Agustus 2024, dibuka penerbangan langsung Phuket - Bali, dan diikuti Phuket – Medan pada Juni 2025 . Saat ini penerbangan dari bandar udara Phuket menjadi satu-satunya penerbangan langsung dari selatan Thailand ke Indonesia.

Bandar udara Phuket kerap menjadi tempat pemberhentian darurat bagi pesawat terbang yang mengalami masalah, seperti membawa penumpang yang sakit serius. Beberapa pengalaman yang pernah terjadi adalah jamaah umroh atau pekerja migran Indonesia diturunkan di Phuket dalam perjalanan dari atau ke Timur Tengah. Permasalahan saat perawatan di rumah sakit di Phuket biasanya bertambah karena pada umumnya mereka tidak memiliki asuransi. Kalau pun ada asuransi, nilai tanggungannya sangat minimal.



Gambar 28. Provinsi Phuket

Phuket juga menjadi tempat yang paling sering terjadi penangkapan terhadap nelayan asal Aceh atau Sumatera Utara yang melakukan pengambilan ikan secara tidak sah di perairan Thailand.

Phuket berada di peringkat kedua, setelah Songkhla, dengan jumlah warga negara Indonesia terbanyak di selatan Thailand.

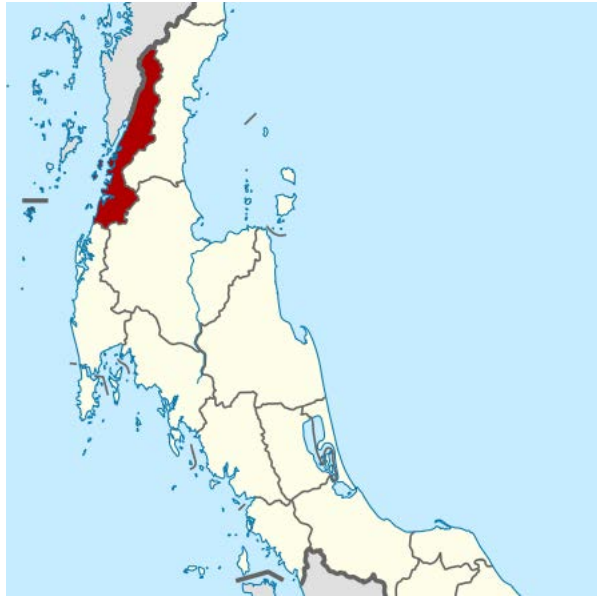
Indonesia memiliki satu Indonesian Corner yang berlokasi di Prince of Songkla University Kampus Phuket yang berdiri pada tahun 2015.

Penduduk Phuket yang beragama Islam sekitar 35%, selebihnya mayoritas beragama Buddha. Muslim di Phuket rata-rata adalah keturunan Melayu. Nama Phuket pun dipercaya berasal dari kata bukit dalam bahasa Melayu. Saat ini penduduk Phuket terdiri dari beragam etnis. Mereka adalah masyarakat yang majemuk dan itu terwujud dengan adanya Museum Peranakan Phuket.

9. Provinsi Ranong

Ranong terkenal sebagai provinsi yang memiliki musim hujan panjang. Rata-rata selama delapan bulan setiap tahunnya⁵.

Provinsi Ranong berada di Tanah Genting Kra. Jarak terkecil Tanah Genting Kra hanya 44 kilometer yang melewati Ranong dan Chumphon. Tidak heran gagasan untuk membuat Kra Canal sudah muncul sejak abad ke-19. Dengan adanya Kra Canal, maka kapal laut dapat mempersingkat waktu pelayaran sekitar tujuh hari tanpa harus menelusuri Selat Malaka. Gagasan membuat Kra Canal masih sebatas wacana. Bahkan saat ini lebih mengarah kepada dibuatnya *Landbridge* antara Ranong dan Chumphon.



Gambar 29. Provinsi Ranong

Luas wilayah Ranong berada pada kisaran 3.298 km² (kurang lebih sama dengan luas Kabupaten Solok Selatan) dengan jumlah populasi sebanyak 194 ribu jiwa (sedikit kurang dari jumlah penduduk Kota Lhokseumawe). Ranong merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit di selatan Thailand.

Ranong memiliki perlintasan perbatasan sungai dengan Kawthaung, Myanmar. Penduduk dapat menggunakan perahu sekitar 30 menit untuk menuju pos perbatasan.

10. Provinsi Satun

Nama dari Provinsi Satun dan nama perumahan Sentul di Bogor, Jawa Barat berasal dari kata yang sama dalam bahasa Melayu, yaitu “*sentul*” yang merupakan nama buah kecap. Kata *sentul* dialih bahasa sesuai dengan cara pengucapan bahasa Thailand menjadi *satun*, atau *setoi* dalam dialek Melayu Utara. Bahkan pengucapan sehari-hari saat ini terdengar seperti menjadi ‘*stun*’.

⁵ Tourismthailand.org, Amazing Thailand, Ranong, <https://www.tourismthailand.org/Destinations/Provinces/Ranong/351> (Tanggal Akses: 14 Juli 2024)



Gambar 30. Provinsi Satun

Provinsi Satun memiliki perbatasan internasional dengan Perlis, Malaysia. Terdapat pos lintas batas yaitu Wang Prachan (Satun) – Wang Kelian (Perlis). Luas wilayah Provinsi Satun berada pada kisaran 3.019 km² dengan jumlah populasi sebanyak 325 ribu jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk Provinsi Satun sedikit lebih kecil daripada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.

Sekitar 78% penduduk Satun beragama Islam. Provinsi ini setiap tahun senantiasa menyelenggarakan Satun Halal Street yang

menampilkan kesenian dan makanan halal. Satun Halal Street rutin mengundang wakil dari Malaysia dan Indonesia (diwakili oleh KRI Songkhla).

Secara geografis, Satun merupakan provinsi di selatan Thailand yang lokasinya terdekat dengan Indonesia. Tidak heran nelayan asal Aceh dan Sumatera Utara kerap kali ditangkap oleh aparat keamanan di Satun karena dituduh melakukan penangkapan ikan di wilayah Thailand tanpa izin yang sah.

11. Provinsi Songkhla

Songkhla adalah provinsi terbesar di selatan Thailand, diukur dari jumlah penduduk dan ekonomi. Ibukota Provinsi Songkhla adalah Kota Songkhla, tetapi kota terbesarnya adalah Kota Hat Yai. Hal ini tidak lazim di Thailand. Pola kota terbesar di tiap provinsi di Thailand biasanya adalah ibukota provinsi yang biasanya juga bernama sama dengan nama provinsinya. Pengecualian adalah Kota Hat Yai di Songkhla.

Hat Yai adalah kota bisnis dan wisata di Songkhla. Kota terbesar kelima di Thailand. Bandar udara Hat Yai adalah yang kelima tersibuk di Thailand (setelah Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket dan Chiang Mai). Kota Hat Yai juga dilewati oleh dua Asian Highway (AH) yaitu AH2 dan AH18. Dengan dua AH tersebut, Hat Yai terhubung ke pantai timur Malaysia melalui AH18, serta ke pantai barat Malaysia melalui AH2.



Gambar 31. Provinsi Songkhla

Songkhla memiliki tiga pos lintas perbatasan dengan Malaysia, yaitu; (1) Sadao-Bukit Kayu Hitam (Kedah), (2) Padang Besar-Padang Besar (Perlis), dan (3) Ban Prakop – Kota Putra (Kedah). Pos lintas Sadao-Bukit Kayu Hitam merupakan pos batas utama dan terbesar antara Thailand dan Malaysia. Pos ini pula yang dilewati oleh AH2.

Songkhla merupakan rumah bagi lima universitas dan satu insitut pendidikan agama Buddha. Terbanyak di antara provinsi di selatan Thailand. Total enam perguruan tinggi di Songkhla adalah Prince of Songkla University Kampus Hat Yai, Thaksin University Kampus Songkhla, Songkhla Rajabhat University, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Hat Yai University, dan International Buddhist College.

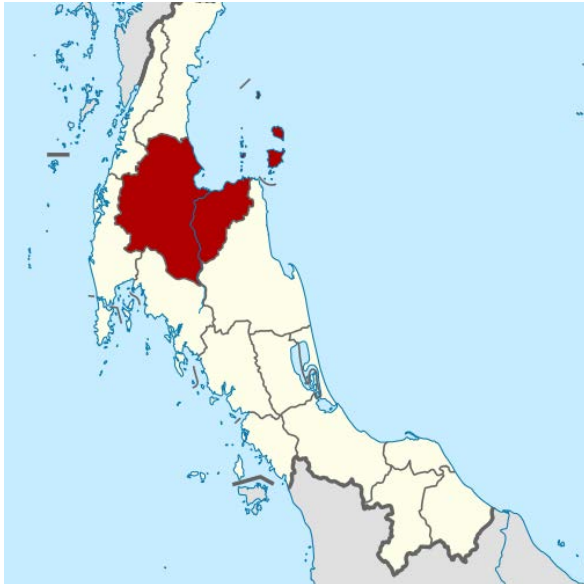
Songkhla adalah tempat perpaduan tiga budaya yaitu Thailand, Cina dan Melayu. Nama Songkhla berasal dari bahasa Melayu yaitu Singgora yang artinya Kota Singa (Singa+Pura=Singgora). Salah satu distrik di Songkhla bernama Singhanakhon yang juga berarti sama, yaitu Kota Singa (nakhon=negara/kota).

Luas wilayah Songkhla 7.741 km² (sedikit lebih kecil daripada Kabupaten Siak) dengan total jumlah penduduk sebanyak 1,4 juta jiwa (kurang lebih sama dengan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen).

Songkhla menjadi rumah bagi sebagian besar warga negara Indonesia yang berada di selatan Thailand. Selain keluarga besar KRI Songkhla, WNI di Songkhla pada umumnya adalah mahasiswa, dosen dan guru serta mereka yang menikah dengan warga lokal.

12. Provinsi Surat Thani

Surat Thani adalah nama kota sekaligus provinsi yang terletak di muara Sungai Tapi di Teluk Thailand. Surat Thani memiliki Pulau Samui yang merupakan salah satu tujuan wisata internasional. Tidak heran maka Surat Thani memiliki dua bandar udara, yaitu di Surat Thani



Gambar 32. Provinsi Surat Thani

dan di Koh Samui (bandar udara swasta milik Bangkok Airways).

Ekonomi Surat Thani ditunjang oleh pariwisata dan pertanian. Surat Thani menghasilkan kelapa sawit, kelapa, rambutan, karet dan peternakan.

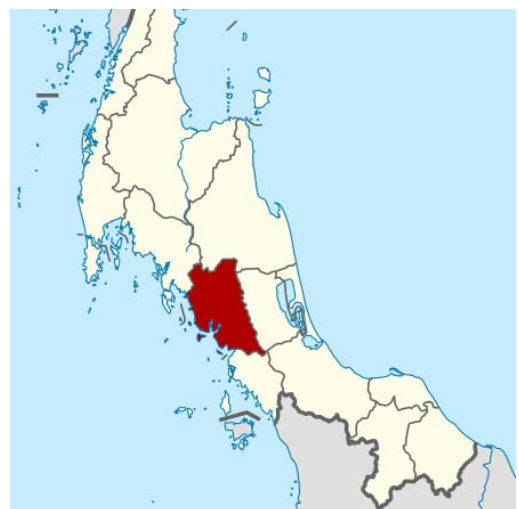
Luas wilayah Surat Thani berada pada kisaran 13.079 km² (sedikit lebih kecil daripada Kabupaten Nunukan) dengan jumlah penduduk sebanyak 1,07 juta jiwa (kurang lebih sama dengan jumlah penduduk Jakarta Pusat).

Nama Surat Thani dan Sungai Tapi di provinsi ini memiliki ikatan sejarah dengan nama Kota Surat dan Sungai Tapti (Tapi) di Gujarat, India. Surat Thani juga memiliki ikatan sejarah dengan Kerajaan Sriwijaya. Distrik Chaiya di Surat Thani diyakini sebagai salah satu kota penting Kerajaan Sriwijaya.

13. Provinsi Trang

Provinsi Trang, seperti Surat Thani, dulunya adalah kota pelabuhan yang penting bagi Kerajaan Sriwijaya. Nama Trang berasal dari kata dalam bahasa Melayu yaitu 'terang'

Luas wilayah Trang berada pada kisaran 4.726 km² (sedikit lebih besar daripada Kabupaten Banjar) dengan jumlah penduduk sebanyak 635 ribu jiwa (kurang sedikit dari Kota Jambi).



Gambar 33. Provinsi Trang

Trang memiliki jumlah lembaga pendidikan tinggi yang memadai. Terdapat empat kampus universitas di Trang yaitu Rajamangala University of Technology Srivijaya, Prince of Songkla University, Ramkhamhaeng University dan Suan Dusit Rajabhat University.

14. Provinsi Yala

Yala merupakan satu-satunya provinsi di selatan Thailand yang terkurung daratan (*landlocked province*). Sebagai perbandingan, Provinsi Phatthalung juga tidak memiliki akses



Gambar 34. Provinsi Yala

langsung ke laut, tetapi Phatthalung terhubung dengan Danau Songkhla yang menyatu dengan laut di Teluk Thailand. Meski tidak terhubung dengan laut, nama Yala adalah hasil dari alih bahasa Melayu “jala” (alat untuk menangkap ikan). Pola penamaan serupa adalah Distrik Yaring di Provinsi Pattani yang berasal dari kata “jaring” dalam bahasa Melayu.

Yala berada di perbatasan Thailand-Malaysia. Hanya ada satu pintu lintas perbatasan yaitu antara Betong (Yala) dengan Pangkalan Hulu (Perak). Di Betong terdapat

lokasi wisata sejarah Terowongan Piyamit, yaitu sebuah terowongan yang di masa lalu dipakai oleh orang-orang Komunis untuk bergerak di Thailand dan Malaysia.

Luas wilayah Yala berada pada kisaran 4.476 km² (sedikit lebih kecil daripada Kabupaten Bengkulu Utara) dengan jumlah penduduk sebanyak 553 ribu jiwa (kurang sedikit dari Kota Cimahi). Penduduk Yala mayoritas memeluk agama Islam (82%) dan agama Buddha (17%). Kota Yala merupakan salah satu kota dengan penataan terbaik di Thailand. Papan nama jalan di Kota Yala ditulis dengan 3 karakter yang menunjukkan bahwa kota ini majemuk sekaligus ramah terhadap wisatawan. Betong adalah tujuan wisata favorit bagi pelancong Malaysia.

B. Sriwijaya: Ikatan Sejarah di Masa Lalu

Siapapun yang pernah mempelajari sejarah, tentunya tidak asing dengan sebuah kerajaan besar bernama Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan di Asia Tenggara yang berpengaruh sekitar abad ke-6 hingga abad ke-13. Sriwijaya dipercaya berawal dari daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Palembang. Wilayah kekuasaan Sriwijaya mulai meluas dengan menguasai

Kerajaan Melayu (yang sekarang dikenal dengan Jambi). Wilayah kekuasaan Sriwijaya semakin meluas dan pada puncak kejayaannya, Sriwijaya dikenal sebagai kekuatan maritim yang mendominasi Laut Andaman, Selat Malaka, Selat Sunda dan Laut Jawa. Wilayah darat Sriwijaya membentang dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Pulau Sumatera, sebagian Pulau Jawa, Singapura, Semenanjung Malaysia, selatan Thailand, sebagian Kamboja, selatan Vietnam, Kalimantan Barat, Sabah, Sarawak dan Brunei.



Gambar 35. Peta Penyebaran dan Ekspansi Kerajaan Sriwijaya

Kalau kita sandingkan wilayah Kerajaan Sriwijaya di masa lalu dengan konteks kerja sama sub regional di masa modern, maka seluruh wilayah IMT-GT berada di dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Tentu saja saat Sriwijaya ada, belum ada identitas nasional dan batas negara seperti yang kita kenal sekarang. Dengan demikian, sejarah dan warisan Sriwijaya tersebar di sejumlah negara saat ini, utamanya Indonesia dan Thailand. Untuk Thailand, peninggalan Sriwijaya berada di wilayah selatan Thailand.

Peninggalan Sriwijaya di selatan Thailand ditemukan di beberapa provinsi seperti; Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Surat Thani, dan Trang. Berdasarkan temuan arkeologi, Distrik Chaiya di Provinsi Surat Thani diperkirakan merupakan salah satu kota terpenting Kerajaan Sriwijaya, selain Palembang. Provinsi Nakhon Si Thammarat juga memiliki peninggalan dari zaman Sriwijaya. Terdapat Prasasti Ligor yang dibuat pada tahun 775 tentang Raja Dharmasetu dari Dinasti Syailendra, Sriwijaya.⁶ Ligor adalah nama kuno dari Nakhon Si Thammarat.

Sejarah Sriwijaya memberikan kesamaan identitas antara Indonesia (Sumatera) dengan Thailand (selatan Thailand). Sebagai contoh adalah penggunaan nama Sriwijaya dapat ditemukan di Indonesia, Thailand dan Malaysia. Indonesia memiliki Universitas Sriwijaya di Palembang, Thailand memiliki Rajamangala University of Technology Srivijaya di Songkhla.

C. Ekonomi di Selatan Thailand

Thailand dikenal sebagai negara yang aktif dalam aktivitas perdagangan internasional. Pada tahun 2023, Thailand menempati urutan ke-27 negara eksportir terbesar di dunia. Satu peringkat di atas dari Indonesia yang berada di urutan ke-28.

Setiap perekonomian, terlepas itu ekonomi berkembang atau maju, tentunya memiliki sektor ekonomi andalan. Khusus wilayah selatan Thailand yang masih kaya dengan sumber daya alam, tentu sektor ekonomi andalan selatan Thailand terkait dengan sumber daya alam. Wilayah selatan Thailand yang terdiri dari 14 provinsi tentunya pula memiliki sektor ekonomi andalan di setiap provinsinya.

Sebagai contoh, sektor perikanan (perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan) adalah sektor ekonomi andalan di provinsi-provinsi yang memiliki pantai, antara lain Chumphon, Krabi, Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla, Trang, dan lainnya.

Contoh lain adalah produk pertanian dan perkebunan. Thailand adalah salah satu produsen terbesar produk seperti; karet (nomor urut 1), kelapa sawit (3), durian (1) dan beras (6). Produk pertanian dan perkebunan tersebut sebagian besar berasal dari lahan-lahan di selatan Thailand.

Selain komoditas ekspor, sektor pariwisata tetap menjadi ekonomi andalan di selatan Thailand. Hal ini dikarenakan semua 14 provinsi di selatan Thailand menjadikan sektor pariwisata sebagai “nyawa” dari ekonomi daerah setempat. Setiap provinsi memiliki daya tarik dan fasilitas untuk pelancong yang ingin berkunjung ke objek wisata mereka.

⁶ kompas.com, Widya Lestari Ningsih, Prasasti Ligor, *Peninggalan Kerajaan Sriwijaya di Thailand*, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/02/07/200000679/prasasti-ligorpeninggalan-kerajaan-sriwijaya-di-thailand>

Indonesia berpeluang untuk membangun kerja sama perdagangan, pariwisata dan investasi dengan selatan Thailand. Terkait perdagangan, produk Indonesia yang sudah dikenal masyarakat setempat adalah baju dan kain batik, sarung, makanan ringan, makanan instan, konfeksioneri seperti permen. Indonesia dapat mempopulerkan kopi dan teh ke selatan Thailand mengingat budaya minum kopi dan teh menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Potensi ekonomi pariwisata masih lebih besar wisatawan Indonesia berkunjung ke selatan Thailand (outbound) daripada pelancong selatan Thailand berkunjung ke Indonesia (inbound). Hal ini karena jumlah penduduk di 14 provinsi sekitar 9,4 juta orang, sementara jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta orang. Statistik mencatat data perlintasan orang Indonesia di selatan Thailand adalah sebanyak 186.559 orang (tahun 2024) dan sebanyak 270.757 orang (tahun 2023).

Dari data perlintasan tersebut, bisa dihitung lebih rinci persentase perlintasan berdasarkan provinsi. Perlintasan orang Indonesia di selatan Thailand pada tahun 2024 yang sekitar 186 ribu tersebut dapat diurai per provinsi, yaitu Songkhla (60%), Phuket (33%), Narathiwat (2%), Trang (1%), dan Koh Samui (1%). Sebagai catatan, pos perlintasan Sadao di Songkhla adalah yang terbanyak yaitu 45%. Untuk Provinsi Trang, mayoritas pelintas adalah WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal di pelabuhan Kantang.

Untuk tahun 2023, jumlah perlintasan yang sebanyak 270 ribu dapat diurai per provinsi, sebagai berikut Songkhla (74%), Phuket (14%), Narathiwat (7%), Trang (2%), dan Yala (1,5%). Sebagaimana diuraikan sebelumnya, perlintasan di Trang mayoritas adalah para anak buah kapal Indonesia yang berada di Pelabuhan Kantang.

Dari data statistik tersebut, terlihat bahwa Songkhla adalah provinsi di selatan Thailand yang paling banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Jumlah orang Indonesia yang datang ke Songkhla masih jauh lebih kecil dibandingkan orang Malaysia yang dapat melebihi dari 2 juta orang per tahun. Saat ini, untuk menarik lebih banyak turis asing khususnya turis Indonesia, Songkhla ingin memajukan wisata kesehatan.

Untuk investasi, Indonesia dapat mengambil peluang investasi di sektor-sektor ekonomi andalan di selatan Thailand yaitu perikanan, karet, kelapa sawit, durian, beras, dan pariwisata. Apabila proyek *Landbridge* antara Chumphon dan Ranong akan diwujudkan, maka terbuka peluang investasi skala besar bagi badan usaha milik negara Indonesia.

Sebagai gambaran, pada tanggal 24 Januari 2024 Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengadakan rapat di Ranong. Dalam rapat itu, Pemerintah Thailand berusaha mengajak para investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi membangun proyek *Landbridge*. Proyek pembangunan jembatan itu mencakup pembuatan pelabuhan laut dalam di Provinsi Ranong (Laut Andaman) dan Provinsi Chumphon (Teluk Thailand).⁷ Pemerintah Thailand memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sekitar THB 1 triliun atau setara dengan Rp485 triliun.

D. Karakteristik Pendidikan

Setiap dari 14 provinsi di selatan Thailand pasti memiliki kampus universitas. Provinsi yang memiliki jumlah populasi yang cukup signifikan, dapat memiliki universitas yang membawa identitas provinsi yang bersangkutan. Provinsi yang masih berkembang, biasanya memiliki kampus cabang dari universitas dari provinsi lain. Selain itu, di tiap provinsi juga terdapat technological college dan/atau community college berupa pendidikan kejuruan tanpa gelar.

Banyaknya lembaga pendidikan tinggi di selatan Thailand memberikan peluang kerja sama pendidikan yang luas bagi Indonesia. Sebagai gambaran, berikut perguruan tinggi yang ada di 14 provinsi selatan Thailand.

Provinsi Chumphon

No.	Nama Universitas	Status
1	Maejo University – Kampus Chumphon	Negeri
2	King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang – Kampus Chumphon	Negeri
3	Suratthani Rajabhat University – Kampus Chumphon	Negeri

Provinsi Krabi

No.	Nama Universitas	Status
1	Kasetsart University – Kampus Krabi	Negeri
2	Thailand National Sports University – Kampus Krabi	Negeri

⁷ [www.antaraneews.com](https://www.antaraneews.com/berita/3930795/thailand-akan-cari-dukunganinvestor-asing-untuk-proyek-jembatan-darat), Anton Santoso, *Thailand Akan Cari Dukungan Investor Asing Untuk Proyek Jembatan Darat*, <https://www.antaraneews.com/berita/3930795/thailand-akan-cari-dukunganinvestor-asing-untuk-proyek-jembatan-darat>

Provinsi Nakhon Si Thammarat

No.	Nama Universitas	Status
1	Walailak University	Negeri
2	Nakhon Si Thammarat Rajabhat University	Negeri
3	Southern College of Technology	Swasta
4	Rajamangala University of Technology Srivijaya - Kampus Nakhon Si Thammarat	Negeri

Provinsi Narathiwat

No.	Nama Universitas	Status
1	Princess of Naradhiwas University	Negeri

Provinsi Pattani

No.	Nama Universitas	Status
1	Prince of Songkla University – Kampus Pattani	Negeri
2	Fatoni University	Swasta

Provinsi Phang Nga

No.	Nama Universitas	Status
1	Ramkhamhaeng University – Kampus Phang Nga	Negeri
2	Rajamangala University of Technology Thanyaburi – Kampus Phang Nga	Negeri

Provinsi Phatthalung

No.	Nama Universitas	Status
1	Thaksin University - Kampus Phatthalung	Negeri

Provinsi Phuket

No.	Nama Universitas	Status
1	Prince of Songkla University – Kampus Phuket	Negeri
2	Phuket Rajabhat University	Negeri

Provinsi Ranong

No.	Nama Universitas	Status
1	Suan Sunandha Rajabhat University – Kampus Ranong	Negeri

Provinsi Satun

No.	Nama Universitas	Status
1	Songkhla Rajabhat University – Kampus Satun	Negeri

Provinsi Songkhla

No.	Nama Universitas	Status
1	Prince of Songkla University – Kampus Hat Yai	Negeri
2	Songkhla Rajabhat University	Negeri
3	Thaksin University – Kampus Songkhla	Negeri
4	Rajamangala University of Technology Srivijaya	Negeri
5	Hat Yai University	Swasta
6	International Buddhist College	Swasta

Provinsi Surat Thani

No.	Nama Universitas	Status
1	Prince of Songkla University – Kampus Surat Thani	Negeri
2	Suratthani Rajabhat University Rajabhat	Negeri
3	Tapee University	Swasta

Provinsi Trang

No.	Nama Universitas	Status
1	Prince of Songkla University – Kampus Trang	Negeri
2	Suan Dusit University – Kampus Trang	Negeri
3	Rajamangala University of Technology Srivijaya – Kampus Trang	Negeri

Provinsi Yala

No.	Nama Universitas	Status
1	Yala Rajabhat University	Negeri

Beberapa faktor yang memungkinkan kerja sama pendidikan Indonesia dan selatan Thailand maju antara lain adalah letak geografis yang berdekatan, tingkat kemahalan yang relatif terjangkau, serta modalitas kesamaan agama dan budaya.

1. Kerja Sama di Tingkat Perguruan Tinggi

Berikut ini adalah nama-nama universitas di selatan Thailand yang menjalin kerja sama dengan universitas di Indonesia.

a) Walailak University

Walailak University didirikan pada tahun 1992 dan berstatus sebagai universitas negeri di Nakhon Si Thammarat. Walailak University mengawali kerja samanya dengan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2002, dan menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Malang pada tahun 2005. Bentuk kegiatan yang menonjol adalah program “In Country” yang diselenggarakan oleh Jurusan Indonesian Studies, School of Liberal Arts, Walailak University yang mengirimkan mahasiswanya secara rutin setiap tahun ke Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Malang. Program tersebut bersifat wajib agar mahasiswa selatan Thailand bisa belajar bahasa Indonesia selama tiga bulan.

Selain pertukaran mahasiswa, Walailak University juga melakukan pertukaran dosen dan mengadakan seminar internasional dengan mengundang pembicara dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia.



Gambar 36. Walailak University

KRI Songkhla juga berpartisipasi mengembangkan kerja sama pendidikan dengan Walailak University melalui beberapa kegiatan seminar internasional bersama Walailak University. Acara ini termasuk seminar tentang Pemilu 2004 dan seminar tentang Perayaan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Thailand, dengan tema “Sriwijaya, Jaringan-Dagang, dan Pahlawan: Studi Indonesia di Thailand” pada tahun 2010.

Kerja sama Walailak University dengan Indonesia semakin meningkat setelah beberapa mahasiswa Indonesia melanjutkan studinya untuk program S-2 pada tahun 2010-2011. Kini jumlah universitas di Indonesia yang bekerja sama dengan Walailak University telah bertambah menjadi 12 universitas;

No.	Nama Universitas	Tahun Kerja Sama
1	Universitas Bengkulu	2015
2	Universitas Tadulako	2019
3	Universitas Negeri Yogyakarta	2021
4	Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur	2018
5	Universitas Mulawarman	2019
6	Universitas Negeri Surabaya	2017
7	Universitas Mataram	2022
8	Universitas Trunojoyo Madura	2022
9	Universitas Negeri Semarang	2021
10	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya	2022
11	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	2021
12	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	2022

b) Prince of Songkla University

Prince of Songkla University atau PSU adalah perguruan tinggi negeri terbesar di selatan Thailand yang memiliki lima kampus di lima provinsi. PSU bisa dikatakan sebagai perguruan tinggi pertama di selatan Thailand yang menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2005, PSU ikut serta memberikan bantuan pada korban Tsunami Aceh dengan memberikan beasiswa untuk program S-2 dan S-3.



Gambar 37. Prince of Songkla University Kampus Hat Yai

Adapun daftar perguruan tinggi di Indonesia yang hingga kini masih aktif bekerja sama dengan PSU diantaranya sebagai berikut;

No.	Perguruan tinggi	Waktu
1	Universitas Muhammad Natsir	16/08/2023 - 16/08/2028
2	Institut Teknologi Bandung	23/07/2023 - 23/07/2028
3	Universitas Trisakti	10/07/2023 - 10/07/2033
4	Universitas Riau	02/06/2023 - 02/06/2027
5	Universitas Negeri Surabaya	06/02/2023 - 06/02/2028
6	Universitas Islam Malang	23/06/2022 - 23/06/2027
7	Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran	19/05/2022 - 19/05/2027
8	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	24/01/2022 - 24/01/2027
9	Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada	28/12/2021 - 28/12/2026

No.	Perguruan tinggi	Waktu
10	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia	16/12/2021 - 16/12/2023
11	Fakultas Teknik, Universitas Andalas	23/12/2021 - 23/12/2026
12	Universitas Bengkulu	13/09/2021 - 13/09/2026
13	Universitas Sumatera Utara	11/12/2019 - 11/12/2024
14	Universitas Syiah Kuala	11/12/2019 - 11/12/2024
15	Universitas Riau	11/12/2019 - 11/12/2024
16	Universitas Negeri Medan	24/09/2019 - 24/09/2024
17	Universitas Airlangga	10/04/2019 - 10/04/2024
18	STKIP PGRI Jombang	03/03/2019 - 03/03/2024
19	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani	24/01/2019 - 24/01/2024
20	Universitas Sains Al Quran	30/01/2017 - 30/01/2027
21	Universitas Pancasila	26/10/2016 - 26/10/2022
22	Universitas Islam Indonesia	18/05/2016
23	Universitas Islam Sultan Agung	16/04/2016

KRI Songkhla sendiri telah lama menjalin kerja sama dengan PSU di lima kampus melalui beberapa kegiatan kerja sama antara lain;

- ASEAN Festival yang diselenggarakan oleh Dr. Thanat Khoman ASEAN Studies Center, PSU Hat Yai. Festival tahunan tersebut diselenggarakan sejak tahun 2013. KRI Songkhla selalu berpartisipasi untuk mempromosikan seni dan budaya, pendidikan, kuliner, dan wisata Indonesia.
- Partisipasi dalam PSU Higher Education Fair yang diselenggarakan setiap bulan Agustus bertempat di International Convention Center, PSU Hat Yai.
- Indonesia Cultural Night yang diselenggarakan oleh PSU Kampus Pattani dalam rangka promosi seni dan budaya Indonesia.
- Kegiatan promosi budaya, pendidikan, dan pariwisata Indonesia dalam acara The PSU Phuket Open House.

- Kegiatan promosi budaya Indonesia dalam Art and Cultural Festival yang diselenggarakan oleh Princess Galyani Vadhana Institutes of Cultural Studies, PSU Kampus Pattani.
- Pendirian Indonesian Corner di Princess Galyani Vadhana Institutes of Cultural Studies, PSU Pattani, dan Indonesian Corner di Faculty of International Studies, PSU Phuket.

c) **Yala Rajabhat University**

Yala Rajabhat University (YRU) telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia sejak tahun 2005, di mana pada waktu itu YRU berencana untuk membuka program



Gambar 38. Yala Rajabhat University

S-1 jurusan bahasa Melayu dan S-2 jurusan Metodologi Pengajaran Kajian Islam. Untuk merealisasikan rencana kerja sama tersebut, YRU membutuhkan kerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Negeri Yogyakarta guna membantu penyusunan kurikulum.

Pada tahun 2009, YRU semakin memperluas kerja samanya dengan perguruan tinggi lainnya di Indonesia, yaitu UIN Syarif Hidayatullah khususnya di bidang pendidikan Islam, Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung pada tahun 2011, Universitas Sebelas Maret pada tahun 2012, Universitas Darusalam Gontor (UNIDA) pada tahun 2013, dan Universitas Negeri Malang pada tahun 2014. Perluasan kerja sama yang dilakukan YRU dengan perguruan tinggi di Indonesia meliputi pertukaran dosen, mahasiswa, dan seminar internasional.

KRI Songkhla juga memiliki hubungan yang erat dengan YRU melalui beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain; menyelenggarakan Lomba Pidato bahasa Melayu dan Indonesia dan pendirian Indonesian Corner di YRU. Pihak YRU juga secara rutin mengirimkan mahasiswanya untuk melaksanakan program magang di Konsulat. Pada November 2024, KRI Songkhla bekerja sama dengan YRU menyelenggarakan Indonesia Education Fair (IEF) yang pertama. IEF 2024 diikuti oleh hampir 40 perguruan tinggi Indonesia.

d) Songkhla Rajabhat University

Songkhla Rajabhat University atau yang biasa dikenal dengan SKRU, mengawali kerja samanya dengan perguruan tinggi Indonesia melalui kegiatan kesenian dan kebudayaan. SKRU bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Bali pada tahun 2005. Kemudian di tahun 2009 SKRU menjalin kerja sama dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ), ISI Yogyakarta pada tahun 2011 dan ISI Padangpanjang pada tahun 2012.



Gambar 39. Songkhla Rajabhat University

Kerja sama SKRU dengan perguruan tinggi tersebut dijalankan dengan beberapa kegiatan, antara lain partisipasi pada seminar internasional yang diselenggarakan oleh ISI Denpasar dan ISI Padangpanjang. Selain itu, SKRU juga secara rutin melaksanakan festival "International Cultural Relations" dan seminar internasional yang diikuti oleh ISI Yogyakarta, ISI Denpasar, ISI Padangpanjang, dan IKJ Jakarta.

Kerja sama SKRU dengan KRI Songkhla berjalan dengan baik terutama di kegiatan promosi seni dan budaya Indonesia dalam festival tahunan "International Cultural Relations". Pada tahun 2012, KRI Songkhla bekerja sama dengan Pura Pakualaman Yogyakarta dan SKRU menyelenggarakan workshop internasional mengenai seni batik dan seni tari serta pertunjukan seni tari Thailand-Indonesia. Workshop tersebut diselenggarakan dalam rangka merayakan HUT Raja Bhumi Pol Adulyadej yang disaksikan oleh ribuan penonton.

e) Suratthani Rajabhat University

Suratthani Rajabhat University (SRU) tercatat mulai menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia pada bulan Mei 2008. Kerja sama SRU dengan perguruan tinggi Indonesia berfokus pada bidang seni dan budaya. Kerja sama itu dimulai ketika delegasi SRU yang dipimpin langsung oleh Rektor mengadakan program kunjungan studi banding ke ISI. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU yang dilaksanakan di SRU ketika delegasi dari ISI Denpasar berkunjung ke SRU. Selain bekerja sama dengan ISI Denpasar, SRU juga bekerja sama dengan ISI Surakarta (2011), dan UPI Bandung (2013).

Selain kerja sama dalam bidang kesenian dan kebudayaan, SRU juga bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012 dalam bidang bahasa Indonesia. Kerja sama ini dilakukan guna penyusunan kurikulum mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran pilihan di SRU yang rencananya dibuka pada tahun 2013.



Gambar 40. Suratthani Rajabhat University

Kemudian pada tahun 2019, SRU bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Kerja sama antara SRU dengan mitra kerja berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan seminar internasional bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa yang cukup aktif dilakukan. Selain itu, SRU juga secara rutin melaksanakan program promosi seni budaya Thailand di Indonesia termasuk di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Bali

f) Rajamangala University of Technology Srivijaya

Rajamangala University of Technology Srivijaya (RUTS) berdiri di Kota Songkhla dan memiliki kampus cabang di Provinsi Trang dan Nakhon Si Thammarat. Sejauh ini RUTS telah bekerja sama dengan Universitas Bengkulu (2006) dengan mengadakan pertukaran dosen dan mahasiswa dalam acara seminar internasional bersama.



Gambar 41. Rajamangala University of Technology Srivijaya Kampus Songkhla

Di tahun 2012, RUTS Kampus Nakhon Si Thammarat tercatat menerima 11 orang mahasiswa asal Indonesia untuk melanjutkan program studi S-1 di bidang pertanian dengan beasiswa dari Southern Border Provinces Administrative Centre. Selain itu, RUTS juga aktif sebagai anggota tetap dalam forum IMT-GT UNINET. RUTS senantiasa berpartisipasi dalam forum kerja sama tersebut melalui beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh forum tersebut.

g) Fatoni University

Fatoni University, semula bernama Yala Islamic University, adalah salah satu universitas yang ada di Provinsi Yala. Perguruan tinggi ini telah berganti nama menjadi Fatoni University (FTU) sejak tahun 2006. Status lokasi pun berpindah dari semula Provinsi Yala menjadi Provinsi Pattani. Ada beberapa perguruan tinggi Indonesia yang menjalin kerja sama dengan FTU seperti; Universitas Alwasliyah (UNIVA) Medan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan IAIN Sumatera Utara.



Gambar 42. Fatoni University

FTU mulai memperluas kerja samanya dengan perguruan tinggi di Indonesia bersama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) pada tahun 2009, UIN Makassar pada 2010, IKIP Budi Oetomo pada tahun 2012, dan Universitas Darussalam Gontor pada 2013. Kerja sama FTU terus meningkat hingga saat ini ada 100 perguruan tinggi Indonesia yang telah membentuk kerja sama dengan FTU.

Ada banyak mahasiswa dan alumni dari FTU memperoleh beasiswa pemerintah Indonesia seperti KNB, Darmasiswa serta BSBI di setiap tahun. Lebih dari 30 orang alumni dari Indonesia telah direkrut sebagai tenaga pengajar di beberapa fakultas di FTU.

h) Thaksin University

Thaksin University (TSU) memiliki dua kampus yang berdiri di Songkhla sebagai kampus utama dan satu kampus di Phatthalung. Thaksin University bekerja sama dengan Indonesia sejak tahun 2007. Beberapa mitra kerja sama TSU yaitu UIN Ar-Raniry (2007), Universitas Bengkulu (2012), Universitas Sulawesi Barat (2018), Universitas Atmajaya (2019), Universitas Jayabaya (2021), Universitas Negeri Yogyakarta (2021), dan Universitas Muria Kudus (2022).

Selain menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia, TSU juga aktif dalam forum kerja sama IMT-GT Uninet. KRI Songkhla memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan TSU. Hubungan baik ini bisa dilihat melalui kegiatan seminar dan promosi budaya. Selain itu, telah banyak mahasiswa TSU khususnya dari Fakultas Seni Rupa memperoleh Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI).



Gambar 43. Thaksin University

i) Princess of Naradhiwas University

Princess of Naradhiwas University (PNU) di Narathiwat tercatat mulai menjalin kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 2006, ketika PNU sedang dalam proses pendirian kampus dan menyusun kurikulum program Kajian Islam dan Arab. Dalam meningkatkan kerja sama, UIN Syarif Hidayatullah mengirimkan profesor bidang Islam untuk mendukung penyusunan kurikulum Studi Islam, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU pada tahun 2013. PNU terus meningkatkan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) di bidang keperawatan pada tahun 2018.



Gambar 44. Princess of Naradhiwas University

2. Kerja Sama Sekolah Menengah Thailand-Indonesia

Selain menjalin kerja sama pendidikan di tingkat perguruan tinggi, Indonesia dan selatan Thailand juga menjalin kerja sama pendidikan di tingkat Sekolah Menengah SMP-SMA. Kerja sama di tingkat SMP-SMA ini dimulai sejak bulan Januari 2011 setelah diselenggarakan pertemuan “School Partnership Program Indonesia-Thailand” di Bangkok oleh SEAMEO SEAMOLEC. Selain sektor pemerintah, beberapa sekolah swasta di selatan Thailand juga sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia baik secara langsung antarsekolah maupun antarasosiasi dan yayasan. Ada beberapa sekolah swasta selatan Thailand yang aktif bekerja sama dengan Indonesia antara lain Attarkiah Islamiah Institute di Narathiwat, Asosiasi Sekolah Islam Swasta di Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla, dan Yala.

3. Kerja Sama SMK Thailand-Indonesia

Program “School Partnership Program Indonesia-Thailand” ternyata membawa dampak berkelanjutan yang positif bagi kedua negara, yaitu dengan menjalin kerja sama pendidikan di tingkat SMK. Kerja sama sekolah SMK Thailand–Indonesia dimulai sejak tahun 2009 setelah diadakan pertemuan “Indonesia-Thailand School Partnership” yang pertama di Bangkok. Pertemuan itu diselenggarakan oleh SEAMEO SEAMOLEC di Jakarta bekerja sama dengan The Office of Vocational Education Commission (OVEC) di Bangkok. Kemudian pada tahun 2010, SEAMEO SEAMOLEC bekerja sama dengan KRI Songkhla dan OVEC untuk menyelenggarakan “Indonesia-Thailand School Partnership” yang kedua di Hat Yai. Pertemuan kedua ini dihadiri oleh 12 sekolah SMK di selatan Thailand dan 17 SMK dari Yogyakarta, Jawa dan Bali.

Di tahun 2010, pertemuan ketiga “Indonesia-Thailand School Partnership” kembali diadakan di Yogyakarta. Pertemuan itu dihadiri oleh rombongan pimpinan sekolah SMK dari Thailand sejumlah 35 yang akan melanjutkan kunjungannya ke Bali dan Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak telah menandatangani MoU dan Rencana Aksi. Penandatanganan itu menjadi penanda kesepakatan kedua negara untuk menyelenggarakan program penukaran guru dan siswa yang disebut Technical and Vocational Education and Training (TVET) Camp. Program TVET Camp mulai diadakan di tahun 2012-2013. Akibat perubahan politik di Thailand pada masa tersebut, maka program kerja sama pertukaran guru dan pelajar ini cukup terdampak karena tersandung dana pemerintah Thailand.

4. Pengelolaan Program Beasiswa

Setiap tahun KRI Songkhla menawarkan dan mengelola beasiswa dari Pemerintah Indonesia kepada kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di selatan Thailand yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Beasiswa yang ditawarkan kepada masyarakat diantaranya yaitu beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Riset seperti Program Darmasiswa dan Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), beasiswa dari Kementerian Luar Negeri, yaitu Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dan beasiswa lainnya seperti beasiswa dari Kementerian Agama.

Selain dari pemerintah, ada juga beasiswa yang berasal dari lembaga PP Muhammadiyah. Beasiswa Muhammadiyah adalah beasiswa yang diberikan organisasi Muhammadiyah kepada pelajar dan mahasiswa di selatan Thailand. Beasiswa Muhammadiyah merupakan hasil inisiatif kerja sama antara PP Muhammadiyah dengan Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) yang tertuang dalam MoU. PP Muhammadiyah tercatat sudah ikut dalam pemberian beasiswa sejak tahun 2008. PP Muhammadiyah menawarkan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa di lima provinsi selatan Thailand yaitu Narathiwat, Pattani, Yala, Satun dan Songkhla untuk studi tingkat S-1 di perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2015, beasiswa terus disebarluaskan ke seluruh Thailand sehubungan dengan banyaknya peminat dari luar lima provinsi tersebut.



Gambar 45. Perguruan Tinggi NU Memberikan Beasiswa Untuk Mahasiswa Selatan Thailand

Pada saat wabah Covid-19, pemberian beasiswa sempat diberhentikan sementara pada tahun 2020, dan dibuka kembali pada tahun 2021 namun dalam bentuk daring. Pemberian beasiswa penuh baru diaktifkan kembali di tahun 2023.

E. Karakteristik Sosial Budaya

Membicarakan tentang karakteristik sosial budaya di selatan Thailand tidak akan lepas dari membicarakan perihal keagamaan dan kerja sama keagamaan. Hal ini dikarenakan agama adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial budaya suatu masyarakat.

Selatan Thailand, secara agama, memiliki karakter khusus dari wilayah lain di Thailand. Di selatan Thailand, masyarakat muslim jumlahnya signifikan. Di beberapa provinsi di perbatasan Selatan, bahkan mayoritas muslim dapat melebihi 80%.

1. Peluang Kerja Sama di Bidang Keagamaan

Indonesia memiliki peluang kerja sama keagamaan dengan selatan Thailand. Salah satu peluang kerja sama keagamaan dengan selatan Thailand, yaitu ketika adanya kolaborasi antara SBPAC dengan Kementerian Agama RI. Kerja sama antara Kemenag dan SBPAC mulai terjalin pada tahun 2013 ketika Menteri Agama RI berkunjung ke selatan Thailand dalam rangka menghadiri seminar di PSU Pattani yang bekerja sama dengan SBPAC. Bentuk kerja sama itu terwujud dalam rencana pembinaan para da'i muda di kedua negara. Program kerja sama tersebut terus meningkat sampai ada perubahan pimpinan pada tahun 2015.

Selain itu, peluang kerja sama keagamaan juga dilakukan dengan melibatkan organisasi Islam di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai contoh, pengenalan tentang pemahaman agama dan kerja sama keagamaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah banyak dilakukan lewat jalur pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa yang ingin menempuh studi di sekolah atau perguruan tinggi berbasis Islam. Kerja sama pendidikan dan keagamaan yang dilakukan Muhammadiyah dan NU di selatan Thailand dirasa perlu dilakukan untuk saling bertukar pengalaman dan pemahaman yang positif tentang Islam sebagai agama yang damai. Pelajar Thailand yang belajar di Indonesia dapat melihat kemajemukan agama dan etnis masyarakat Indonesia. Pemerintah Thailand sendiri juga menyambut baik kerja sama pendidikan dan keagamaan tersebut. Harapannya agar masyarakat antaragama, antarbudaya, antarbahasa, dapat hidup berdampingan.

2. Program Magang/KKN dan PPL Internasional sebagai Strategi Promosi Budaya dan Pemahaman Lintas Budaya

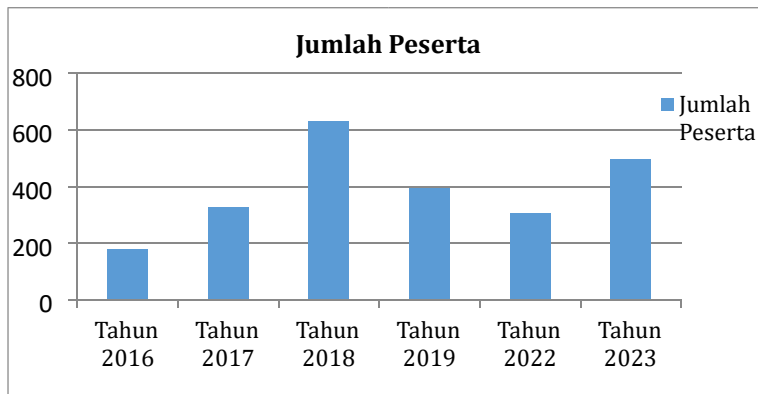
Demi meningkatkan intensitas kerja sama dan pemahaman lintas budaya, maka Indonesia dan selatan Thailand mengadakan program magang dan KKN/PPL di selatan Thailand. Program magang dalam bentuk KKN internasional dan PPL di selatan Thailand sudah dimulai sejak tahun 2013. Program ini diikuti oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia baik yang swasta maupun perguruan tinggi negeri. Program KKN internasional dan PPL diselenggarakan dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut;

1. Diselenggarakan oleh persatuan sekolah di selatan Thailand yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia dan Badan Alumni Luar Negeri selatan Thailand. Diikuti oleh Persatuan Alumni Indonesia - Thailand (PERSAIT), Private Islamic School of Songkhla (PISA), Muslim Education Development Association of Thailand (MEDAT), Private School in Special Zone, dan School Association in Andaman.
2. Diselenggarakan oleh sekolah-sekolah yang bekerja sama langsung dengan perguruan tinggi Indonesia seperti Sassanabamrung School di Chana, Jariyathamsuksa School di Chana, Bakong Wittaya School di Pattani, Songsermsasana School di Hat Yai, Attarkiah Islamiah Institute di Narathiwat, dan Thamvitaya School di Yala.
3. Program kerja sama antar perguruan tinggi Indonesia dan selatan Thailand seperti Rajamanggala University of Technology Srivijaya, Thaksin University, Hat Yai University, Prince of Songkla University, dan Yala Rajabhat University.

Program KKN/PPL di selatan Thailand dalam meningkatkan pemahaman lintas budaya juga dilihat cukup strategis dalam pengembangan *people-to-people contact* antar kedua warga negara.

Selain itu, program KKN/PPL di selatan Thailand juga memiliki potensi untuk mempromosikan budaya dan pendidikan Indonesia di selatan Thailand yang pada akhirnya dengan program ini, Indonesia mampu untuk terus meningkatkan citra positif di kalangan masyarakat setempat. Sebagai buktinya, telah banyak mahasiswa dan pelajar dari selatan Thailand yang berminat melanjutkan studinya di Indonesia dari tahun ke tahun.

Peran Konsulat RI Songkhla dalam program ini yaitu memantau kegiatan tersebut secara dekat dan melakukan beberapa upaya pencegahan dan penyelesaian masalah. Jumlah mahasiswa Indonesia yang dikirim untuk KKN/PPL di selatan Thailand telah tercatat dalam tabel berikut;



Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 hingga 2018, jumlah mahasiswa yang dikirim untuk melakukan KKN/PPL di selatan Thailand terus meningkat, namun di tahun 2019 hingga di tahun 2022 sempat mengalami penurunan dikarenakan pada waktu itu wabah Covid-19 sedang mewabah di seluruh dunia. Jumlah mahasiswa yang dikirim untuk KKN/PPL ke selatan Thailand kembali meningkat di tahun 2023 ketika wabah Covid-19 sudah membaik.

BAB IV

ORANG INDONESIA, DIASPORA INDONESIA, DAN INDONESIANIS

Sejarah mencatat bahwa interaksi warga negara Indonesia di wilayah selatan Thailand sudah berlangsung sejak lama. Saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di selatan Thailand memilih Songkhla dan Phuket sebagai tempat tinggal mereka. Warga negara Indonesia yang tinggal di Songkhla pada umumnya adalah staf dan keluarga staf KRI Songkhla, mahasiswa, dosen, guru dan keluarga pernikahan campur. Sementara yang tinggal di Phuket pada umumnya adalah keluarga pernikahan campur.

A. Jumlah WNI di Wilayah Kerja

Berdasarkan data dari Divisi 6 Imigrasi Thailand, jumlah akumulasi data bulanan selama enam bulan (Januari-Juni 2024), tercatat keberadaan WNI di selatan Thailand sebanyak 811 orang (tidak termasuk orang yang datang dengan bebas visa kunjungan singkat, 30 hari).

No.	Provinsi	Jumlah
1	Chumphon	9
2	Krabi	26
3	Nakhon Si Thammarat	37
4	Narathiwat	35
5	Pattani	85
6	Phang Nga	99
7	Phatthalung	6
8	Phuket	173
9	Ranong	0
10	Satun	14
11	Songkhla	202
12	Surat Thani	57
13	Trang	17
14	Yala	47

Selain warga negara Indonesia yang sudah tercatat pada tabel, diperkirakan terdapat sejumlah warga negara Indonesia yang berada di selatan Thailand tanpa izin tinggal yang sah.

Sesuai catatan selama tiga tahun terakhir, setiap tahun rata-rata terdapat tiga kasus WNI yang diketahui tinggal tanpa izin di selatan Thailand. Mereka yang tinggal tanpa izin pada umumnya sudah menikah dengan warga Thai dan bekerja secara informal. Berdasarkan provinsi, WNI yang tinggal tanpa izin berada di Provinsi Narathiwat, Yala, Pattani dan Phuket. Apabila ditangkap oleh aparat Thailand, mereka juga kemudian diketahui tidak memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku.

Salah satu contoh, ada seorang perempuan asal Medan yang menikah dengan warga Narathiwat. Pada 2024, terjadi ledakan pabrik petasan yang menyebabkan 10 orang tewas, 118 cedera, dan 200 rumah rusak di Narathiwat. Termasuk yang cedera adalah WNI asal Medan tersebut dengan inisial LM⁸, yang sudah memiliki anak berusia 20 tahun. Saat dibawa ke rumah sakit, baru diketahui bahwa LM adalah orang Indonesia dengan paspor yang sudah lama habis masa berlakunya, dan yang bersangkutan hidup di Thailand tanpa izin tinggal.

Kasus LM asal Medan di Narathiwat tersebut hanya satu contoh saja. Tidak tertutup kemungkinan ada kasus serupa, namun perkiraan jumlahnya belum dapat diperkirakan. Peran KRI Songkhla adalah hadir untuk memberikan perlindungan dan bantuan ketika mereka, yang berada di selatan Thailand tanpa izin tinggal, mendapatkan permasalahan. Untuk itu, KRI Songkhla membangun koordinasi dengan aparat setempat untuk berbagi informasi secara dini apabila terjadi masalah dengan WNI di selatan Thailand.

B. Pekerjaan WNI di Wilayah Selatan Thailand

Persepsi yang keliru terhadap WNI yang berada di selatan Thailand adalah mereka bekerja sebagai pekerja migran rumah tangga, seperti di Malaysia. Pada kenyataannya pekerjaan WNI yang ada di wilayah selatan Thailand berada di sektor formal. Mereka bekerja di bidang yang sudah diatur hukum dan dilindungi dengan kontrak yang jelas seperti sebagai dosen, guru, mahasiswa, maupun pegawai sektor pertambangan dan pariwisata.

⁸ Liputan6.com, Tommy K. Rony, *Wanita Indonesia Jadi Korban Ledakan Pabrik Petasan di Thailand*, <https://www.liputan6.com/global/read/5358953/wanitaindonesia-jadi-korban-ledakan-pabrik-petasan-di-thailand?page=2> (Tanggal Akses: 24 Juli 2024)

C. Diaspora Indonesia

Diaspora Indonesia di selatan Thailand tidak semata-mata diartikan pada keberadaan warga negara Indonesia yang tinggal di selatan Thailand. Diaspora juga mencakup pada warga negara asing lainnya, terutama warga negara Thailand, yang memiliki pandangan positif terhadap Indonesia. Tentunya menarik untuk mengenal diaspora Indonesia di selatan Thailand.

1. Orang Indonesia di Selatan Thailand

Untuk mengetahui bagaimana postur warga negara Indonesia di selatan Thailand, salah satu gambarannya adalah dengan melihat susunan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di KRI Songkhla untuk Pemilu 2024 lalu. Seleksi anggota PPLN dan KPPSLN yang terbuka, memberi gambaran kelompok terbesar masyarakat Indonesia di Songkhla. PPLN yang terdiri dari lima orang dan KPPSLN yang terdiri dari 11 orang sepenuhnya berasal dari luar staf KRI Songkhla. Seluruhnya 100% warga negara Indonesia yang menetap di Songkhla. Secara gender, PPLN terdiri dari 60% laki-laki dan 40% perempuan. Sementara KPPSLN adalah 100% perempuan. Secara profesi, PPLN 60% adalah mahasiswa S-3, 40% adalah guru. Sementara KPPSLN adalah 91% mahasiswa S-2 dan S-3.

Komposisi PPLN dan KPPSLN di KRI Songkhla pada Pemilu 2024 dapat mencerminkan sebagian aspek dari WNI yang ada di Songkhla.

2. Alumni Indonesia

Di wilayah selatan Thailand, diperkirakan terdapat sekitar dua ribu alumni Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Thailand terutama di selatan Thailand. Para mahasiswa Thailand ini diperkirakan mulai studi di Indonesia sejak tahun 1970-an. Jumlah mahasiswa tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian kuliah dengan mendapatkan beasiswa, sementara sebagian lain dengan biaya sendiri. Pilihan perguruan tingginya pun beragam, mulai dari perguruan tinggi negeri hingga swasta. Untuk tempat, mayoritas memilih Pulau Jawa. Ada pula yang memilih di Pulau Sumatera, dan hanya beberapa yang memilih di luar Jawa dan Sumatera.

Setelah lulus dan kembali ke Thailand, para alumni kembali ke provinsi masing-masing. Ada yang menjadi dosen atau guru. Ada yang menjadi pegawai pemerintah. Ada pula yang membangun bisnis. Apapun profesi mereka, mereka membawa dan ikut menyebarkan citra positif tentang Indonesia. Misalnya, mereka yang berbisnis pakaian aktif mempopulerkan batik Indonesia. Ada pula yang berbisnis makanan khas Indonesia seperti martabak khas Indonesia dan tempe.

Beberapa tokoh alumni Indonesia hingga saat ini antara lain;

a) Dr. Abdurahman Dewani

Dr. Abdurahman Dewani adalah alumni Indonesia yang berasal dari Pattani. Beliau adalah lulusan dari salah satu universitas di Bandung pada tahun 1970. Selama ini peran beliau dikenal sebagai tokoh bahasa Melayu di Thailand dan rajin mempromosikan Indonesia.

b) Dr. Waedaud

Dr. Waedaud adalah alumni Indonesia yang berasal dari Yala. Selama di Indonesia, beliau menempuh sekolah kedokteran di Universitas YARSI Jakarta pada tahun 1980. Beliau merupakan alumni kedokteran pertama dari selatan Thailand dan beliau adalah dokter muslim pertama di selatan Thailand.

c) Dr. Abdulhafiz Hiley

Dr. Abdulhafiz Hiley adalah alumni Indonesia yang berasal dari Yala. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 1990. Sejauh ini beliau dikenal sebagai tokoh di bidang pendidikan di Selatan dan berperan penting dalam mengembangkan kerja sama pendidikan dengan Indonesia. Beliau juga telah dilantik sebagai ketua Persatuan Alumni Indonesia - Thailand (PERSAIT) pada tahun 2010--2016.

d) Dr. Narong Hassani

Dr. Narong Hassani adalah alumni Universitas Indonesia (UI) yang berasal dari Phang Nga, selatan Thailand. Beliau menempuh studi di UI pada tahun 1990 dan peran beliau sejauh ini adalah Pembantu Rektor di Fatoni University dan beliau juga berperan dalam mendorong kerja sama perdagangan Indonesia-Thailand.

e) H. Abdulhalim Hiley

H. Abdulhalim Hiley adalah alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang berasal dari Yala, selatan Thailand. Beliau berkuliah di UIN pada tahun 1980 dan kini beliau dikenal sebagai salah satu tokoh agama di Yala yang juga menjabat sebagai Sekjen Majelis Agama Provinsi Yala.

f) Dr. Chalernpol Jantarachot

Dr. Chalernpol Jantarachot adalah alumni Indonesia yang masuk lewat Program Darmasiswa dan Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) pada tahun 2004. Beliau dikenal sebagai pengajar seni tari Indonesia khususnya tari Bali di beberapa perguruan tinggi seperti, Prince of Songkla University (PSU) Pattani, PSU Trang, Thaksin University, dan Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts.

Alumni Indonesia lainnya sejauh ini tercatat berperan sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di selatan Thailand seperti, Princess of Naradhiwas University, Fatoni University, Yala Rajabhat University, Thaksin University, Walailak University, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, dan Suratthani Rajabhat University.

Sejak 2010, alumni Indonesia dari selatan Thailand secara resmi memiliki suatu organisasi sebagai wadah bagi seluruh alumni. Organisasi tersebut adalah Persatuan Alumni Indonesia - Thailand (PERSAIT). PERSAIT sejatinya adalah komponen diaspora Indonesia yang penting, terutama di dunia pendidikan. PERSAIT menjadi sumber informasi tentang Pendidikan di Indonesia bagi mereka yang tertarik atau akan belajar di Indonesia. Pembahasan tentang alumni Indonesia di selatan Thailand, termasuk PERSAIT dan Jalinan Sahabat Republik Indonesia, akan dibahas lebih khusus pada Bab tentang *soft power* Indonesia di selatan Thailand.

D. Indonesianis

Indonesia memiliki hal-hal yang menarik untuk dikaji bagi orang asing. Indonesia dikenal sebagai negara dengan muslim terbanyak, demokrasi ketiga terbesar, ekonomi terbesar di ASEAN, negara majemuk dengan belasan ribu pulau, dan banyak hal menarik lainnya. Orang Thai di selatan Thailand yang tertarik untuk mengenal Indonesia atau memiliki pandangan yang positif terhadap Indonesia atau aktif memajukan kerja sama dengan Indonesia dapat disebut sebagai Indonesianis. Melalui profesinya masing-masing, mereka melakukan pekerjaan guna meningkatkan hubungan dan kerja sama Indonesia dengan selatan Thailand.

Di selatan Thailand, terdapat beberapa warga setempat yang berperan dalam mempromosikan Indonesia serta mempromosikan kerja sama bilateral Indonesia dengan selatan Thailand. Beberapa Indonesianis adalah;

1. Dr. Phaisan Toryib



Dr. Phaisan Toryib, dikenal sebagai seorang manager Attarkiah Islamiah Institute (AII). Selain memimpin sekolah, sebagai senator beliau pernah menjabat sebagai anggota komisi pendidikan di Parlemen. AII merupakan lembaga pendidikan pertama di selatan Thailand yang menjalin kerja sama dengan Indonesia sejak tahun 2000. Kini AII telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia serta melaksanakan berbagai bentuk kegiatan kerja sama dengan Indonesia termasuk penukaran tenaga pengajar dan pelajar, dosen, seminar, dan lain-lain sebagainya. AII juga bekerja sama dengan KBRI Bangkok dan KRI Songkhla mendirikan Indonesia Corner di dalam sekolah pada tahun 2020 sebagai pusat informasi tentang Indonesia bagi siswa sekolah dan masyarakat sekitarnya.

2. Assist. Prof. Dr. Supatra Davison



Assist. Prof. Dr. Supatra Davison adalah Pembantu Rektor untuk Urusan ASEAN dan Kreatif Ekonomi, serta Direktur Dr. Thanat Khoman ASEAN Studies Center, Prince of Songkla University, (PSU). Sejak Assist. Prof. Dr. Supatra Davison dilantik sebagai Direktur Dr. Thanat Khoman ASEAN Studies Center, kerja sama PSU dengan KRI Songkhla meningkat secara signifikan.

Acara ASEAN Week PSU merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun merupakan kerja sama antara PSU, Konjen Malaysia, dan KRI Songkhla dalam rangka mempromosikan negara masing-masing kepada kalangan akademisi di PSU dan sekitarnya. Tahun 2024, PSU juga menyelenggarakan ASEAN Week ke-11 pada 18-19 Juli 2024.

3. Dato Anusart Suwanmongkol

Dato Anusart Suwanmongkol adalah seorang anggota National Legislative Assembly dan President of the Friendship Group. Dato Anusart Suwanmongkol adalah juga seorang senator dan Ketua Komisi Persahabatan Indonesia–Thailand. Lebih dari itu, Dato Anusart dipercaya oleh Peru sebagai Konsul Kehormatan Peru di Provinsi Pattani.



Dato Anusart sehari-hari menjabat sebagai CEO dari CS Pattani Hotel. Hal yang menarik dari CS Pattani Hotel adalah hotel ini memperdengarkan lagu atau musik Indonesia di lobi hotel, serta menyajikan makanan Indonesia. Beliau memiliki peran penting dalam mempromosikan hubungan kerja sama bilateral kedua negara.

4. Assist. Prof. Dr. Sukree Langputeh

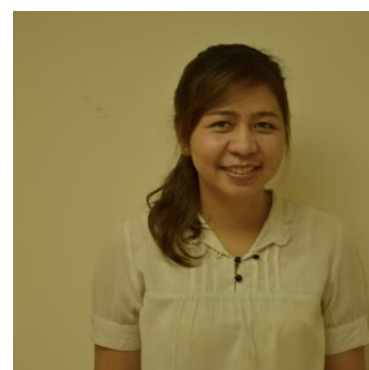


Assist. Prof. Dr. Sukree Langputeh adalah seorang akademisi asal Satun yang pernah menjabat sebagai Wakil Rektor di Fatoni University di Pattani. Beliau telah berperan penting dalam meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia–selatan Thailand di bidang pendidikan. Tokoh akademisi yang berdarah keturunan Indonesia ini juga berjasa mempromosikan pendidikan Indonesia di kalangan masyarakat Thailand.

5. Ms. Pensri Panich

Ms. Pensri Panich adalah dosen bahasa dan sastra Indonesia di program studi ASEAN Studies, Fakultas Ilmu Politik di Walailak University, Nakhon Si Thammarat. Beliau adalah alumni penerima beasiswa KNB program master untuk Sastra dan Budaya Indonesia di Universitas Negeri Malang.

Saat ini sedang melanjutkan S-3 di bidang bahasa di universitas yang sama di Malang. Beliau berjasa dalam mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di Thailand.



BAB V

***SOFT POWER* INDONESIA DI SELATAN THAILAND**

Soft power dapat dipahami sebagai kekuatan atau keunggulan yang digunakan oleh suatu negara ketika berkomunikasi dengan warga asing dari negara lain. Contoh *soft power* antara lain kesenian, kebudayaan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan lainnya. Berbeda dari *soft power*, penggunaan *hard power* terjadi ketika suatu negara berinteraksi dengan pemerintah dari negara lain. Contoh *hard power* antara lain kekuatan militer, kekuatan ekonomi atau hukum.

Dalam menjalankan misinya, KRI Songkhla membangun dan memanfaatkan *soft power* kepada masyarakat di selatan Thailand. Penggunaan *soft power* bertujuan untuk mendapatkan hati dan simpati warga Thai agar mereka memiliki citra dan sikap positif terhadap Indonesia.

Contoh tujuan *soft power* di bidang sosial budaya adalah agar orang selatan Thailand melihat Indonesia sebagai sahabat, menyukai kesenian dan kebudayaan Indonesia, memilih Indonesia sebagai tempat belajar, dan lainnya. Sedangkan contoh *soft power* di bidang ekonomi antara lain agar orang selatan Thai menyukai produk Indonesia dan mempertimbangkan Indonesia sebagai tujuan wisata dan investasi mereka.

Berikut adalah beberapa sarana dan sumber *soft power* yang dimanfaatkan oleh KRI Songkhla untuk menjalankan misinya di selatan Thailand:

A. Persatuan Alumni Indonesia - Thailand (PERSAIT)

Sejak tahun 1970-an, sudah ada anak muda dari selatan Thailand yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk melanjutkan studi mereka. Pada masa itu, sebagian besar dari mereka mempelajari hal-hal keagamaan. Setelah tahun 2000-an, mahasiswa selatan Thailand mulai memilih jurusan ilmu yang lebih variatif, seperti ilmu pendidikan, ekonomi, bahasa, dan rumpun ilmu eksakta.

Jumlah alumni Indonesia di selatan Thailand dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun pada saat itu belum ada wadah yang menyatukan para alumni. Apabila ada asosiasi maka para alumni dapat terus bersilaturahmi, bertukar informasi tentang pendidikan di Indonesia, dan orang yang tertarik untuk belajar ke Indonesia juga dapat memperoleh informasi dari para alumni.

Sekitar tahun 2008, KRI Songkhla mulai menggagas dan melakukan upaya untuk membentuk suatu asosiasi sebagai wadah untuk silaturahmi para alumni Indonesia. Organisasi ini diperlukan mengingat para alumni Indonesia tersebar di berbagai provinsi seperti di Narathiwat, Yala, Pattani, Songkhla, dan Satun.

Gagasan untuk membentuk asosiasi alumni Indonesia di Thailand mendapat sambutan positif dari Pemerintah Thailand. Dukungan Pemerintah Thailand tersebut datang dari lembaga pusat dan juga provinsi. Dukungan tersebut bertujuan untuk memberdayakan para alumni Indonesia agar dapat berkontribusi ke daerah mereka masing-masing.

Pada tahun 2008, KRI Songkhla mengadakan Sarasehan Persatuan Alumni Indonesia di Thailand. Sarasehan bertempat di Satun dan dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Wakil Gubernur, dan juga pejabat setempat. Semua pihak pada pertemuan itu sepakat untuk membentuk asosiasi alumni Indonesia dengan nama Persatuan Alumni Indonesia - Thailand (PERSAIT). Sarasehan juga menghasilkan usulan pengurus PERSAIT. Walau belum resmi terbentuk, Ketua pertama PERSAIT yang terpilih adalah Dr. Abdulhafiz Hiley dari Yala yang menjabat untuk dua periode.



Gambar 46. Pertemuan Duta Besar Ibrahim Yusuf dengan para Alumni untuk Persiapan Pembentukan Persatuan Alumni Indonesia

Pada tahun 2010, organisasi alumni Indonesia resmi terbentuk dengan nama Persatuan Alumni Indonesia - Thailand (PERSAIT). Pada saat resmi terbentuk, PERSAIT belum terdaftar sebagai organisasi sosial budaya sesuai hukum Thailand. Baru pada tahun 2012, PERSAIT memiliki status hukum.

Dalam perkembangannya, PERSAIT mendapatkan dukungan dari Pemerintah Thailand untuk pengadministrasian organisasi sehari-hari. Dengan dukungan tersebut, PERSAIT dapat memiliki kantor sekretariat di Pattani. Seiring waktu, keketuaan pun berganti. Ketua kedua adalah Bapak Mahamasata Sapaeng yang berdomisili di Narathiwat. Beliau pun menjabat selama dua periode. Ketua PERSAIT yang sekarang adalah Bapak Yazuli Bindulem. Beliau berasal dari Songkhla dan juga menjadi ketua yang ketiga.



Gambar 47. Peresmian Kantor PERSAIT di Pattani, 29 April 2019

KRI Songkhla melakukan kerja sama dengan PERSAIT dalam bentuk program bersama, seperti kunjungan PERSAIT ke berbagai universitas di Indonesia, magang mahasiswa Indonesia di selatan Thailand, temu alumni, buka puasa bersama, dan lainnya. Program bersama ini tentu membawa manfaat bagi KRI Songkhla dan juga para alumni Indonesia. Pada kegiatan tersebut kedua belah pihak dapat semakin saling mengenal dan membantu jika ada permasalahan teknis terkait pendidikan. Selain itu, citra Indonesia di selatan Thailand juga akan semakin positif, khususnya sebagai pilihan bagi pemuda selatan Thailand untuk melanjutkan studi.

Contoh masalah teknis yang dapat terselesaikan adalah kesulitan alumni Indonesia untuk melamar kerja sebagai pegawai negeri sipil di bidang pemerintahan di Thailand. Pokok masalah adalah kesulitan otoritas Thailand mengetahui status akreditasi universitas di Indonesia yang mengeluarkan ijazah kepada alumni yang bersangkutan. Faktor bahasa dan istilah tingkat akreditasi universitas menyulitkan untuk proses penyetaraan. Melalui komunikasi dengan PERSAIT dan otoritas terkait, isu ini terselesaikan pada awal 2023.

B. Jalinan Sahabat Republik Indonesia (JSRI)

Para alumni Indonesia dari selatan Thailand memiliki cara silaturahmi yang menarik di antara mereka, yaitu melalui pertandingan futsal. Pertandingan dilakukan dengan cara membuat tim futsal sesuai wilayah asal perguruan tinggi di Indonesia, misalnya: Tim Jakarta, Tim Bogor, Tim Yogya, Tim Jawa Tengah, Tim Sumatera, Tim Sulawesi, dan sebagainya.

Wadah pertandingan futsal dinamakan Jalinan Sahabat Republik Indonesia (JSRI). Pertandingan dilakukan sekali setahun yakni biasanya setelah Idulfitri karena dinilai dapat digabung dengan acara halal bihalal (tradisi Indonesia). Tujuan JSRI adalah mempererat persahabatan antar alumni dan KRI Songkhla melalui kegiatan olahraga. Pada saat ini, JSRI masih sebatas alumni laki-laki yang ikut dalam pertandingan futsal. Sudah ada wacana untuk membuat pertandingan olahraga untuk alumni perempuan.

Terkait waktu pertemuan, JSRI tercatat melakukan pertemuan pertamanya di Satun Pada saat pertemuan ini diadakan, KRI Songkhla belum dilibatkan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, KRI Songkhla sudah mulai dilibatkan, yaitu ketika diadakan di Provinsi Yala pada tahun 2008. Saat pertama kali ikut menghadiri pertemuan JSRI, KRI Songkhla merasa senang dan bangga melihat banyaknya alumni yang hadir di JSRI hingga ratusan orang.

JSRI ternyata tidak hanya sekadar pertandingan futsal sesama alumni Indonesia saja. JSRI juga ikut bertanding futsal melawan asosiasi alumni dari negara lain dengan membawa nama Indonesia. Ikatan alumni dari negara lain yang ada misalnya alumni Mesir, alumni Pakistan, alumni Saudi, dan lainnya.



Gambar 48. Pertemuan JSRI ke-4 di Pattani, 1 Mei 2024

Sebagai sarana *soft power*, JSRI adalah forum yang berbeda dengan PERSAIT. Partisipasi dalam JSRI tidak mengenal keanggotaan. Sifat kegiatan JSRI berupa sebuah *one-time-event* sekali setahun. JSRI merupakan momen untuk bertemu dan berolahraga sesama alumni Indonesia. Sementara PERSAIT lebih kepada sebuah organisasi yang memiliki rencana kerja terprogram di bidang pendidikan.

C. Indonesian Corner

Untuk memperkokoh kerja sama dengan institusi dan lembaga pendidikan di selatan Thailand serta mempromosikan citra positif di wilayah kerja, KRI Songkhla telah mendirikan dan memfasilitasi berdirinya Indonesian Corner di beberapa tempat di selatan Thailand. Hingga saat ini, terdapat enam Indonesian Corner yang aktif. Namun demikian, dalam sejarah pendirian Indonesian Corner terdapat tujuh Indonesian Corner yang pernah ada, dimana Indonesian Corner yang pertama kali dibangun di Thaksin University telah ditutup dan dipindahkan ke Prince of Songkla University Kampus Pattani.

Berikut ini adalah cerita pendirian dari tujuh Indonesian Corner di selatan Thailand.

1. Southern Culture Studies, Thaksin University (pindah ke Galyani Vadhana Cultural Institute, Prince of Songkla University Kampus Pattani)

Indonesian Corner pertama kali didirikan di Southern Culture Studies, Thaksin University pada tahun 2000 atas kerja sama antara KBRI Bangkok, KRI Songkhla, dan Thaksin University. Lokasinya tepat berada di Folklore Museum, the Institute for Southern Thai Studies, Thaksin University, Songkhla. Pada 2005, pengurus museum mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penataan ruang guna menampilkan display tentang bencana tsunami. Akibatnya, barang koleksi milik Indonesian Corner dipindahkan sementara dan disimpan di ruang lain. Pada tahun 2006, barang koleksi tersebut dipindahkan ke Prince of Songkla University Kampus Pattani dan dibuka sebagai ruang Indonesian Corner baru hingga saat ini.

2. Nakhon Si Thammarat Rajabhat University



Gambar 49. Indonesian Corner di Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (NSTRU) menjadi universitas kedua yang tercatat mendirikan Indonesian Corner. Pendirian Indonesian Corner di NSTRU dilakukan pada 30 Agustus 2004. Lokasi awal didirikan di Main Library, kemudian dipindah ke Office of Academic Resources and Information Technology

sampai sekarang. KRI Songkhla secara berkala mengadakan kegiatan untuk Indonesian Corner di NSTRU. Pada tahun 2023, KRI Songkhla bersama Universitas Islam Batik Surakarta mengadakan workshop membuat batik di Indonesian Corner NSTRU. Selain itu, KRI Songkhla juga selalu berupaya menambah barang koleksi di Indonesian Corner.

3. Galyani Vadhana Cultural Institute, Prince of Songkla University, Pattani

Indonesian Corner didirikan di Prince of Songkla University (PSU) Pattani pada tahun 2006. Indonesian Corner di PSU Pattani sejatinya bukan Indonesian Corner yang baru, tetapi pindahan dari Southern Cultural Studies, Thaksin University pada tahun 2000. Pembukaan Indonesian Corner yang bertempat di Princess Galyani Vadhana Institute of Cultural Studies tersebut sangat strategis dan bermanfaat dalam mempromosikan seni dan budaya Indonesia.



Gambar 50. Pembukaan Indonesia Corner di Prince of Songkla University, Pattani

4. Prince of Songkla University Phuket



Gambar 51. Peresmian Indonesian Corner di Prince of Songkla University, Phuket

Indonesian Corner di PSU Phuket diresmikan oleh Dubes RI untuk Thailand pada tanggal 16 November 2015. Indonesian Corner didirikan atas kerja sama dengan KBRI Bangkok, KRI Songkhla, dan PSU Phuket. Indonesian Corner bertempat di Faculty of International Studies, PSU Phuket. KRI Songkhla secara berkala mengadakan program promosi seni dan budaya, wisata, dan produk Indonesia di PSU Phuket.

5. Yala Rajabhat University

Indonesian Corner di Yala Rajabhat University atau YRU didirikan pada tahun 2018 atas kerja sama KRI Songkhla dengan YRU. Lokasinya berada di the Office of Academic Resources and Information Technology hingga saat ini. KRI Songkhla telah menyerahkan beberapa jenis bahan koleksi, namun Indonesian Corner di YRU belum diresmikan hingga saat ini karena diperkirakan diperlukan biaya sebesar THB 2 juta untuk mengaktifkannya. Pembukaan Indonesian Corner di YRU masih menunggu ketersediaan anggaran dari Pusat.



Gambar 52. Penyerahan Barang Koleksi Indonesian Corner di YRU 19 Januari 2017

6. Attarkiah Islamiah Institute



Gambar 53. Peresmian Indonesian Corner di Attarkiah Islamiah Institute

Attarkiah Islamiah Institute dapat dikatakan sebagai kampus Islam yang memiliki Indonesian Corner. Pendirian Indonesian Corner di Attarkiah diresmikan oleh Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Bangkok pada 25 Agustus 2020. Indonesian Corner di Attarkiah berperan sebagai pusat informasi tentang pendidikan dan pariwisata di Indonesia bagi guru dan siswa Attarkiah serta masyarakat yang berkepentingan.

7. Walailak University

Indonesian Corner di Walailak didirikan pada 6 Desember 2022 oleh Walailak University yang pada saat itu bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ). Lokasinya bertempat di gedung perpustakaan dan media pendidikan. Indonesian Corner ini berperan sebagai pusat informasi terkait dunia pendidikan Indonesia, serta pusat koordinasi program penukaran mahasiswa dan dosen antara Walailak University dengan perguruan tinggi di Indonesia.



Gambar 54. Peresmian Indonesian Corner di Walailak University

D. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Sebagian penduduk selatan Thailand adalah penutur bahasa Melayu. Secara alami, terdapat minat untuk mengenal dan mempelajari bahasa Indonesia. Minat untuk menguasai bahasa Indonesia bagi sebagian orang didorong oleh pandangan bahwa Indonesia adalah negara ekonomi terbesar di ASEAN. Terlebih lagi, bahasa Indonesia dilihat sebagai keluarga dari bahasa Melayu, sehingga menguasai bahasa Indonesia akan membantu komunikasi di negara-negara penutur bahasa Melayu seperti: Malaysia, Singapura, Brunei, dan lainnya.

Faktor kemiripan bahasa antara bahasa Melayu Pattani dan bahasa Indonesia merupakan salah satu faktor yang memungkinkan banyaknya jumlah alumni Indonesia yang berasal dari selatan Thailand. Tentu tidak sulit bagi penutur bahasa Melayu dialek Pattani untuk belajar mengenal dan menyesuaikan sedikit dengan bahasa Indonesia. Program pengenalan dan pengajaran bahasa Indonesia pada warga selatan Thailand selama ini telah mendapat dukungan dari Afiliasi Pengajar dan Pegiat bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA) Thailand.

Program BIPA selain untuk mempromosikan citra bangsa, juga sebagai *soft power* Indonesia di selatan Thailand guna menunjukkan kedekatan dan kesamaan etnis Melayu di selatan Thailand dan Indonesia. Pengajaran BIPA di selatan Thailand sama seperti di sekitar 40 negara lainnya, yaitu diselenggarakan melalui universitas setempat. Pengajaran BIPA di universitas yang ada di selatan Thailand pada praktiknya menjadi bagian dari pengajaran bahasa Melayu. Universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia di selatan Thailand adalah:

No	Nama Program	Lokasi
1.	Program ASEAN Studies	Walailak University, Nakhon Si Thammarat
2.	Program Bahasa Melayu dan Pendidikan Bahasa Melayu	Yala Rajabhat University
3.	Program Bahasa Melayu/Indonesia	Fatoni University
4.	Program Melayu Studies	Prince of Songkla University (PSU) Pattani
5.	Program Bahasa Melayu	Princess of Naradhiwas University (PNU), Narathiwat
6.	Program Bahasa Indonesia dan Malaysia untuk Pekerjaan di Luar Negeri	Songkhla Rajabhat University
7.	Program Bahasa Melayu	Suratthani Rajabhat University
8.	Program Bahasa Melayu	Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Pelaksanaan BIPA di selatan Thailand tidak hanya dilakukan oleh APPBIPA Thailand saja. KRI Songkhla sejak awal juga telah turut aktif memajukan BIPA. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh KRI Songkhla terkait BIPA antara lain perlombaan pidato menggunakan bahasa Indonesia, serta pengajaran BIPA di luar universitas.

Pengajaran BIPA di luar universitas sudah dilakukan oleh KRI Songkhla sejak tahun 2005. Dengan sumber daya mandiri, KRI Songkhla menyelenggarakan BIPA kepada pemerintah provinsi dan aparat militer. Pengajaran BIPA kepada Angkatan Darat dan Angkatan Laut di selatan Thailand menunjukkan adanya keperluan penguasaan bahasa tingkat dasar untuk pengembangan kerja sama militer kedua negara.



Gambar 55. Pelatihan bahasa Indonesia bagi staf dan personel the 2nd Naval Base Songkhla, tahun 2012



Gambar 56. Pelatihan bahasa Indonesia bagi staf militer di The 42 Circle Military Camp, Hat Yai, 2012

KRI Songkhla juga melihat pentingnya memperkenalkan bahasa Indonesia secara khusus kepada anak-anak sekolah dasar. Belajar bahasa Indonesia akan dapat membentuk persepsi positif di dalam hati anak-anak terhadap Indonesia hingga mereka dewasa nanti. Dengan pertimbangan tersebut, KRI Songkhla juga mengadakan pengajaran BIPA kepada anak-anak usia sekolah dasar di Hat Yai.



Gambar 57. Pengajaran BIPA untuk Pelajar SMA, tahun 2022 (atas) dan Anak SD, tahun 2023 (bawah)

Untuk mendorong minat berbahasa Indonesia, KRI Songkhla bekerja sama dengan beberapa universitas di selatan Thailand menyelenggarakan lomba pidato bahasa Indonesia untuk pelajar atau mahasiswa.

E. Promosi Budaya dan Ekonomi Indonesia

Promosi budaya Indonesia di selatan Thailand telah menjadi agenda rutin tahunan KRI Songkhla sebagai upaya memperkuat citra Indonesia di selatan Thailand, sehingga produk Indonesia selalu diminati atau perguruan tinggi Indonesia selalu menjadi opsi pertama untuk mencari kuliah di luar Thailand. Dalam kegiatan promosi, KRI Songkhla tidak hanya memiliki agenda promosi budaya saja, tapi juga memiliki agenda promosi ekonomi.

Terdapat dua jenis kegiatan promosi berdasarkan penggagasnya. Pertama, gagasan datang dari pihak Thailand, dan KRI Songkhla berpartisipasi sebagai peserta atau *co-host*. Saat ini, promosi yang dilakukan oleh KRI Songkhla pada umumnya adalah kegiatan yang digagas oleh pihak Thailand, seperti Melayu Day (oleh Kota Yala), Pakaian Melayu (oleh Kota Yala), ASEAN Week (oleh PSU Hat Yai), Satun Halal Street (oleh Provinsi Satun), Halal Expo atau HAPEX (oleh PSU Hat Yai).

Jenis kegiatan promosi kedua adalah kegiatan mandiri yang gagasannya datang dari KRI Songkhla. Dalam pelaksanaannya, KRI Songkhla dapat menggandeng pihak selatan Thailand untuk mendukung guna meningkatkan bobot kegiatan. Pihak dari selatan Thailand biasanya membantu dengan menyediakan tempat pelaksanaan acara. Mengingat gagasan datang dari KRI Songkhla, maka biaya pada acara semacam ini hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawab KRI Songkhla. Positifnya adalah nama kegiatan dapat menggunakan nama Indonesia. Sebagai contoh, KRI Songkhla pernah menyelenggarakan Indonesian Night Festival di PSU Pattani pada tahun 2007-2013. Sebagai contoh lainnya, KRI Songkhla menyelenggarakan Indonesia Education Fair di Yala Rajabhat University pada tahun 2024. Acara tersebut diikuti oleh hampir 40 perguruan tinggi dan ratusan pelajar SMA serta mampu menghasilkan 14 MoU.

Berdasarkan skala kegiatan, maka Melayu Day merupakan kegiatan dengan skala terbesar. Lalu lintas pengunjung Melayu Day selama tiga hari dapat mencapai ribuan orang. Melayu Day yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Yala sejak tahun 2014 diikuti oleh KRI Songkhla dan Konjen Malaysia Songkhla. Pada tiga tahun terakhir, peserta dari Indonesia pada Melayu Day rata-rata mencapai 100 orang.



Gambar 58. Festival Melayu Day di Yala tahun 2017

Selain Melayu Day di Yala, KRI Songkhla juga berpartisipasi pada Festival Pakaian Melayu yang diselenggarakan sejak tahun 2022 oleh Kota Yala. Keunggulan Pakaian Melayu adalah memberi kesempatan kepada para perancang busana untuk bertanding dengan ide-ide terbaik. Peserta Melayu Day didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif masing-masing. Lebih dari itu, *fashion show* di Pakaian Melayu tidak bertujuan untuk dijual, tetapi perwujudan dari perlombaan design pakaian yang terbaik dari masing-masing negara.



Gambar 59. Peragaan Busana Pakaian Melayu di Yala tahun 2023

Pakaian Melayu merupakan kesempatan yang baik bagi para akademisi dan mahasiswa bidang tekstil desain untuk dapat mempromosikan hasil karyanya. Di samping itu, acara ini juga merupakan peluang bagi pengusaha tekstil Indonesia untuk dapat menjalin hubungan kerja sama dengan para pengusaha tekstil selatan Thailand dalam mengembangkan pasaran tekstil di kawasan ini.



Gambar 60. Pameran Produk Ekonomi Makanan dan Minuman



Gambar 61 Pameran Busana Melayu di Melayu Day



Gambar 62. Kelompok Tari Bali dari ISI Denpasar dalam Cultural Relation Festival, Songkhla Rajabhat University, bekerja sama dengan Prince of Songkla University Kampus Hat Yai

Dalam ajang promosi budaya dan promosi ekonomi, KRI Songkhla terus berupaya semaksimal mungkin memperluas akses pasar produk Indonesia, terutama dari UMKM. Setiap kegiatan promosi, KRI Songkhla memfasilitasi *business matching* dengan harapan UMKM Indonesia lebih mengenal peluang bisnis yang ada di selatan Thailand, sekaligus meningkatkan kualitas produk mereka untuk memenuhi persyaratan impor di selatan Thailand.



Gambar 63. Penandatanganan MoU dan Business Matching Melayu Day tahun 2025

BAB VI

MITRA KERJA KAMI DI SELATAN THAILAND

Dalam menjalankan misinya, KRI Songkhla bekerja sama dengan lembaga pemerintah pusat dan daerah Thailand serta dunia usaha yang berada di wilayah selatan. Kerja sama yang dilakukan mencakup tujuan yang luas, seperti promosi yang luas dan tepat sasaran serta perlindungan warga negara Indonesia yang efektif. KRI Songkhla memberi nilai penting dan memiliki apresiasi tinggi terhadap kemitraan dengan lembaga setempat mengingat mereka adalah aktor kunci di bidangnya masing-masing.

A. Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC)

Di selatan Thailand ada sebuah lembaga khusus yang bertugas untuk meningkatkan dan mengkoordinasikan administrasi pemerintahan sipil di wilayah perbatasan selatan (Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla, dan Yala). Lembaga ini dikenal dengan nama Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC). Tujuan utama dari pembentukan SBPAC adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat setempat di lima provinsi tersebut. Beberapa program pembangunan yang dilaksanakan oleh SBPAC antara lain; meningkatkan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan tinggi, memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan mengurangi kemiskinan.

Menurut hasil survei dan laporan tahun 2022 dan 2023 bahwa empat provinsi selatan Thailand yaitu Narathiwat, Pattani, Satun, dan Yala masuk dalam 10 provinsi pada kelompok paling bawah tingkat ekonominya di Thailand. Hasil laporan tersebut mendukung pentingnya keberadaan SBPAC dalam menangani isu tersebut.

SBPAC dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang umumnya berasal dari kalangan tentara, polisi, atau gubernur yang memiliki pengalaman luas di selatan Thailand. Hal ini dikarenakan Sekjen SBPAC harus dapat berkoordinasi dengan lima pemerintah provinsi, kepolisian, aparat keamanan dan instansi pemerintah lainnya.

KRI Songkhla telah bekerja sama erat dengan SBPAC di beberapa program kegiatan. Salah satu contoh kerja sama antar SBPAC dengan KRI Songkhla adalah beasiswa dari Indonesia, khususnya dari organisasi Muhammadiyah. KRI Songkhla mendukung pengelolaan beasiswa Muhammadiyah, mulai dari tahap koordinasi dengan PP Muhammadiyah sampai pada tahap seleksi orientasi dan pemberangkatan calon peserta ke Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kerja sama pendidikan, KRI Songkhla dan SBPAC memfasilitasi kunjungan

delegasi dari Indonesia ke selatan Thailand dan sebaliknya. Melalui penekanan pada kerja sama pendidikan, maka program kerja sama pendidikan Indonesia dengan selatan Thailand meningkat cepat sementara jumlah pelajar dan mahasiswa Thailand yang studi di Indonesia juga ikut meningkat secara signifikan. Selain itu, KRI Songhla dan SBPAC juga bekerja sama meningkatkan potensi para alumni Indonesia melalui beberapa program pelatihan termasuk pelatihan bagi para isteri mereka yang berasal dari Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, SBPAC bertugas untuk mengkaji potensi isu sosial-politik di selatan Thailand yang dapat berdampak luas. Mereka mengkaji isu-isu tersebut dengan pendekatan sosial-ekonomi dikarenakan tiga provinsi (Narathiwat, Pattani, dan Yala) adalah provinsi yang masih memerlukan banyak program sosial-ekonomi. Program ekonomi untuk peningkatan taraf hidup adalah wujud usaha SBPAC untuk menjaga kondisi sosial di tiga provinsi tersebut. Selain itu, SBPAC juga mendukung identitas masyarakat setempat seperti bahasa Melayu, hukum syariah tentang keluarga, memberikan perhatian terhadap madrasah dan lembaga pendidikan Islam.

Dalam upaya penyelesaian isu di selatan Thailand, SBPAC selain menggunakan pendekatan ekonomi, juga menggunakan pendekatan sosial-budaya dan pendidikan. Tentu pendekatan ekonomi tetap dipertahankan namun dengan semakin meluasnya sudut pandang pemerintah pusat dan SBPAC, mereka mulai meyakini apabila masyarakat Thailand berpendidikan tinggi, maka mereka dapat membantu pemerintah untuk menjadikan selatan Thailand lebih moderat, lebih terbuka dan mampu hidup berdampingan secara damai dengan yang lain. Keberhasilan SBPAC untuk memperluas sudut pandangnya ini telah membuahkan hasil lain yang tidak kalah penting, yaitu kondisi di provinsi-provinsi selatan Thailand yang kini lebih kondusif dan sejahtera. Kemajuan ini menandakan bahwa selatan Thailand kini sudah bergeser ke arah yang lebih positif berkat peran dari pemerintah, para alumni dan juga KRI Songkhla.

Sebagai mitra kerja yang erat dengan KRI Songkhla, tentu SBPAC memiliki harapan untuk bisa lebih baik lagi dalam bekerja sama. Sejak menjalin kerja sama di tahun 2004, SBPAC berharap bisa meningkatkan kesejahteraan di Narathiwat, Pattani dan Yala bersama KRI Songkhla. Harapan SBPAC ini didasari oleh kondisi bahwa di selatan Thailand yang mayoritas dihuni orang keturunan Melayu dan beragama Islam. Provinsi di selatan Thailand memiliki masalah paling menonjol yaitu ketertinggalan ekonomi dan pendidikan. Sehingga dalam kerja sama kemitraan ini, SBPAC bersama KRI Songkhla berharap bisa semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiga provinsi paling selatan Thailand dengan cara menggerakkan para alumni agar mereka bisa bekerja memajukan wilayah. Salah satunya

dengan membuka lapangan kerja baru dan menciptakan kesempatan kerja untuk masyarakat Thailand.

SBPAC juga melihat bahwa di lima provinsi yang masuk wilayah kerja mereka banyak pemuda yang melanjutkan studi ke Indonesia, sehingga SBPAC bersama KRI Songkhla membuka pintu kerja sama dengan PP Muhammadiyah agar akses pendidikan semakin terbuka lebar dan seumpama para alumni kembali, mereka dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan masyarakat dan wilayahnya. Dari sini maka tentu saja baik SBPAC dan KRI Songkhla mengharapkan peluang kerja sama semakin luas dan kesempatan pemuda selatan Thailand untuk ke Indonesia semakin baik.

B. Kantor Gubernur di Selatan Thailand

Gubernur adalah pejabat pemerintah tertinggi di tingkat provinsi. Semua provinsi seluruh Thailand dipimpin oleh seorang Gubernur yang ditunjuk oleh dan di bawah Kementerian Dalam Negeri, serta dilantik oleh Kabinet kecuali Gubernur Bangkok yang dipilih melalui pemilihan umum. Terdapat 14 gubernur di wilayah kerja KRI Songkhla. Seorang gubernur dapat mengalami *tour of duty* sebagai gubernur di beberapa provinsi di selatan Thailand selama karirnya, misalnya seorang gubernur di Narathiwat kemudian dipindah menjadi gubernur di Satun dan kemudian menjadi gubernur di Phang Nga. Contoh lain, gubernur di Narathiwat mutasi ke Songkhla dan kemudian mutasi ke Surat Thani. Bahkan mutasi antar provinsi di selatan Thailand bisa juga terjadi pada tingkat jabatan di bawah gubernur.

Masa jabatan seorang gubernur biasanya satu atau dua tahun dalam provinsi yang sama. Waktu terjadinya mutasi dalam situasi normal selalu terjadi pada awal tahun fiskal Thailand yaitu 1 Oktober. Gubernur Pattani saat ini yaitu Ibu Patimoh Sadeeyamu merupakan salah satu gubernur yang terlama di posisinya. Beliau juga dicatat sebagai gubernur muslim sekaligus perempuan yang pertama di Thailand.

KRI Songkhla telah membangun kerja sama yang erat dengan para gubernur tersebut untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan perlindungan WNI. Untuk menjalin dan meningkatkan kerja sama yang baik, KRI Songkhla rutin selalu melakukan kunjungan kehormatan serta melaksanakan program dengan atau di provinsi di selatan Thailand. Beberapa kegiatan kerja sama tersebut antara lain promosi ekonomi dan budaya dengan gubernur Satun, kegiatan seni budaya ASEAN dengan provinsi Pattani dan Narathiwat. Selain dengan gubernur, Dharma Wanita Persatuan KRI Songkhla juga memiliki hubungan yang erat dengan kantor palang merah provinsi yang dipimpin oleh para

isteri gubernur di selatan. Beberapa kegiatan kerja sama yang pernah dilakukan antara lain kegiatan Afternoon Tea, acara Hari Anak Nasional Thailand, dan donor darah.

Hubungan kerja sama yang baik dengan para gubernur di selatan Thailand berpengaruh signifikan dalam upaya perlindungan WNI di wilayah kerja. Sebagai contoh, KRI Songkhla memiliki hubungan erat dengan gubernur Yala guna memfasilitasi proses izin tinggal bagi santri Indonesia yang sekolah di sekolah tahfizul Quran Markas Yala. Hal ini karena surat sponsor dari Gubernur Yala menjadi persyaratan penting bagi izin tinggal santri tersebut. Hal ini juga dengan gubernur provinsi lain yang terdapat WNI seperti Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phuket, Satun, Songkhla, dan Surathani.

Kerja sama yang baik antara KRI Songkhla dengan gubernur di selatan Thailand juga dibuktikan dengan partisipasi mereka dalam acara yang diadakan oleh KRI Songkhla, misalnya resepsi diplomatik HUT Kemerdekaan RI.



Gambar 64. Tamu VIP (dari kiri ke kanan: Wakil Gubernur Songkhla, Panglima Navy Area Command 2, Panglima ISOC 4, Gubernur Songkhla, Konsul RI Songkhla, Sekjen SBPAC, Konjen Malaysia, Walikota Yala) pada Resepsi HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024

C. Kepolisian Selatan Thailand

KRI Songkhla menjalin kerja sama yang luas dengan Kepolisian Kerajaan Thailand yang berada di selatan Thailand. Sebagaimana diketahui, terdapat sembilan Kepolisian Daerah di seluruh Thailand. Khusus untuk selatan Thailand, terdapat tiga markas kepolisian daerah yaitu di Songkhla, Phuket, dan Yala. Selain itu, ada pula polisi pariwisata yang khusus memberikan perlindungan kepada turis asing.

Sesuai wilayah, mitra kerja kepolisian di selatan Thailand adalah Polisi Regional 8 yang kantornya di Phuket, dan Polisi Regional 9 yang kantornya di Songkhla. Selain Polisi Regional 8 dan 9, terdapat juga polisi perbatasan selatan yang berkantor di kota Yala.

Kepolisian Regional 8 memiliki wilayah kerja pada tujuh provinsi bagian atas selatan Thailand yaitu Chumphon, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Phang Nga, Phuket, Ranong, dan Surat Thani. Markas Kepolisian Regional 8 berada di Phuket. Sedangkan Kepolisian Regional 9 memiliki wilayah kerja pada tujuh provinsi bagian bawah selatan Thailand yaitu Narathiwat, Pattani, Phatthalung, Satun, Songkhla, Trang dan Yala. Kepolisian Regional 9 bermarkas di Songkhla.

Kerja sama KRI Songkhla dengan Kepolisian Kerajaan Thailand mencakup penanganan nelayan Indonesia yang ditangkap karena *illegal fishing*, pelancong Indonesia yang mengalami permasalahan dalam perjalanannya, dan lainnya. Contoh kasus terkini adalah pembebasan tiga orang WNI asal Aceh yang menjadi korban penyelundupan. Kasus berawal dari telepon yang diterima oleh petugas piket KRI Songkhla pada minggu sore dari satu keluarga di Aceh yang memberitahu bahwa seorang anggota keluarganya ditahan dan mengalami penyiksaan. Anggota keluarganya sempat mengirimkan lokasi peta yang berada di Phatthalung.

Berdasarkan pengaduan telepon tersebut, KRI Songkhla segera melaporkan kepada Kepolisian setempat. Laporan KRI Songkhla langsung ditindaklanjuti saat itu juga oleh Kepolisian. Kemudian diketahui bahwa ternyata terdapat tiga orang, bukan satu orang, WNI yang disekap di tempat tersebut. Seluruh WNI berasal dari Aceh. Para pelaku merupakan kelompok yang bersenjata. Pelaku tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap dan tiga WNI tersebut segera diamankan.

Kasus ternyata tidak berhenti begitu saja ketika tiga WNI sudah dibebaskan. Polisi kemudian menyerahkan mereka ke lembaga perlindungan saksi dan korban yang berada di Songkhla. Beberapa waktu kemudian, Kepolisian Thailand dikabarkan melakukan penangkapan kriminal WN Thailand di Indonesia, atas bantuan Kepolisian Indonesia. Patut diduga penangkapan kriminal Thai di Indonesia berkaitan dengan penyekapan tiga orang Indonesia dari Aceh. Kabar penangkapan kriminal tersebut bahkan disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand melalui media sosialnya.

Setelah melewati proses pemulihan mental dan saksi persidangan, nasib tiga WNI akhirnya dapat kembali ke keluarga masing-masing.

Alasan lain mengapa memiliki polisi merupakan mitra kerja penting bagi KRI Songkhla adalah karena imigrasi di Thailand adalah bagian dari kepolisian. Jadi, tugas KRI Songkhla yang berkaitan dengan kekonsuleran juga bermitra dengan Kepolisian Kerajaan Thailand.

D. Biro Imigrasi

Imigrasi di Thailand dijalankan oleh Immigration Bureau yang merupakan salah satu unit dari Kepolisian Kerajaan Thailand. Penempatan imigrasi sebagai bagian dari kepolisian mencerminkan pentingnya fungsi keamanan dalam pelayanan lalu lintas internasional. Seperti di negara lain, Biro Imigrasi di Thailand menangani visa, izin tinggal, re-entry permit, pengawasan dan tugas keimigrasian lainnya. Namun terdapat perbedaan dengan imigrasi di Indonesia, yaitu imigrasi di Thailand tidak menerbitkan paspor. Kewenangan menerbitkan semua jenis paspor sepenuhnya berada di Kementerian Luar Negeri, Thailand.

Setiap provinsi di selatan Thailand memiliki kantor imigrasi. Pada tingkat koordinasi, seluruh kantor imigrasi provinsi di selatan Thailand dibawah Biro Imigrasi Divisi 6. Khusus untuk imigrasi di bandar udara internasional seperti di Phuket dan Hat Yai, koordinasi berada di bawah Biro Imigrasi Divisi 2 yang berlokasi di luar selatan Thailand. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Staf Teknis Imigrasi KRI Songkhla berkoordinasi erat dengan kantor Divisi 6, imigrasi provinsi serta imigrasi di bandar-bandar udara internasional yang ada di selatan Thailand.

E. Militer (ISOC 4, Navy Area Command 2, Navy Area Command 3)

Angkatan Darat Kerajaan Thailand memiliki unit yang disebut Internal Security Operations Command (ISOC). Sesuai namanya, ISOC lebih banyak menangani isu keamanan dari dalam negeri. Selatan Thailand merupakan wilayah ISOC Regional 4.

ISOC tercatat pernah melakukan kerja sama dengan Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan, namun kerja sama itu terhenti akibat wabah Covid-19. KRI Songkhla memiliki hubungan yang baik dengan ISOC Regional 4 khususnya terkait perlindungan WNI. KRI Songkhla juga pernah bekerja sama dengan ISOC Regional 4 menyelenggarakan pelatihan BIPA bagi staf dan personel di the 42nd Circle Military Camp Hat Yai dan Navy Area Command 2 Songkhla.

Sebagaimana diketahui, keamanan wilayah laut Thailand terbagi dalam tiga area komando laut. Navy Area Command 1 bertanggung jawab di Teluk Thailand wilayah atas, dan bermarkas di Chonburi. Navy Area Command 2 (Navy 2) bertanggung jawab di Teluk Thailand wilayah bawah, dan bermarkas di Songkhla. Navy Area Command 3 (Navy 3) bermarkas di Phuket, dan bertanggung jawab di Laut Andaman dan Selat Malaka yang berbatasan dengan Sumatera.

KRI Songkhla menjalin kerja sama dengan Navy 2 dan Navy 3. KRI Songkhla banyak menghadiri kegiatan *ceremonial* Navy 2 mengingat kantor KRI Songkhla berdekatan dengan Navy 2. Sebaliknya Navy 2 juga menghadiri undangan kegiatan oleh KRI Songkhla. Sementara untuk Navy 3, walau letak kantor berjauhan, namun komunikasi banyak dilakukan. Kasus penangkapan nelayan dari Sumatera dilakukan oleh Navy 3 yang menjaga Laut Andaman dan Selat Malaka. Berkat hubungan yang baik dengan Navy 3, KRI Songkhla sering mendapatkan informasi awal ketika penangkapan nelayan baru terjadi. Hal ini memungkinkan KRI Songkhla memberikan bantuan untuk kelancaran proses hukum, sehingga memberikan kemudahan bagi nelayan dan juga pihak berwenang di Selatan Thailand.

Selama tahun 2022, Navy 3 telah menangkap 71 nelayan dari Sumatera. Sementara pada tahun 2023, telah ditangkap 69 nelayan. Keterlibatan KRI Songkhla sejak awal penangkapan dapat membantu semua pihak untuk kelancaran proses selanjutnya. Sebagai contoh, KRI Songkhla dapat membantu proses identifikasi nelayan secara lebih cepat dan akurat ketika baru ditangkap. Tantangan yang dihadapi di lapangan antara lain, nelayan yang ditangkap tidak memiliki bukti identitas sama sekali, atau nelayan hanya memiliki satu nama, atau nama yang sama untuk beberapa orang, atau bahkan penulisan nama Indonesia yang terasa sangat asing buat petugas Thailand, serta nelayan yang pernah ditangkap sebelumnya lalu mencoba memberikan nama palsu supaya terhindar dari hukuman berat.

Sejak awal ditangkap sampai pemulangan nelayan kembali ke Indonesia, prosesnya dapat berlangsung lebih dari satu tahun. Proses tersebut juga melibatkan banyak lembaga mulai dari *Navy 3*, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penjara dan imigrasi. Satu peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi pelajaran adalah ketika dua nelayan yang memiliki nama yang sama mendapati dokumen identitas mereka tertukar. Berdasarkan penelusuran diketahui bahwa dokumen tertukar saat pengalihan kewenangan antar lembaga yang menangani mereka. Akibat kekeliruan tersebut, proses pemulangan sempat tertunda sambil mencari solusi yang baik untuk semua.

F. Penjara di Selatan Thailand

Terkait penjara, saat buku ini ditulis hanya terdapat dua WNI yang sedang menjalani hukuman penjara di selatan Thailand. Satu orang di penjara Songkhla karena melakukan pencurian uang di dalam mobil di kota Hat Yai, dan satu lagi di penjara Satun karena menggunakan paspor palsu. Jumlah WNI di penjara dapat meningkat ketika terjadi penangkapan nelayan, dan biasanya akan ditempatkan di penjara Satun atau penjara Phuket. Sebagai wujud kehadiran negara, KRI Songkhla secara rutin berkala melakukan *consular access* menjenguk WNI saat di penjara serta mengurus pemulangan setelah selesai masa hukuman.

KRI Songkhla mendapatkan kerja sama yang baik dari seluruh penjara yang menampung WNI. Menjelang berakhirnya masa tahanan, KRI Songkhla dapat diberikan akses untuk membuat Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Sehingga ketika masa tahanan selesai, WNI mantan narapidana dapat segera pulang ke Indonesia.

Konsep pembinaan di lembaga kemasyarakatan di Thailand juga serupa dengan Indonesia, di mana para tahanan mendapatkan pelatihan, mendapatkan makanan gratis, bahkan mereka mendapatkan perawatan gratis. Misalnya ada salah satu dari mereka yang sakit, maka ada petugas yang akan merawat dan disediakan pula layanan kesehatan. Pernah terjadi satu kasus dimana salah satu nelayan yang ditahan di penjara Phuket menderita sakit serius. Penjara Phuket membawa nelayan tersebut ke rumah sakit dan mendapat perawatan yang cukup lama sampai sembuh dengan biaya rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh penjara. Setelah sembuh, KRI Songkhla memulangkan nelayan tersebut dan diserahkan ke pejabat terkait di Indonesia.

Para petugas di lembaga kemasyarakatan bekerja dengan sangat profesional. Mereka memberikan pelayanan terbaik kepada WNI yang ditampung di lembaga pemasyarakatan. Sebagai contoh, salah satu nelayan yang ditahan setelah dicek diketahui berusia di bawah 17 tahun. Penjara Satun kemudian memindahkan yang bersangkutan ke penjara remaja di bawah usia dewasa. KRI Songkhla juga merasa berterima kasih kepada para petugas lembaga pemasyarakatan yang memberikan kesempatan WNI untuk mempelajari ketrampilan dan menjalankan ibadah. Sebaliknya, KRI Songkhla sering mendapat informasi bahwa narapidana WNI berkelakuan baik selama di tahanan sehingga sering mendapat pengurangan masa tahanan.

G. Rumah Sakit di Selatan Thailand

Fasilitas kesehatan adalah kebutuhan yang penting untuk masyarakat, tidak hanya warga lokal tetapi juga orang asing. KRI Songkhla membangun kerja sama yang erat dengan beberapa rumah sakit di Selatan, baik negeri maupun swasta. Kerja sama tersebut sangat penting untuk dapat memudahkan akses ke fasilitas kesehatan bagi WNI pada saat situasi kecemasan.

Biaya pengobatan di Thailand sejatinya tidak terlalu jauh berbeda dengan di Indonesia. Hanya di beberapa rumah sakit premium yang mengenakan tarif tinggi kepada pasiennya, baik warga lokal maupun orang asing. Hanya saja, dalam praktiknya, tarif pengobatan untuk orang asing dapat lebih tinggi dari warga lokal. Selain itu, biasanya orang asing akan dirujuk ke rumah sakit premium yang mahal.

Permasalahan yang kerap terjadi adalah orang Indonesia yang mengalami sakit serius di selatan Thailand tidak memiliki asuransi kesehatan yang memadai. Kalau pun memiliki asuransi, tapi nilai tanggungan kecil dan tidak mencukupi biaya yang muncul.

Berdasarkan tujuan perjalanannya, WNI yang mengalami sakit di selatan Thailand dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok. Pertama, wisatawan Indonesia yang berlibur ke Thailand tanpa memiliki asuransi kesehatan. Wisatawan mengalami stroke atau kecelakaan saat berlibur. Biasanya terjadi di kota tujuan wisata seperti Phuket, Hat Yai, dan Koh Samui. Kelompok kedua adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka memilih jalur Hat Yai atau Phuket untuk datang ke Malaysia atau pulang ke Indonesia, namun mengalami masalah kesehatan dalam perjalanan. Lokasi sakit biasanya terjadi di Songkhla, Hat Yai atau Phuket. Kelompok ketiga, adalah jamaah haji/umroh atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Mereka mengalami gangguan kesehatan dalam penerbangan sehingga terpaksa diturunkan dari pesawat. Lokasi kejadian selalu di Phuket sebagai tempat pendaratan darurat.

Setelah menangani kasus yang cukup berulang dari tiga kelompok WNI sakit di selatan Thailand, KRI Songkhla memiliki hubungan baik dengan sejumlah rumah sakit seperti Bangkok Hospital Hat Yai, Rumah Sakit PSU Hat Yai, Rumah sakit Umum Hat Yai, Rumah Sakit Umum Songkhla, Bangkok Hospital Phuket, dan Rumah Sakit Vachira Phuket.

Satu praktik mulia yang diterapkan di rumah sakit di selatan Thailand adalah mengutamakan keselamatan pasien tanpa melihat lebih dulu kemampuan keuangan pasien. Dalam situasi darurat, rumah sakit, baik pemerintah atau swasta, akan menyelamatkan pasien, meskipun orang asing dan tanpa menanyakan apakah pasien memiliki dana atau asuransi. Penyelesaian biaya yang timbul juga terbuka untuk pengurangan yang wajar dan mempertimbangkan kondisi pasien.

Aspek lain yang dikembangkan dalam kerja sama dengan rumah sakit adalah kerja sama dengan jasa lain yang terkait dengan pengobatan, seperti jasa pengiriman jenazah dan tempat penginapan yang murah di dekat rumah sakit. Sebagai contoh, saat satu orang WNI di rawat di RS Vachira, Phuket sekitar hampir satu bulan, muncul masalah karena keluarga yang mendampingi tidak memiliki biaya untuk mencari penginapan. KRI Songkhla membantu dan berhasil mendapatkan penginapan yang terjangkau dan dekat dengan RS Vachira. Biaya penginapan hanya THB5 (sekitar Rp2.500) per hari. Penginapan tersebut merupakan fasilitas penginapan nirlaba yang dijalankan oleh lembaga keagamaan. Hanya saja tentunya kamar kosong tidak selalu tersedia di penginapan tersebut.

Hal yang menjadi catatan adalah banyak dari WNI yang ketika datang ke selatan Thailand tidak memiliki asuransi kesehatan, bahkan mereka yang berwisata. Sehingga ketika mereka bermasalah dengan kesehatan, mereka sangat terkendala dengan dana pengobatan.

H. Kamar Dagang

Setiap provinsi di selatan Thailand memiliki Kamar Dagang atau Chamber of Commerce. KRI Songkhla memiliki hubungan dengan Kamar Dagang di 14 provinsi. Dalam kerja sama, KRI Songkhla berusaha untuk membuka pintu kerja sama ekonomi yang baru dengan setiap Kamar Dagang. Sebagai contoh, menjelang pelaksanaan Trade Expo Indonesia yang biasanya setiap bulan Oktober, maka KRI Songkhla telah memulai pendekatan beberapa waktu sebelumnya. Sebagai catatan, peserta Trade Expo Indonesia dari selatan Thailand untuk tiga tahun terakhir adalah sebanyak 14 orang pada tahun 2022, 33 orang pada tahun 2023, dan 23 orang pada tahun 2024.



Gambar 65. Pengusaha Selatan Thailand pada Trade Expo Indonesia tahun 2023

I. Bandar Udara di Selatan Thailand

Terdapat empat bandar udara di selatan Thailand yang melayani penerbangan internasional, yaitu Hat Yai International Airport di Songkhla, Krabi International Airport, Phuket International Airport, dan Surat Thani International Airport. Selain itu terdapat pula beberapa bandar udara domestik penerbangan sipil dan bandar udara khusus untuk keperluan militer (seperti di Songkhla dan Pattani).

Dari empat bandar udara internasional, hingga saat ini hanya bandar udara di Phuket yang memiliki penerbangan langsung ke Indonesia. Air Asia membuka penerbangan langsung Phuket-Bali pada Agustus 2024 dan penerbangan Phuket-Medan pada Juni 2025. Untuk bandar udara utama yang menjadi pintu pelintasan WNI di selatan Thailand adalah bandar udara Hat Yai dan Phuket. Mengingat VVIP atau VIP menggunakan bandar udara di Hat Yai atau Phuket, maka KRI Songkhla memiliki kartu pas bandara di bandar udara Hat Yai dan Phuket. Untuk bandar udara lain, kartu pas bandara dapat diperoleh sesuai kebutuhan.

J. Kementerian Luar Negeri (Kantor Paspor Songkhla)

Kementerian Luar Negeri Thailand memiliki kewenangan untuk menerbitkan semua jenis paspor Thailand. Oleh karena itu, Kemlu Thailand memiliki kantor paspor di beberapa tempat. Kantor paspor Kemlu Thailand di selatan Thailand berada di Nakhon Si Thammarat, Phuket, Songkhla, Surat Thani, dan Yala.

KRI Songkhla sejatinya tidak memiliki kepentingan atau kerja sama langsung dengan kantor paspor Kemlu Thailand. Tetapi dengan adanya kantor perwakilan Kemlu Thailand di selatan Thailand, terutama di Songkhla, maka KRI Songkhla dapat meminta bantuan secara informal seperti menanyakan narahubung yang menangani isu fasilitas diplomatik di Kemlu Thailand. Interaksi yang kerap terjadi antara KRI Songkhla dengan pejabat Kemlu yang berada di kantor paspor adalah ketika KRI Songkhla diterima oleh Gubernur. Terkadang kantor gubernur menghadirkan pejabat Kemlu dari kantor paspor sebagai penerjemah.

Kantor paspor Kemlu Thailand di Songkhla juga melakukan *reach out* ke komunitas konsulat di Songkhla. Pada tahun 2024, Kantor Paspor Songkhla untuk pertama kali hadir berpartisipasi pada pertandingan bola voli tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Selama ini, Attarkiah Islamiah Institute dari Narathiwat mewakili Thailand dalam pertandingan bola voli, bersama Konsulat Jenderal Malaysia dan KRI Songkhla.

K. Perguruan Tinggi di Selatan Thailand

Untuk meningkatkan kerja sama bilateral pendidikan antara Indonesia dengan Thailand di wilayah Selatan, KRI Songkhla telah membangun kerja sama yang erat dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi di selatan Thailand. Tercatat beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Selatan antara lain Prince of Songkla University (PSU), Princess of Naradhiwas University (PNU), Yala Rajabhat University (YRU), Songkhla Rajabhat University (SKRU), Hat Yai University (HU), Thaksin University (TSU), Rajamanggala University Technology of Sriwijaya (RUTS), Fatoni University (FTU), Walailak University (WU), Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (NSTRU), Suratthani Rajabhat University (SRU), Phuket Rajabhat University (PKRU), dan Maejo University (MJU) Kampus Chumphon.

Kerja sama yang erat tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kerja sama semua perguruan tinggi tersebut dengan perguruan tinggi di Indonesia melalui berbagai kegiatan kerja sama termasuk penukaran mahasiswa dan dosen, joint research, dan seminar internasional.

Selain itu, KRI Songkhla juga menyelenggarakan kergiatan kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut. Kerja sama antar KRI Songkhla dengan perguruan tinggi di selatan antara lain:

- Indonesia Cultural Night dengan PSU Kampus Pattani
- Lomba pidato bahasa Melayu dan Indonesia dengan Yala Rajabhat University, Fatoni University dan PSU Pattani
- Seminar internasional dengan Walailak University, Suratthani Rajabhat University dan Thaksin University

- ASEAN Week dengan PSU Hat Yai
- Promosi seni budaya Indonesia di PSU Phuket, Walailak University, PSU Pattani, Thaksin University, Songkhla Rajabhat University, Suratthani Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, dan Phuket Rajabhat University.
- Pameran Pendidikan Indonesia (IEF) dengan Yala Rajabhat University
- Menghadiri upacara wisuda di PSU, PNU, Thaksin University, dan Hat Yai University.

Selain itu, KRI Songkhla juga melaksanakan kegiatan dalam rangka mempromosikan Indonesian Corner yang bertempat di beberapa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan termasuk Walailak University, PSU Phuket, PSU Pattani, Yala Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, dan Attarkiah Islamiah Institute di Narathiwat.

L. Dinas Kebudayaan Provinsi-Provinsi Selatan Thailand

Sebagai negara yang menjadi tujuan wisata, Thailand aktif mengadakan berbagai acara budaya. Dalam rangka mempromosikan seni budaya Indonesia di wilayah kerja, KRI Songkhla selain membina hubungan kerja sama dengan perguruan tinggi, juga menjalin hubungan kerja sama dengan dinas kebudayaan provinsi selatan. KRI Songkhla telah berpartisipasi kegiatan promosi seni dan budaya yang diselenggarakan oleh dinas kebudayaan provinsi Songkhla, Satun, Narathiwat, Pattani, dan Yala.

M. Center for Propelling the Education for Southern Border Provinces (CPES)

Untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan secara kelurahan di lima provinsi perbatasan Selatan (Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla, Yala), KRI Songkhla bekerja sama dengan Center for Propelling the Education for Southern Border Provinces (CPES). CPES yang merupakan perwakilan Kementerian Pendidikan Thailand di lima provinsi tersebut telah bekerja sama secara rutin dengan KRI Songkhla. Beberapa kegiatan rutin antara lain sosialisasi pendidikan Indonesia kepada masyarakat Selatan yang berminat melanjutkan studi di Indonesia. CPES juga mendukung promosi beasiswa pendidikan Indonesia baik swasta maupun pemerintah kepada masyarakat Selatan. Kerja sama yang erat telah membuktikan peningkatan jumlah mahasiswa selatan Thailand ke Indonesia. Selain itu, pada September 2022, CPES menganugerahkan penghargaan *Semapak Raks Chai Dan Tai* (Kontribusi dan Kecintaan Kepada Selatan Thailand) kepada KRI Songkhla atas jasa aktif kerja sama di bidang pendidikan.

N. Kota Yala

KRI Songkhla telah membina hubungan kerja sama dengan Kota Yala sejak tahun 2013 dalam rangka mempromosikan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. KRI Songkhla secara rutin berpartisipasi pada acara tahunan Festival Melayu Day@Yala. Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Melayu Day@Yala ke-10 dan mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Selain kegiatan Melayu Day@Yala, KRI Songkhla juga aktif berpartisipasi pada Festival Pakaian Melayu yang menghadirkan para designer dan pengusaha pakaian Indonesia. Melalui Pakaian Melayu, para designer Indonesia dapat berlomba sekaligus belajar dari designer di Thailand dan Malaysia.

BAB VII

PENGALAMAN KERJA YANG SULIT TERLUPAKAN

Setelah 28 tahun KRI Songkhla berdiri, tentunya banyak peristiwa yang telah dilalui, baik itu peristiwa yang berhubungan dengan jejaring kerja, maupun WNI yang ada di selatan Thailand. Setiap tugas pasti memberikan pelajaran baru. Meski demikian, terkadang ada tugas-tugas tertentu yang begitu berkesan, menantang, dan menyentuh, sehingga menjadi *memorable*.

Tugas-tugas yang sulit terlupakan akan menjadi pelajaran yang membekas di dalam hati dan ingatan semua pihak yang melaksanakannya. Tugas yang tidak terlupakan dapat menjadi kisah yang layak untuk diceritakan. Dalam sejumlah peristiwa, jelas terlihat pelaksanaan tugas membutuhkan lebih dari sekadar menjalankan pekerjaan. Ada nilai kemanusiaan yang dapat dijadikan pelajaran. Maka dari itu, bab ini akan menceritakan beberapa pengalaman kerja yang sulit terlupakan bagi KRI Songkhla.

Penuturan kisah dan pengalaman ini bertujuan untuk mengenang kembali perjalanan dan perjuangan KRI Songkhla terkait bagaimana menghadapi masalah-masalah yang bersifat mendesak atau berulang.

A. Pengalaman Kerja yang Sulit Terlupakan

Tidak ada pekerjaan yang tidak penting, dan tidak ada tugas yang sederhana. Namun satu hal yang pasti adalah selalu ada penugasan yang berkesan dan tidak terlupakan. Setidaknya ada tiga peristiwa yang sulit dilupakan dalam perjalanan tugas KRI Songkhla. Tiga peristiwa itu adalah, (1) identifikasi WNI di antara korban tsunami, (2) kecelakaan pesawat One-Two-Go Airlines di Phuket, dan (3) pemberian bantuan logistik di saat wabah Covid-19. Inilah cerita tiga penugasan yang berkesan tersebut.

1. Identifikasi Korban Tsunami

Pada Minggu pagi, 26 Desember 2004, tercatat dalam sejarah dunia sebuah bencana alam gempa bumi berkekuatan 9,3 SR di Aceh. Gempa Aceh bisa dikatakan sebagai salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah bencana alam modern. Gempa bumi yang sangat kuat menimbulkan gelombang tsunami yang juga sangat besar sehingga menewaskan banyak korban. Gelombang tsunami dari Aceh menyebar dengan cepat ke daratan di negara seberang terdekat, yaitu Thailand.



Gambar 66. Infografis Timeline Tsunami di Museum Tsunami di Phang Nga

KRI Songkhla baru mendapatkan informasi tersebut sekitar 1 jam kemudian, yaitu sekitar pukul 09:00 pagi. Informasi yang pertama terdengar yaitu adanya gempa dan tsunami di Aceh. Tidak lama setelah itu, terdengar kabar bahwa ada wilayah selatan Thailand yang juga terdampak gelombang tsunami. Bencana tsunami hebat di selatan Thailand kemudian diketahui terjadi di banyak provinsi di Laut Andaman, terutama di Provinsi Phang Nga, Phuket, Krabi, Ranong dan Trang.

Jumlah korban terus bertambah banyak dari jam ke jam. Dampak tsunami di selatan Thailand telah menelan banyak korban yaitu sekitar 5400 korban jiwa. Jumlah korban tersebut berasal dari banyak wilayah seperti Phang Nga +/- 4200 korban jiwa, Phuket +/- 200, Krabi +/-700, Ranong +/- 100, dan Trang +/- 512 korban jiwa. Angka tersebut adalah jumlah korban jiwa yang berhasil diketahui. Namun, jika dihitung bersamaan dengan korban hilang, korban jiwa diperkirakan sebanyak lebih dari 8000 orang.

KRI Songkhla mencatat bahwa terdapat sejumlah WNI yang tinggal di provinsi yang terdampak tsunami. Muncul kekhawatiran bahwa mungkin WNI ikut terdampak dan menjadi korban jiwa. Tidak hanya mereka yang tinggal di sana, tetapi juga kemungkinan turis Indonesia yang sedang berlibur ke selatan Thailand ikut menjadi korban. Atas dasar kekhawatiran tersebut, maka KRI Songkhla segera memutuskan pergi ke Phuket, Phang Nga serta wilayah lain di selatan Thailand yang terdampak tsunami dengan menggunakan mobil dengan pertimbangan untuk memudahkan mobilitas dalam melaksanakan tugas di tengah kerumitan suasana bencana. Setelah tujuh jam perjalanan darat, akhirnya tim KRI Songkhla tiba di tempat tujuan. Kondisi di lapangan memang menunjukkan banyak penduduk setempat dan turis yang meninggal dunia akibat hantaman gelombang tsunami yang dahsyat.

Setelah di tempat kejadian, tim KRI Songkhla memutuskan untuk berpencar menjadi dua tim. Tim pertama dipimpin oleh Pak Makmun Khalifah yang pergi bersama Pak Chesan Wangka, dan tim kedua dipimpin oleh Pak Fahmi Aris Inayah dengan rekannya Pak Suwit Binwang. Kedua tim tersebut berpencar ke provinsi yang berbeda-beda. Tugas kedua tim adalah memastikan apakah ada WNI di selatan Thailand yang menjadi korban tsunami, dan juga mencari tahu apakah ada WNI di lokasi bencana yang bisa dihubungi.

Di tengah suasana kekalutan, tim KRI Songkhla mendatangi pemerintah setempat untuk memperoleh informasi terkait kemungkinan adanya WNI yang menjadi korban di antara para korban yang sudah teridentifikasi. Pemerintah setempat pun kewalahan karena ternyata tidak hanya pemerintah Indonesia saja yang mencari kabar nasib warga negaranya, namun juga banyak pemerintah dari negara lain. Bersyukur, semua pemerintah setempat yang didatangi memberikan bantuan yang baik kepada tim KRI Songkhla. Tim KRI Songkhla melakukan penelusuran dari distrik ke distrik. Mereka merasa lega karena tidak ada WNI yang ada di dalam daftar korban yang sudah teridentifikasi, setidaknya untuk sementara waktu tersebut di wilayah Ranong dan Phuket.

Provinsi yang diinformasikan paling banyak menelan korban jiwa adalah Phang Nga, terutama di desa Khao Lak. Ketika tiba di Phang Nga, tim KRI Songkhla melihat ada banyak sekali jenazah yang terbaring di sepanjang jalan hingga ratusan meter. Situasi bencana membuat tidak cukupnya daya tampung fasilitas yang ada. Jenazah yang terbaring di pinggir jalan tersebut ada yang sudah teridentifikasi dan ada juga yang belum teridentifikasi.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah dan rumah sakit setempat di Phang Nga, tim KRI Songkhla juga memeriksa jenazah yang ada di vihara dan masjid. Saat di Phang Nga, tim mendapat informasi bahwa ada jenazah yang disinyalir merupakan WNI di Pulau Phi Phi, Provinsi Krabi. Pulau Phi Phi adalah salah satu tujuan wisata yang banyak didatangi turis asing. Setelah memperoleh informasi tersebut, tim KRI Songkhla langsung bergerak cepat untuk memastikan identitas korban yang dimaksud.

Hingga akhirnya pada siang hari, tim KRI Songkhla sampai di tempat tujuan. Namun ternyata ada hal yang tidak terduga, alih-alih memastikan identitas, bahkan jenazah yang diduga WNI tersebut justru tidak berhasil ditemukan oleh tim KRI Songkhla. Setelah proses pencarian panjang yang tidak membuahkan hasil tersebut, diketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah keputusan petugas di lapangan yang memperbolehkan jenazah tanpa identitas boleh diambil oleh keluarga setelah proses pengenalan jenazah berdasarkan penampakan fisik. Solusi tersebut dilakukan karena jumlah petugas yang sangat terbatas dan tidak tersedia perlengkapan tes DNA.

Kejadian tersebut tidak membuat tim KRI Songkhla berhenti bekerja. Tim langsung datang ke tempat-tempat penampungan jenazah lainnya di Krabi dan melakukan pemeriksaan satu per satu terhadap jenazah yang diduga orang asing. Dari penelusuran jenazah, tidak ditemukan adanya WNI yang menjadi korban tsunami di Pulau Phi Phi. Sampai pada akhir pencarian, tim KRI Songkhla merasa lega dan bersyukur karena tidak ditemukan dan tercatat WNI yang menjadi korban tsunami di selatan Thailand.

2. Kecelakaan Pesawat One-Two-Go Airlines di Phuket

Pada hari Minggu sore, tanggal 16, bulan September, tahun 2007, KRI Songkhla mendapat kabar duka yang sangat menyedihkan, yaitu kecelakaan pesawat One-Two-Go Airline dengan kode penerbangan OG269 di Phuket. Media memberitakan bahwa pesawat ini berangkat dari Bangkok dengan membawa 123 penumpang dan tujuh awak menuju Phuket. Dalam kecelakaan itu, 85 orang penumpang dan juga lima orang awak pesawatnya tewas. Korban meninggal dunia tersebut berasal dari berbagai negara.⁹

KRI Songkhla baru mendapatkan kabar tersebut pada keesokan harinya. KRI Songkhla langsung datang ke Phuket karena salah satu korban yang meninggal dunia adalah WNI. Lebih dari itu, WNI yang meninggal merupakan pilot dari pesawat. Pilot pesawat adalah Almarhum Kapten Arief Mulyadi.

Saat tiba di lokasi kecelakaan, hal pertama yang terlihat adalah kondisi pesawat yang hancur. Hal pertama yang dilakukan oleh KRI Songkhla adalah membantu otoritas setempat melakukan identifikasi jenazah. KRI Songkhla segera melakukan komunikasi dengan pihak keluarga Almarhum. Sesuai permintaan keluarga, KRI Songkhla kemudian membawa jenazah ke masjid terdekat untuk dilaksanakan proses pemulasaran jenazah sesuai ketentuan agama Islam. Setelah pemulasaran jenazah tersebut selesai, KRI Songkhla segera mengurus proses pemulangan jenazah pilot WNI tersebut kembali ke Indonesia.

Mengingat jumlah korban yang cukup banyak, peristiwa kecelakaan pesawat ini mendapat perhatian luas dari media dalam negeri Thailand serta media internasional. Berdasarkan informasi dari tempat kejadian, sejatinya pilot Arief Mulyadi tidak meninggalkan pesawat ketika sudah berhenti. Almarhum dikabarkan masih sempat membantu penumpang keluar dari pesawat sampai akhirnya pesawat meledak dan terbakar.

⁹liputan6.com, Erina Putri, *16 September 2007: Kecelakaan Pesawat Tergelincir dan Terbelah Dua di Thailand, 90 Orang Tewas*, <https://www.liputan6.com/global/read/5398381/16-september-2007-kecelakaan-pesawat-tergelincir-dan-terbelah-dua-di-thailand-90-orang-tewas> (Diakses: Oktober 2024)

3. Bantuan Logistik Covid-19

Penugasan yang juga menjadi pengalaman kerja tidak terlupakan adalah tugas menyalurkan bantuan logistik ketika wabah Covid-19 selama tahun 2020 dan 2021. Wabah Covid-19 memang merupakan peristiwa yang bersifat global yang terjadi di seluruh negara. Namun, cara dan strategi pemberian bantuan dan perlindungan kepada WNI yang terdampak wabah Covid 19 berbeda-beda di tiap Perwakilan Indonesia.

Pada masa wabah Covid-19, pergerakan orang di wilayah selatan Thailand dibatasi dan barang-barang kebutuhan pokok menjadi sulit diperoleh. Kesulitan tersebut juga dirasakan oleh WNI di selatan Thailand, apalagi mereka berada di negara asing yang jauh dari keluarga. KRI Songkhla menjadi satu-satunya yang dapat diharapkan untuk membantu mereka pada masa sulit tersebut.

Terdapat tiga tantangan eksternal untuk menyalurkan bantuan kepada WNI yang tersebar di 14 provinsi selatan Thailand. Tantangan pertama, banyaknya *check-point* yang harus dilewati untuk keluar dari rumah. *Check-point* diberlakukan di jalan-jalan utama dan di jalan perbatasan antar provinsi. Tantangan kedua, adanya keterbatasan vaksin Covid-19 bagi orang asing di masa awal munculnya vaksin. Tantangan ketiga, yaitu peraturan setempat yang mengharuskan semua orang asing harus memiliki asuransi kesehatan yang bisa menjamin biaya dan layanan kesehatannya.

Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut tidak menyurutkan langkah KRI Songkhla untuk berusaha melindungi seluruh orang Indonesia di selatan Thailand. KRI Songkhla sejak awal sudah menyusun strategi untuk tetap dapat bergerak dan bekerja menyalurkan bantuan logistik kepada seluruh WNI di 14 provinsi selatan Thailand. Sebagai langkah awal, KRI Songkhla melakukan komunikasi intensif dengan aparat berwenang untuk mendapatkan pengecualian dan keleluasaan di tengah pembatasan. Berkat hubungan yang baik, akhirnya izin khusus tersebut diberikan. Dengan izin khusus dari aparat Thailand, staf KRI Songkhla dapat tetap berkunjung ke rumah-rumah WNI untuk memberikan bantuan. Tugas ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena biar bagaimana pun juga terdapat risiko besar penularan penyakit bagi staf yang melaksanakan.

Langkah lainnya adalah KRI Songkhla sejak awal menerapkan sistem kerja *open management* terkait penanganan Covid-19. Langkah ini memungkinkan semua staf dapat mengetahui dengan persis terkait penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang digunakan, untuk apa anggaran itu digunakan, dan ke mana anggaran itu dibelanjakan.

Data keberadaan WNI dan rencana kunjungan selalu dimutakhirkan. Aksi lain yang dilakukan adalah KRI Songkhla selalu melaporkan ke Pusat mengenai perkembangan wabah Covid-19 di selatan Thailand setiap harinya. Laporan tersebut berfokus pada kondisi WNI di selatan Thailand. Bahan laporan dianalisis setiap hari jam 10 pagi untuk kemudian disampaikan siang hari.

Atas upaya KRI Songkhla melindungi WNI selama wabah Covid-19 di selatan Thailand dan keterlibatan langsung Pak Fachry Sulaiman, Kementerian Luar Negeri menganugerahkan Hassan Wirajuda Pelindungan Award kepada Bapak Fachry Sulaiman, selaku Kepala Perwakilan yang menjabat pada saat itu.

B. Permasalahan Berulang

Setiap Perwakilan memiliki permasalahan berulang yang terus menerus terjadi. Beberapa Perwakilan mungkin menghadapi isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai permasalahan berulang. Bagi KRI Songkhla, terdapat dua permasalahan berulang mengenai PMI, yaitu: (1) kasus terkait pencatatan kawin campur, dan (2) kasus terkait nelayan, Anak Buah Kapal (ABK) dan pencurian ikan.

1. Pencatatan Kawin Campur

Fenomena kawin campur atau pernikahan antar warga negara bisa dikatakan sudah menjadi hal yang umum terjadi di wilayah selatan Thailand. Bahkan di media sosial dapat ditemukan iklan paket nikah di selatan Thailand yang ditujukan untuk orang Indonesia atau Malaysia.

Kawin campur yang dimaksud biasanya pernikahan yang terjadi antara perempuan Indonesia dengan laki-laki Malaysia. Pertanyaan mungkin akan yang langsung muncul adalah mengapa orang Indonesia dan orang Malaysia menikah, tetapi memilih tempat menikah di selatan Thailand?

Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah karena lima provinsi di selatan Thailand (Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla, dan Yala) secara hukum mendapatkan keistimewaan yaitu memperbolehkan penerapan hukum Islam dalam hal perkawinan bagi penduduk muslim setempat. Dengan demikian, majelis agama di lima provinsi tersebut dapat menyelenggarakan pernikahan secara Islam. Pernikahan yang memenuhi syarat hukum Islam di lima provinsi Selatan diakui sah di wilayah tersebut.

Praktik menyelenggarakan pernikahan secara agama Islam yang tujuannya hanya untuk muslim selatan Thailand kemudian dimanfaatkan juga oleh muslim dari luar selatan Thailand. Biasanya perempuan Indonesia menikah dengan laki-laki Malaysia. Pernikahan tersebut juga merupakan pernikahan poligami bagi pengantin laki-laki. Mengingat pernikahan poligami sulit dilakukan di negara asal masing-masing, maka pasangan pengantin memilih untuk menikah secara agama Islam atau nikah siri di selatan Thailand.

Pernikahan siri yang dilaksanakan di majelis agama tentunya lebih mudah syarat-syaratnya jika dibandingkan dengan menikah secara hukum nasional. Pokok masalah kemudian akan muncul ketika pasangan menikah tersebut selanjutnya meminta kepada KRI Songkhla agar pernikahan siri mereka dapat disahkan sesuai hukum nasional.

Tentu saja KRI Songkhla tidak dapat serta merta mencatatkan dan mensahkan pernikahan siri tersebut. KRI Songkhla hanya dapat mencatat pernikahan yang memenuhi syarat hukum nasional Thailand yang menjadi tempat dilaksanakannya pernikahan. Hukum nikah secara agama sejatinya hanya untuk penduduk muslim lokal. Jadi, orang asing yang ingin menikah di Thailand harus memenuhi hukum nasional Thailand tentang perkawinan. Hukum Thailand tidak mengenal poligami, sehingga syarat menikah dalam hukum nasional Thailand adalah surat keterangan berstatus single (tidak memiliki ikatan perkawinan ketika hendak melaksanakan pernikahan).

Pelaku pernikahan kawin campur secara siri di majelis agama biasanya tidak memiliki dokumen yang lengkap yang diperlukan secara hukum nasional. Hal yang terjadi di lapangan adalah, pasangan yang hendak melakukan perkawinan campur langsung datang ke selatan Thailand begitu saja tanpa dokumen yang jelas, tidak ada informasi atau pertanyaan mengenai dari keluarga mana dan anak dari siapa. Bagi pelaku kawin campur tersebut, yang penting sudah ada penghulu, saksi, dan mahar. Jika ketiga hal tersebut sudah ada, maka urusan mereka anggap telah selesai.

KRI Songkhla tidak dapat memenuhi permintaan pencatatan dan pengesahan pernikahan siri dari majelis agama di lima provinsi, kecuali dipenuhinya persyaratan dokumen yang diperlukan. Bagi KRI Songkhla, dampak legalisasi ini sangat besar karena menyangkut harta, hak waris, hak asuh, dan perbuatan hukum lainnya. KRI Songkhla sangat berhati-hati dalam pencatatan kawin campur meski kerap kali terjadi.

2. Nelayan, ABK, dan Pencurian Ikan

Masalah kedua yang terjadi berulang adalah masalah mengenai nelayan, ABK, dan pencurian ikan. Permasalahan nelayan yang ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di wilayah Thailand terus menerus terjadi. Bahkan beberapa individu yang pernah ditangkap dan dipenjarakan sebelumnya kemudian ditangkap kembali untuk kasus yang sama. Para nelayan tersebut biasanya berasal dari Aceh dan Sumatera Utara.

Sebagai contoh, pada tahun 2022 terdapat 71 nelayan asal Aceh dan Sumatera Utara yang ditangkap oleh otoritas selatan Thailand. Selanjutnya pada tahun 2023 terdapat 69 nelayan asal Aceh dan Sumatera yang kembali ditangkap. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang pernah ditangkap sebelumnya kemudian dipulangkan atas biaya dari pemerintah Indonesia. Pada saat dibiayai pulang, mereka memohon dengan alasan kemanusiaan dan ekonomi. Nelayan yang pernah tertangkap sebelumnya ini mendapatkan masa tahanan yang lebih lama di penjara dibandingkan dengan masa tahanan nelayan yang sebelumnya tidak memiliki kasus serupa. Namun, hal tersebut sepertinya tidak membuat mereka merasa jera dan mengulang penangkapan ikan tanpa izin atau *illegal fishing*.

Penanganan para nelayan tersebut merupakan proses yang panjang. KRI Songkhla hadir mulai dari proses identifikasi saat baru ditangkap, pemberian bantuan logistik ketika ditahan, pendampingan dan penerjemahan saat persidangan, dan juga kunjungan saat masa tahanan di penjara serta deportasi.

Berdasarkan wawancara, para nelayan tersebut biasanya memperoleh pinjaman uang sebagai modal sebelum pergi melaut. Apabila di laut mereka tidak mendapatkan ikan yang dirasa cukup, mereka terkadang nekat masuk wilayah laut Thailand dengan pertimbangan mereka harus mendapatkan ikan untuk mengembalikan uang pinjaman.



Gambar 67. Pemulangan 23 Nelayan Indonesia dari Phuket tahun 2024

Terkait provinsi di selatan Thailand yang banyak dikunjungi oleh nelayan atau ABK Indonesia adalah Songkhla, Satun, Trang, dan juga Phuket. Mengingat jarak antara Songkhla dan Phuket yang cukup jauh, KRI Songkhla pernah membentuk Asosiasi Persatuan Anak Buah Kapal Indonesia (PABKI). Gagasan keberadaan PABKI antara lain adalah agar para ABK lebih dapat memberdayakan diri mereka melalui asosiasi. Misalnya terjadi kasus yang sangat mendesak atau kemalangan, maka para ABK dapat melakukan tindakan awal sambil menunggu KRI Songkhla tiba. Selain itu, PABKI juga dapat berkoordinasi mengenai kebutuhan para ABK kepada KRI Songkhla. Namun, kini PABKI sudah tidak aktif lagi karena keterbatasan sumber daya.

Terkait kasus ABK, ada satu peristiwa menarik yang terjadi, yaitu tentang seorang ABK yang dinyatakan mati di Afrika Selatan, tetapi ternyata ia masih hidup di Phuket. Kronologi kasus ini berawal dari terdapat seorang ABK yang dikabarkan meninggal dunia di wilayah Afrika Selatan dengan buku pelaut ABK tersebut tertulis atas nama Ali Topan (WNI yang tercatat di KRI Songkhla). Kabar meninggalnya Ali Topan tersebut kemudian diterima oleh KRI Songkhla yang kemudian diteruskan kepada keluarganya di Tegal.

Pihak keluarga sangat kaget karena meyakini bahwa Ali Topan masih hidup di Phuket. Hal ini lantas membuat bingung KRI Songkhla dan instansi terkait di Indonesia, Afrika Selatan, dan juga Thailand. Ketiga otoritas negara tersebut mempertanyakan siapakah yang sebenarnya dinyatakan sudah meninggal dunia.

Setelah diselidiki, KRI Songkhla memperoleh keterangan bahwa Ali Topan menjual buku pelautnya (buku identitas pelaut) kepada ABK dari negara lain. Buku pelaut itu sudah berpindah-pindah tangan. Meski lega mendapat kabar bahwa Ali Topan masih hidup, tapi sampai sekarang tidak diketahui siapa ABK yang meninggal dengan buku pelaut Ali Topan. Analogi kasus ini seperti orang yang menjual paspornya, dan paspor itu berpindah tangan berkali-kali namun paspor tersebut tetap bisa dipakai oleh pembeli terakhir.

C. Penghargaan dan Prestasi yang Diperoleh

Setelah 28 tahun berjalan, KRI Songkhla telah memperoleh beberapa capaian. Penghargaan dan prestasi tersebut tentunya bukan tujuan kerja dari KRI Songkhla, namun capaian tersebut tentu menjadi motivasi bagi KRI Songkhla untuk bekerja lebih baik lagi. Dalam catatan KRI Songkhla, ada beberapa penghargaan yang pernah diterima, yaitu penghargaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Perwakilan dengan nilai AKIP terbaik, serta penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan Award saat wabah Covid-19.

Penghargaan pertama adalah untuk pengelolaan BMN dari Menteri Luar Negeri yang diterima tahun 2017 untuk penilaian pengelolaan BMN tahun 2016. Pengelolaan BMN itu diambil dari lima struktur yang nilai-nilainya dirasa sangat baik, seperti laporan, pembiayaan, dan lain sebagainya.

Capaian kedua adalah KRI Songkhla memperoleh penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tertinggi untuk dua tahun berturut-turut. KRI Songkhla memperoleh peringkat kedua tertinggi penilaian AKIP pada tahun 2019 dan peringkat pertama tertinggi pada tahun 2020.

Selanjutnya prestasi ketiga yang pernah diterima adalah Hassan Wirajuda Pelindungan Award (HWP) untuk kepala perwakilan pada tahun 2021. Hal yang menarik dalam memperoleh HWP tersebut adalah KRI Songkhla tidak pernah mencalonkan Bapak Fachry Sulaiman, selaku kepala perwakilan untuk mendapatkan HWP. Belakangan diketahui terdapat kemungkinan bahwa pengusulan tersebut dilakukan langsung oleh masyarakat Indonesia di selatan Thailand sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi kepada Kepala Perwakilan dan KRI Songkhla.

LAMPIRAN





SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT KABINET RI

Jakarta, 6 Juni 1995

Nomor : B.296/Setkab/Hkm/6/1995
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) expl.
Perihal : Penyampaian Keputusan
Presiden Nomor 36 Ta-
hun 1995

Kepada Yth.

1. Bapak KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT/
MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT
2. Bapak KETUA
MAHKAMAH AGUNG
3. Bapak KETUA
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
4. Bapak KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
di
Jakarta

Bersama ini kami menyampaikan dengan hormat salinan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1995 tentang Pembukaan Konsulat Republik Indonesia Di Songkhla, Thailand Selatan, yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1995.

Demikian untuk mohon menjadikan periksa.



SEKRETARIAT KABINET R.I
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
Plt.

Lambock V. Nahattands

Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara;
2. Bapak Menteri Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Wakil Sekretaris Kabinet.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
DI SONGKHLA, THAILAND SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hubungan bilateral dan kerjasama antara Indonesia dan Thailand khususnya di bidang konsuler, dipandang perlu membuka Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SONGKHLA, THAILAND SELATAN.

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan.
- (2) Konsulat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Bangkok.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan meliputi wilayah Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon Si Thamrat, Narathiwat, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Yala, Ranong, Songkhla, Satun dan Surat Thani.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

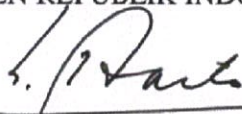
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juni 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

g.


SOEHARTO

DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0885/OT/V/95/02
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rancangan Keppres tentang
Pembukaan Konsulat RI di
Songkhla, Thailand Selatan.

Jakarta, 16 Mei 1995

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Menteri Sekretaris Kabinet
di

J a k a r t a

Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Bapak Presiden telah menyetujui dibukanya kedutaan Besar RI di Songkhla, Thailand Selatan, sebagaimana tertuang dalam surat Mensesneg nomor R.61/M.Sesneg/03/1995 tanggal 31 Maret 1995. Untuk dapat menindak lanjuti persetujuan Bapak Presiden dimaksud, berikut kami sampaikan Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembukaan Kedutaan Besar RI di Songkhla, Thailand Selatan dengan wilayah kerja Krabi, Chumpon, Trang, Nakhon Si Thamarat, Narathiwat, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Yala, Ranong, Songkhla, Satun dan Surat Thani.

Sekiranya Bapak Menteri telah berkenan atas Rancangan Keputusan Presiden tersebut, mohon kiranya Rancangan Keputusan Presiden di maksud dapat diproses menjadi Keputusan Presiden.

Demikian atas perhatian serta bantuan Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.



A. A. Menteri Luar Negeri
Sekretaris Jenderal

Soewarno
Soewarno Danusutedjo

114/KLB/5/95

boa



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Maret 1995

Nomor : R. 61 /M. Sesneg/03/1995
Kategori : Rahasia/Segera
Tempat : -
Perihal : Pembukaan Konsulat Republik
Indonesia di Songkhla, Thailand
Selatan

Kepada Yth.
Sdr. Menteri Luar Negeri
di
Jakarta

Sepma de
244287

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Bapak Presiden Nomor 0435/95/01 tanggal 21 Maret 1995 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa Bapak Presiden menyetujui pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Songkhla, Thailand Selatan.

Atas perhatian Saudara Menteri, kami ucapkan terima kasih.





ที่ กต 1103/1353

ถึง สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

อ้างถึงหนังสือสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ที่ 049/
DB/XI/95 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2538 แจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานกงสุลอินโดนีเซียที่จังหวัด
สงขลา โดยมีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรี
ธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี นั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เปิดสถานกงสุลอินโดนีเซียที่จังหวัดสงขลาได้ เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2539 ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กรมเอเชียตะวันออก
กองเอเชียตะวันออก 2
โทร. 622-1003
โทรสาร 622-1048

Ref: กต 1103/1353

To: The Embassy of the Republic of Indonesia in Bangkok, Kingdom of Thailand

With reference to the Embassy's Letter No. 049/DB/XI/95 dated 9 November 1995 proposing the establishment of the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla with its jurisdiction covers 14 provinces of Southern part of Thailand which include Krabi, Chumphon, Trang, Nakhon Sri Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang-nga, Phatthalung, Phuket, Yala, Ranong, Songkhla, Satun and Surat Thani.

The Cabinet has agreed to approve the establishment of the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla on 19 November 1996 as in the attachment.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Indonesia in Bangkok, Kingdom of Thailand, the assurances of its highest consideration.

Ministry of Foreign Affairs
16 May 1997

Department of East Asian Affairs
East Asian Division 2
Tel. 622-1003
Fax. 622-1048

ที่ นร ๐๒๑๑/๑๖๖๙๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๑๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง อินโดนีเซียขอเปิดสถานกงสุลที่จังหวัดสงขลา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๑๐๑/๑๑๑๑๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียเสนอขอเปิดสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่จังหวัดสงขลา โดยให้มีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ได้ขอให้สำนักพระราชเลขานุการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไปด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาธร จันทรแสง)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักอำนวยการและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โทร. ๒๔๒๔๒๒๔

โทรสาร ๒๔๒๔๒๒๔

- อธิบดี
- เวียง
- กอง ๒
- รอง อ. 1
- สลา.
- กอง ๓
- รอง อ. ๒
- กอง 1
- กอง ๔

Ref: นร 0200/ 16693

The Secretariate of the Cabinet
Government House, Bangkok 10300

21 November 1996

Subject: Request for the Establishment of the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla
To: Minister of Foreign Affairs
Attachment: Ministry of Foreign Affairs' Letter No. กต 1103/ 3334 dated 4 November 1996

With reference to the agreed approval under consideration upon the request by the Embassy of the Republic of Indonesia in Bangkok, Kingdom of Thailand that the Indonesian Government has proposed to establish the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla with its jurisdiction covers 14 provinces of the Southern part of Thailand which include Krabi, Chumphon, Trang, Nakhon Sri Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phang-nga, Phatthalung, Phuket, Yala, Ranong, Songkhla, Satun and Surat Thani. Therefore, the secretariate of the cabinet shall forward the matter to the cabinet for further procedure and information.

In this connection, the Secretariate of the Cabinet would like to inform that the Secretariate of the Cabinet had submitted this issue to the cabinet already on 14 November 1996 as well as urging the Office of His Majesty's Principal Private Secretary to further inform His Majesty accordingly.

Thank you very much for your kind consideration.

Yours sincerely,

Mr.Kamthorn Chansang
Deputy Secretary General
The Secretariate of the Cabinet

Office of Identity and Insignia
Tel. 2828224
Fax. 2828224

**SAMBUTAN MENTERI LUAR NEGERI
PADA UPACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
DAN PELANTIKAN KEPALA PERWAKILAN RI DI
-NOUMEA, KALEDONIA BARU
-BERLIN, REPUBLIK FEDERASI JERMAN
- NEW YORK, AMERIKA SERIKAT
- CAPE TOWN, AFRIKA SELATAN
- SONGKHLA, THAILAND
PADA TANGGAL 11 JULI 1997**

Saudara-saudara sekalian,
Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang berkat RidhoNya telah memungkinkan kita berkumpul pada hari ini, untuk menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan:

- Saudara Mas Soedajat sebagai Konsul Jenderal RI untuk Noumea, Kaledonia Baru
- Saudara M. Rachmat Ardibrata, sebagai Konsul Jenderal RI untuk Berlin, Republik Federasi Jerman
- Saudara Rachmat Ranuwijaya, sebagai Konsul Jenderal RI untuk New York, Amerika Serikat
- Saudara Abdul Nasier, sebagai Konsul Jenderal RI untuk Cape Town, Afrika Selatan
- Saudara Alexander R.A. Pareang, sebagai Konsul RI untuk Songkhla, Thailand.

yang dalam waktu singkat akan menuju ke posnya masing-masing.

PARA KONSUL JENDERAL DAN KONSUL SEKALIAN,

Penugasan Saudara-saudara sebagai Kepala Perwakilan RI bukanlah tugas yang ringan, namun mengemban misi untuk melaksanakan politik dan hubungan luar negeri dalam rangka mendukung pembangunan nasional di tanah air. Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan Saudara akan merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan serta meningkatkan citra positif bangsa di kalangan mancanegara.

Sebagai Kepala Perwakilan Konsuler, tugas Saudara-saudara meliputi pemeliharaan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, penerangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Masalah-masalah kekonsuleran merupakan porsi utama dalam tugas tersebut, terutama bagi Perwakilan Konsuler yang di wilayah kerjanya banyak berdiam ataupun dikunjungi Warga Negara Indonesia, yang perlu mendapat penanganan khusus. Untuk itu Saudara hendaknya selalu memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh pemerintah setempat.

Dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi modern serta meningkatnya kampanye berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat internasional yang sering bersikap kritis terhadap Indonesia, terutama mengenai Timor Timur, Demokratisasi, Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup, maka Saudara- Saudara dituntut untuk lebih mendalami serta menguasai permasalahan-permasalahan itu sehingga apabila diperlukan dapat bertindak secara proaktif, dalam meluruskan berita yang tidak benar, serta menangkis ataupun menyangkal isu negatif. Perkembangan internasional dan regional saat ini menuntut sikap yang tanggap dari seluruh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Saudara-saudara sekalian,

Secara umum hubungan bilateral RI dengan negara-negara di mana Saudara akan bertugas dapat dikatakan berlangsung secara akrab dan lancar. Walaupun demikian, di beberapa tempat terkadang masih ada sebagian kecil masyarakat yang bersikap kurang bersahabat terhadap Indonesia, bahkan ada yang masih mencoba

untuk mengganggu hubungan yang baik ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa aspek penting dalam hubungan bilateral dengan negara dan wilayah akreditasi Saudara masing-masing.

SONGKHLA, THAILAND

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand berjalan dengan akrab dan menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, baik dalam kerangka bilateral, ASEAN maupun di forum internasional. Hal ini tercermin pada sikap kedua negara yang saling memberikan dukungan timbal balik terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Kawasan Thailand Selatan yang terdiri dari 14 propinsi merupakan wilayah kerja KRI Songkhla berpenduduk 7,6 juta dan sebagian besar keturunan Melayu serta beragama Islam. Wilayah ini cukup berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan politik dalam negeri Thailand dan telah pula menjadi pusat perebutan pengaruh dari partai-partai politik.

Lima dari 14 Propinsi wilayah Selatan ini yaitu Songkhla, Narathiwat, Pattani, Yala dan Satun merupakan bagian dari segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT). Sebagai catatan Songkhla adalah tempat yang rawan bagi perdagangan narkoba karena letaknya yang strategis dalam penyaluran dari Segitiga Emas (Golden Triangle).

Sejak tahun 1967 hingga Pebruari 1997 investasi Thailand di Indonesia yang telah disetujui BKPM mencapai US\$ 2,29 milyar yang ditanamkan pada 28 proyek a.l. perkebunan, manufaktur dan jasa.

Sebagai perwakilan RI yang baru, KRI Songkhla perlu menggali berbagai potensi ekonomi dan sosial budaya di wilayah Thailand bagian Selatan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional Indonesia. Thailand Selatan memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat Indonesia berupa kemiripan bahasa (bahasa Melayu), kesenian dan agama. Lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia seperti pesantren dan IAIN cukup populer di kalangan terpelajar di wilayah ini.

Pemberitaan media massa setempat mengenai Indonesia, yang sebagian besar dimuat dalam surat-surat kabar berbahasa Inggris, umumnya bersumber dari kantor-kantor berita asing, seperti AFP, AP, Reuters dan lain-lain. Sedangkan dalam surat kabar berbahasa Thai, pemberitaan mengenai Indonesia masih relatif kecil.

KRI Songkhla selain mengemban misi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, perdagangan dan kemungkinan investasi, juga mengamati, menelaah dan melaporkan aspek-aspek pemberitaan mengenai Indonesia serta perkembangan penerangan dan media cetak dan elektronik di wilayah kerja yang mempunyai dampak terhadap kepentingan nasional Indonesia. Di samping itu, KRI Songkhla di bawah koordinasi KBRI Bangkok perlu berusaha mencegah dan melakukan "counter" terhadap pemberitaan negatif tentang Indonesia dalam penerbitan pers yang berada di lingkungan wilayah kerja.

PARA KONSUL JENDERAL DAN KONSUL SEKALIAN,

Akhirnya saya ingin menekankan agar Saudara-saudara terus meningkatkan hubungan koordinatif dengan Duta Besar RI di ibukota negara akreditasi Saudara. Langkah-langkah koordinasi ini diharapkan dapat Saudara-saudara laksanakan di semua bidang tugas yang ditangani, agar dapat terjalin kerjasama yang baik demi kepentingan bangsa dan negara.

Bagi para Ibu yang akan mendampingi suami bertugas di pos yang baru, saya mengharapkan agar dapat melaksanakan tugasnya, selain sebagai pendamping suami juga sebagai Ketua Kelompok Dharma Wanita setempat, dan sekaligus dapat menjadi pengayom dan panutan bagi masyarakat Indonesia di wilayah kerja masing-masing.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,

Atas nama Pimpinan Departemen Luar Negeri saya mengucapkan selamat atas pelantikan Saudara-Saudara dan selamat bertugas.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas demi bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum warakhmatullhi wabarakatuh.

SURAT - PENUGASAN
NO : 119/PO/I/97/02

Menimbang : 1. bahwa Konsulat RI di Songkhla harus segera dibuka dalam waktu secepatnya
2. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditunjuk Tim Pendahulu;

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. SK.134/OT/IX/01 tahun 1995 tanggal 18 September 1995 tentang "Perubahan Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Menteri Luar Negeri RI No.SK.69/OR/X/87/01 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Luar Negeri No.SK.133/OT/IX/95/01 tahun 1995";
2. Kawat Duta Besar RI di Bangkok No.03/bk/01/97 tentang "Tindak Lanjut Pembukaan Konsulat RI di Songkhla, Thailand";
3. Daftar Isian Kegiatan (DIK) tahun anggaran 1996/1997 untuk Perwakilan RI di Songkhla;

Menetapkan :

Menugaskan

1. Tim Pendahulu Pembukaan Konsulat RI di Songkhla yang terdiri dari :
 - a. Sdr. Suhartono R. : Ketua
Kabag Mutasi II
Biro Kepegawaian
 - b. Sdr. Warsita Eka : Anggota
Kabag Perbendaharaan
Biro Keuangan
 - c. Sdr. H Djoko Mursanto : Anggota / Calon
Kasubag A-4 Kasubagmin
Biro Keuangan Bendaharawan

...../2.

2. Tim Pendahulu tersebut bertugas melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam rangka pembukaan Konsulat RI di Songkhla, Thailand.
3. Biaya - biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada DIK Deplu (Perwakilan RI di Songkhla).
4. Surat Penugasan ini berlaku mulai saat ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Januari 1997

SEKRETARIS JENDERAL,



[Handwritten signature]
ABDUL IRSAN *[Handwritten mark]*



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BANGKOK.

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KERAJAAN THAILAND
NO. KEP/ 028 /III/97

Tentang

Pembentukan Panitia Pembukaan Konsulat RI
di Songkhla

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KERAJAAN THAILAND

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pembukaan Konsulat RI di Songkhla pada tanggal 28 Maret 1997, dianggap perlu untuk membentuk Panitia guna merencanakan dan menyelenggarakan pembukaan tersebut.
- Mengingat : 1. SK Menlu No.SK. 133/OT/IX/95/01, TAHUN 1995;
2. SK Menlu No.SK. 134/OT/IX/95/01, TAHUN 1995;
3. Kawat Deplu No. PL-1336/031797.
- Memperhatikan : Hasil rapat staf dan pengarahan Duta Besar LBBP RI di Bangkok

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk Panitia Pembukaan Konsulat RI di Songkhla pada tanggal 28 Maret 1997, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua...../

- Kedua : Panitia berkewajiban :
- a. Merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan dengan Pembukaan Konsulat RI di Songkhla.
 - b. Menyelesaikan pertanggung-jawaban dan laporan tertulis lengkap tentang penyelenggaraan Pembukaan Konsulat RI di Songkhla.
- Ketiga : Penyelenggaraan Pembukaan Konsulat dilakukan secara sederhana dan hemat.
- Keempat : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Konsulat RI di Songkhla.
- Kelima : Pembubaran Panitia dilakukan segera, setelah laporan tertulis penyelenggaraan Pembukaan Konsulat RI di Songkhla.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pembuatan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembedulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bangkok
Pada tanggal : 19 Maret 1997

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KERAJAAN THAILAND



ISBANDI GONDO S.
Duta Besar LBBP

Lampiran : Surat Keputusan Keppri
No. KEP/028 / III /97
tanggal 19 Maret 1997

PANITIA PEMBUKAAN KONSULAT RI DI SONGKHLA

Pelindung : Duta Besar LBBP di Bangkok

Penasehat : DCM

Ketua : Hardikun Supandar. SH

Wakil Ketua : Masdur Kasdana
(Calon Kepala Subbid Pensosbudpen
Konsulat RI di Songkhla)

Sekretaris : Drs. Gudadi Bambang Sasongko
Elmar Iwan Lubis. SH

Protokol/Acara/Dekorasi : Drs. Ramli Kurtianto. MA
Staf Konsulat RI Songkhla.

Bendahara : H Djoko Mursanto
(Kasubagmin Konsulat RI Songkhla)

Publikasi : Drs. A. Ibnu Prispermana W.
Kamron Naradejbhusit.

Keamanan : Kolonel Laut (T) Djoko Surjanto
Kolonel CHB R. Dibyo D. Soempeno

Bangkok, 19 Maret 1997
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KERAJAAN THAILAND



[Signature]
ISTANDI GONDO S.
Duta Besar LBBP

BAB IV ADMINISTRASI

A. Pembukaan Perwakilan

1. Persiapan Pembukaan

Konsulat RI Songkhla dibuka berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 36 tahun 1995 (Lampiran 1). Surat Keputusan Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Luar Negeri dengan Surat Keputusan No. SK.134/OT/IX/01/95 tanggal 18 September 1995 (Lampiran: 2) tentang Perubahan Lampiran A dan Lampiran B Keputusan Menteri Luar Negeri No.:SK.69/OR/X/87/01 tentang Susunan Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri. Dalam Surat Keputusan tersebut dicantumkan Susunan Organisasi KRI Songkhla sebagai berikut:

- a. Kepala Perwakilan,
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
- c. Kepala Sub Bidang Ekonomi,
- d. Kepala Sub Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya,
- e. Kepala Sub Bidang Konsuler (belum datang).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri tersebut, Sekretaris Jenderal Deplu dengan Surat Penugasan No. 119/PO/I/97/02 tanggal 28 Januari 1997 (Lampiran:3) menugaskan Tim Pendahuluan Pembukaan Konsulat RI di Songkhla dengan susunan sebagai berikut:

- a. Suhartono Ronggodirdjo : Ketua
Kabag Mutasi II, Biro Kepegawaian
- b. Warsita Eka : Anggota
Kabag Perbendaharaan, Biro Keuangan
- c. H. Djoko Mursanto : Anggota
Kasubag Pembakuan Volume & Biaya
Biro Keuangan.

Dengan Surat Ijin dari Menteri Sekretaris Kabinet No. KL.0703/UMPL/186 tanggal 31 Januari 1997 (Lampiran:4) Tim tersebut berangkat ke Songkhla untuk mencari data yang diperlukan dan melaksanakan berbagai persiapan sehubungan dengan pembukaan KRI Songkhla diantaranya mencari gedung untuk kantor dan rumah untuk Wisma Konsul.

a. Gedung Kantor

Tanggal 2 Pebruari 1997 Tim berangkat menuju Songkhla lewat KBRI Bangkok. Setelah mendapatkan pengarahannya dari Kuasa usaha a.i. KBRI Bangkok (Sri Rahayu Purnomo) didampingi oleh seorang Staf Lokal (Sdr. Budiman Saragih) Tim berangkat menuju Songkhla. Setelah mengadakan penelitian baik mengenai masalah keamanan, kelayakan dan prioritas lainnya maka dengan Surat No. 011/Skl/Adm/III/97 tgl. 1 Maret 1997 (lampiran: 5) setelah melihat kondisi kota Songkhla dan beberapa gedung yang ada, Tim membuat laporan dan mengusulkan untuk menyewa gedung/tempat tinggal yang terletak di Sadao Road No. 19, Songkhla sebagai Kantor Konsulat RI. Usul Tim disetujui oleh Sekretaris Jenderal (Lampiran: 6). Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan pengusulan tersebut adalah gedung tersebut cukup besar dan mempunyai halaman luas, terletak di daerah elite (dekat dengan kantor Gubernur dan rumah dinas Gubernur Songkhla, Konsulat Jenderal China dan Konsulat Jenderal Malaysia), tenang dan aman.

Segara setelah mendapat persetujuan dari Sekjen tersebut, Duta Besar RI di Bangkok dengan Surat Tugas No. 34/ST/III/97 tanggal 17 Maret 1997 (Lampiran: 7) menugaskan Sdr.Ramli Kurtianto (Kabid Protokol & Konsuler) untuk mewakili Konsulat RI dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak sewa gedung untuk kantor Konsulat RI. Pada saat yang bersamaan dengan Surat Keputusan No. KEP/028/III/97 tanggal 19 Maret 1997 (Lampiran: 8) Duta Besar RI di Bangkok membentuk Panitia Pembukaannya. Panitia tersebut mempunyai tugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penandatanganan kontrak sewa gedung kantor dan pelaksanaan peresmian Pembukaan Kantor Konsulat RI Songkhla.

Selanjutnya atas persetujuan Sekjen, KRI Songkhla menunjuk Penasehat Hukum yaitu Hatyai Legal and Business Counsellor

(HLBC) yang beralamat di 49/124 Krongrien I Rd, T. Karhong A. Hatjai, Songkhla 90110, Thailand untuk mewakili Konsulat RI dalam membuat perjanjian kontrak sewa gedung kantor. Setelah diadakan beberapa kali pembicaraan baik dengan Penasehat Hukum dan pemilik rumah, maka penandatanganan kontrak sewa kantor dilaksanakan pada tgl. 26 Maret 1977 (Lampiran: 9).

Dua hari kemudian tepatnya tanggal 28 Maret 1997 Kantor Konsulat RI di Songkhla diresmikan penggunaannya oleh Bapak Isbandi Gondo, Duta Besar RI di Bangkok.

b. Wisma Konsul

Seperti telah diuraikan di atas, Songkhla adalah kota kecil yang berpenduduk sedikit dengan fasilitas terbatas. Cukup sulit dan lama untuk mendapatkan rumah yang sesuai dan representatif sebagai Wisma Konsul RI.

Setelah menemukan sebuah rumah dan dilaporkan ke Pimpinan Deplu dengan mengemukakan berbagai pertimbangan akhirnya Pimpinan Deplu memberikan persetujuannya untuk menyewa rumah yang terletak di Kancanavanich Road Soi 6 No. 99/92, Songkhla 90000, Thailand. Kontrak sewa ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1997 selama 10 (sepuluh) tahun dengan besarnya sewa Baht: 80,000.00 perbulan (Lampiran:10).

Rumah tersebut terletak di luar kota Songkhla (\pm 10 menit dari kantor) pada daerah perumahan yang sedang berkembang dan mudah dijangkau baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Rumah yang mempunyai luas tanah/bangunan masing-masing 1500 M² dan 600 M² itu memiliki fasilitas cukup lengkap dan dinilai lebih representatif sebagai Wisma Konsul daripada rumah-rumah lainnya.